

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI**

(Studi di Kampung Topeng Malang Dusun Baran Kecamatan Kedung Kandang

Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SHAFIRA FIRDAYANTI

145030101111064



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“Selalu libatkan Allah dalam setiap mengambil langkah dalam sebuah keputusan
Insya Allah Kamu Akan Berhasil”.

(Kusmiati)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Program Desaku
Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang Dusun Baran
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

Disusun oleh : Shafira Firdayanti

NIM : 145030101111064

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

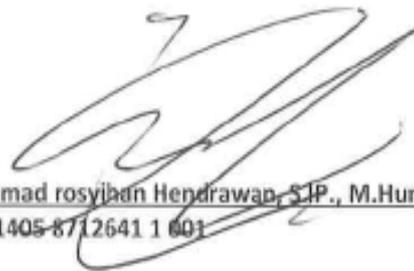
Malang, 10 Desember 2018

Ketua Komisi Pembimbing



Niken Lastiti V.A., S.AP., M.AP
NIP. 19810210 2005 01 2 002

Anggota Komisi Pembimbing



Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum
NIP. 201405-8712641 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Desember 2018

Mahasiswa



Nama : Shafira Firdayanti

NIM : 145030101111064

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Desember 2018
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Shafira Firdayanti
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002

Anggota



Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP, M.Hum
NIP. 20140587126414001

Anggota



Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP 19710828 200604 1 001

Anggota



Trisnawati, S.Sos, M.AP
NIP.198003072008012 012

Shafira Firdayanti, 2018. **Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang Dusun Baran Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**, Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua Komisi Pembimbing Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP, Anggota Komisi Pembimbing Muhammad Rosyihan Hendrawan., S.IP, M.Hum., 161 hal.

RINGKASAN

Kemiskinan merupakan suatu kendala dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai faktor melingkupi alasan penduduk miskin di Kota Malang salah satunya adalah faktor urbanisasi dimana dengan harappan masyarakat berpindah dari desa ke kota untuk mencari sumber kehidupan yang lebih baik. namun, masyarakat tidak dibekali yang cukup untuk dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga yang terjadi akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan salah satunya adalah keberadaan pemulung, pengemis, dan anak jalanan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan didukung dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2012 bahwa komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan PMKS yang ada di perkotaan. Selain itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang upaya yang dilakukan untuk menanggulangi percepatan kemiskinan adalah dengan melakukan bantuan dalam bentuk program-program yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program penanggulangan berbasis kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya adalah Program Desaku Menanti. Program Desaku Menanti merupakan sebuah program yang di inisiasi oleh Kementerian Sosial melalui direktorat Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial dalam mengembangkan model Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa. Program ini dilaksanakan di 5 Kota yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasuruan, Padang, dan Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang cukup berhasil dalam mengembangkan program ini yaitu dengan merubah hunian rehabilitatif menjadi sebuah destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Topeng Malang serta bagaimana dampak yang dihasilkan dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Topeng Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari

peneliti sendiri, pedoman wawancara, serta alat-alat yang mendukung dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Topeng Malang terdiri dari Pembinaan diri dan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan fisik, mental, dan sosial ; bimbingan keterampilan; dan bimbingan pendidikan. Kedua yaitu pengembangan usaha ekonomi kreatif di Kampung Topeng Malang untuk dapat menambah penghasilan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat meliputi Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, Pekerja Sosial, Dana Bantuan Usaha (CSR), serta pihak-pihak lain yang dapat mendukung dalam proses pemberdayaan di Kampung tersebut. Hasil pemberdayaan dalam aspek ekonomi yaitu (1)masyarakat sudah mempunyai usaha di bidang kuliner, sebagian lagi sebagai pegawai toko oleh-oleh milik Dinas Sosial Kota Malang, sedangkan sebagian lagi menjadi buruh pabrik di Bengkel Kerja Desaku Menanti, (2) masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sudah dibekali dengan pelatihan baik ternak maupun berdagang untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam aspek sosial keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata sudah mulai tumbuh dengan adanya koordinator kampung. Selain itu, masyarakat juga diberikan fasilitas pendidikan kejar paket agar bisa digunakan sebagai melamar pekerjaan. Bagi masyarakat yang masih kedatangan kembali mengemis akan diberikan sanksi berupa teguran/lisan hingga dikeluarkan dari wilayah kampung topeng malang.

Saran dari peneliti adalah (1) tenaga pekerja sosial juga perlu dibekali dengan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas diri, (2) diperlukan kerjasama lebih luas terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi 2 fokus utama saat ini, (3) koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, dengan masyarakat diluar wilayah Kampung Topeng Malang untuk menghindari konflik kecemburuan sosial.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Program Desaku Menanti, Kesejahteraan Sosial, Kampung Topeng Malang, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Shafira Firdayanti, 2018. **Empowering People with Social Welfare Issues (PMKS) Through Desaku Menanti Program (Study in Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Chairperson of the Advisory Commission, Niken Lastiti VA, S.AP, M.AP, Member of Supervisory Commission Muhammad Rosyihan Hendrawan. S.IP, M.Hum., 161 pages

SUMMARY

Poverty is an obstacle in multidimensional development related to economic, social and cultural aspects. One of the factors surrounding the reasons for the poor in Malang City is one of urbanization, with the hope that people move from village to city to find a better source of life. However, the community is not equipped enough to develop their potential so that what happens will cause new problems in urban areas, one of which is the presence of scavengers, beggars and street children. In accordance with Law Number 11 of 2009 and supported by Minister of Social Affairs Regulation Number 12 of 2012 that the government's commitment in resolving the problems of PMKS in urban areas. In addition, according to Presidential Regulation Number 15 of 2010 concerning efforts made to tackle the acceleration of poverty is to do assistance in the form of sustainable programs. One of them is the community empowerment based poverty reduction program group.

One of the poverty-based prevention programs implemented by the government is the My Village Awaiting Program. The Desaku Menanti Program is a program initiated by the Ministry of Social Affairs through the directorate of Social Rehabilitation and Social Tuna in developing the Village-Based Homelessness and Beggars Rehabilitation model. The program is implemented in 5 cities, namely the Special Region of Yogyakarta, Pasuruan, Padang, and the City of Malang. Malang City is one of the cities that has been quite successful in developing this program by changing rehabilitative housing into a tourist destination that can attract tourists to visit. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the empowerment process is carried out in Kampung Topeng Malang and how the impact is generated from the social and economic aspects of Kampung Topeng Malang.

This study uses a type of descriptive research using a qualitative approach. Sources of data collected through primary data and secondary data collected through data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The research instrument used consisted of the researchers themselves, interview guidelines, and tools that supported the research.

The results of this study indicate that the empowerment carried out in Malang Mask Village consists of self-guidance and development of human

resources through physical, mental, and social guidance; skills guidance; and educational guidance. The second is the development of creative economic enterprises in Kampung Topeng Malang to increase people's income. The actors involved included Dinas Sosial Kota Malang, LKS Insan Sejahtera, Social Workers, Business Aid Funds (CSR), and other parties who could support the empowerment process in the village. The results of empowerment in the economic aspects are (1) the community already has a business in the culinary field, while the rest are employees of a shop belonging to the Malang City Social Service, while the rest are factory workers in the My Work Workshop Waiting, (2) people who do not have the work has been provided with training in both livestock and trading to reduce unemployment. In the social aspect community involvement in developing tourism potential has begun to grow with the presence of village coordinators. In addition, the community was also given an educational facility to pursue a package so that it could be used as a job application. For people who are still caught in begging, they will be given sanctions in the form of reprimand / verbal warnings until they are expelled from Kampung Topeng Malang.

Suggestions from researchers are (1) social workers also need to be provided with training to be able to improve self quality, (2) broader collaboration is needed, especially in the education and health fields which are currently the two main focuses, (3) coordination between Dinas Social, LKS Insan Sejahtera, with communities outside Kampung Topeng Malang to avoid conflicts of social jealousy.

Keywords: Poverty, Community Empowerment, Desaku Menanti Program, Social Welfare, Kampung Topeng Malang, Persons with Social Welfare Problems

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang Dusun Baran Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Ony Wahyudin Sembada dan Ibu Kusmiatu yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr. Fadillah Amin, Ph.d selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Ibu Metha selaku ketua LKS Insan Sejahtera yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan, serta doa.
8. Adikku tercinta yaitu Muhammad Syafiq Wahyu Anggara serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
9. Sahabatku yaitu Sayangku Riska Andistyani, Kharirus Sai'diyah El Firda, Putri Purwati, Farah Anggraeni, Afies Ayu Putri Novanto, serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Mas Satria dan Mbak wulan yang selalu memberikan masukan dalam proses mengerjakan skripsi.

11. Abang Grab yaitu Alief Wimo Satrio yang selalu sabar dalam memberikan motivasi, doa,serta dorongan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi
12. Adik-adik SMK 2 Malang Nimas, Melinda, Joko, Cecil, Anin yang telah memberikan canda tawa, serita ketika di dalam pelaksanaan penelitian di Desmen
13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
D. Kontribusi Penelitian	26
E. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	29
B. Administrasi Pembangunan	
1. Definisi Administrasi Pembangunan	31
2. Tujuan Administrasi Pembangunan	34
3. Ciri-ciri pembangunan	35
4. Pembangunan Sosial	35
D. Pemberdayaan Masyarakat	
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	38
2. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat	43
3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	45
4. Aktor-aktor Pemberdayaan Masyarakat	48
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	49
6. Permasalahan dalam Pemberdayaan	52
E. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
1. Pengertian dan Tujuan Kesejahteraan Sosial	54
2. Pengertian dan Jenis PMKS	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	61
B. Fokus Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian	63
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Instrumen Penelitian	68
G. Metode Analisis Data	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang	73
2. Gambaran Umum LKS Insan Sejahtera	76
3. Gambaran Umum Kampung Topeng Malang	79
B. Penyajian Hasil Penelitian	
1. Pemberdayaan Masyarakat PMKS Melalui Program Desaku Menanti	
a. Proses Pemberdayaan Masyarakat	81
b. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat	104
c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan	128
2. Hasil Pemberdayaan Desaku Menanti	
a. Aspek Ekonomi	137
b. Aspek Sosial	140
C. Analisis Penyajian Data Penelitian	
1. Pemberdayaan Masyarakat PMKS Melalui Program Desaku Menanti	
a. Proses Pemberdayaan Masyarakat	147
b. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat	154
c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan	157
2. Hasil Pemberdayaan Desaku Menanti	
a. Aspek Ekonomi	160
b. Aspek Sosial	162

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	166
B. Saran	169

DAFTAR TABEL

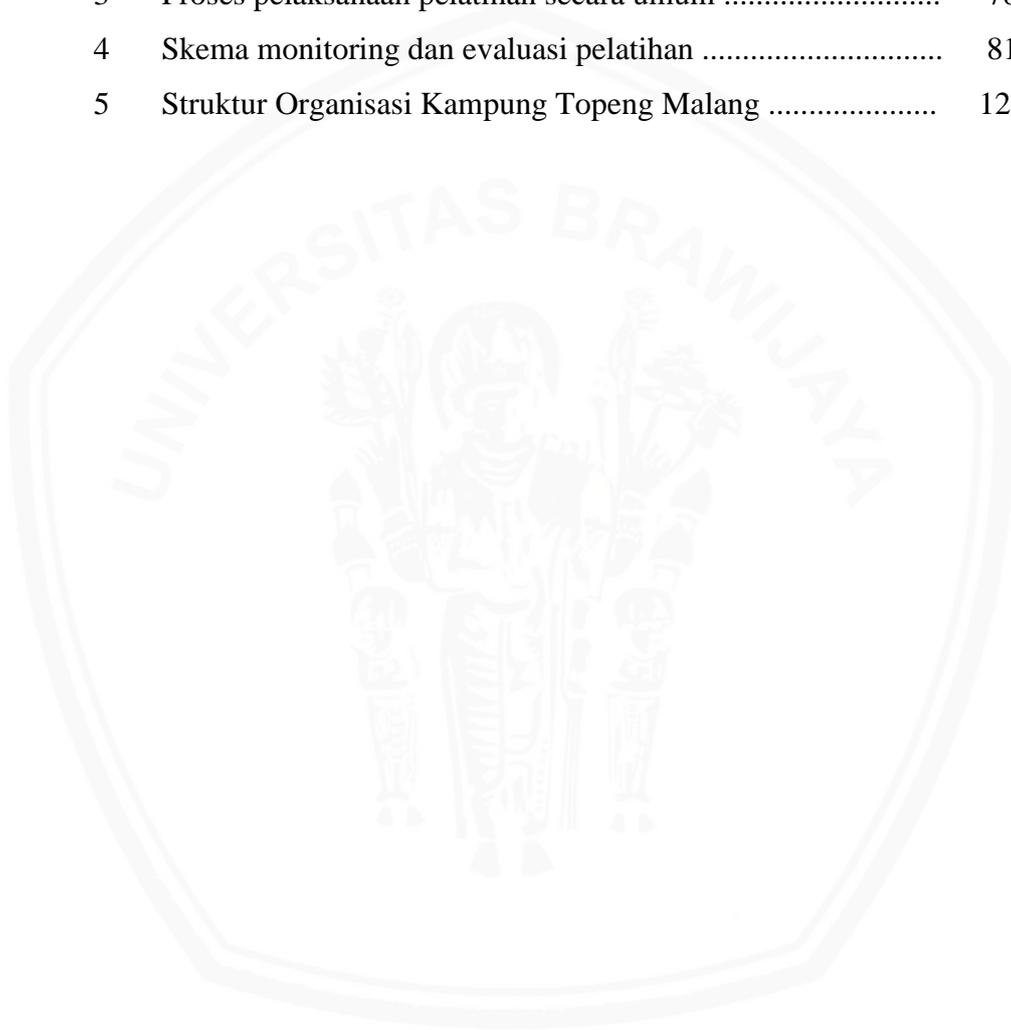
NO	JUDUL	HAL
1	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017.....	3
2	Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur Tahun 2017	4
3	Jumlah PMKS di Kota Malang Tahun 2016	5
4	Jumlah Penerima Program Desaku Menanti.....	7
5	Indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat	31
6	Peran Aktor dalam Pemberdayaan	34
7	Presentase Penduduk Kota Malang Menurut pengeluaran Perkapita Tahun 2012-2016	61
8	Pengelompokan Jenis Pelatihan	74
9	Standar Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial	84
10	Rekapitulasi Keterampilan Kampung Topeng Malang	86
11	Warga yang Mendapatkan Penyuluhan Narkoba	92
12	Jumlah Peserta Paket A	101
13	Jumlah Peserta Paket B	102
14	Jumlah Peserta Paket C	102
15	Daftar Donatur Pembangunan Bengkel Kerja	108
16	Jumlah Pengelolaan Wisata Kampung Topeng Malang	110
17	Daftar CSR Tahun 2016-2018	117
18	Daftar Nama Siswa PAUD Insan Sejahtera	132

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
	Model Analisis Data Cresswell	
1	Peta Kota Malang	61
2	Kegiatan Pelatihan membuat snak hari pertama	98
3	Kegiatan Pelatihan Membuat Snak hari kedua	99
4	Kegiatan Gosok Gigi PAUD	103
5	Akun Media Sosial Instagram Kampung Topeng Malang	113
6	Website Kampung Topeng Malang	114
7	Topeng Di Galeri Kampung Topeng Malang	126

DAFTAR BAGAN

No	Judul	Hal
1	Struktur Organisasi LKS Insan Sejahtera	65
2	Tahap-tahap pelatihan secara umum	72
3	Proses pelaksanaan pelatihan secara umum	78
4	Skema monitoring dan evaluasi pelatihan	81
5	Struktur Organisasi Kampung Topeng Malang	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua negara. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk dapat merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik.pembangunan nasional merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat bangsa, serta negara yang merupakan sebuah proses untuk mengembangkan keseluruhan dari suatu sistem dalam mewujudkan tujuan nasional Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam UUD 1945 bahwa pembangunan hendaknya dilakukan secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Sesuai dengan nawacita Indonesia, salah satu yang menjadi fokus dalam pembangunan yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan menurut Garetta (2013:2) masih dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak begitu berdampak dan hanya berfokus ke daerah-daerah tertentu saja seperti daerah Jawa, Sumatera, dan Bali. Sehingga, dampak yang dapat terlihat adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Permasalahan kesejahteraan sosial sangat luas yang meliputi masalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta kemiskinan.

Kemiskinan menurut Sumodiningrat (2011:26) adalah salah satu kendala dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, serta budaya. Pendapat lain diutarakan oleh Baharaoglu dan Kessides dalam Chamhuri dkk(2012:806) kemiskinan merupakan *commoditization (reliance on the cash)* ketergantungan pada sektor ekonomi; masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh dan sesak (*overcrowded living conditions*); bahaya lingkungan (*environment hazard*) yang disebabkan karena kepadatan dan lokasi pemukiman yang berbahaya dan paparan terhadap polutan; adanya fragmentasi sosial yang mengakibatkan kurangnya mekanisme masyarakat dan antar rumah tangga dalam jaminan sosial (*social fragmentation*); kejahatan dan kekerasan sosial (*crime and violence*); serta ukuran yang paling dominan adalah ketidakpuasan / ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar (sandang, papan, pangan). Berikut ini merupakan data tentang jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan pulau tahun 2017.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2017

NO	NAMA PULAU	JUMLAH PENDUDUK (JUTA JIWA)	PRESENTASE (%)
1	Jawa	14,79	10,01
2	Sumatera	6,23	10,97
3	Bali dan Nusa Tenggara	2,12	14,71
4	Sulawesi	2,12	11,05
5	Maluku dan Papua	1,52	21,45
6	Kalimantan	0,99	6,25

Sumber : Rachman (2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi masih didominasi di wilayah Jawa. Sehingga, menurut Laksmi (2017) Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama dalam kemiskinan Jumlah penduduk miskin yang mendiami wilayah Pulau Jawa sebesar 5.356.210 juta jiwa dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 5.107.360 jiwa dan Jawa Barat sebesar 4.648.630 jiwa. Berbagai faktor kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi adalah disebabkan karena adanya arus urbanisasi, kepadatan penduduk, serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, menurut Jajeli (2017) mengatakan bahwa Gubernur Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Terdapat 4 fokus yang menjadi perhatian pada tahun 2017-2018 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dibawah tingkat nasional, menurunnya jumlah penduduk miskin di eringkat kedua secara nasional, menurunnya tingkat indeks kedalaman kemiskinan di bawah nasional, dan menurunnya indeks keparahan kemiskinan dibawah nasional. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur per Maret 2018 mencapai 4.332,59 ribu jiwa atau sebesar 10,98% berkurang sebesar 72,68 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan kondisi bulan September 2017 yang

sebesar 4.405,27 ribu jiwa atau 11,20%. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam mengatasi kemiskinan daerah tersebut. Berikut ini merupakan data tentang jumlah kemiskinan yang ada di Jawa Timur:

Tabel 1.2. Jumlah kemiskinan di Jawa Timur

NO	Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Penduduk Miskin		
		2015	2016	2017
1	Kab. Sampang	27,97%	24,11	23,56
2	Kab. Bangkalan	24,7%	21,41	21,32
3	Kab. Malang	11,53	11,49	11,04
4	Kota Batu	4,47%	4,48	4,31
5	Kota Malang	5,21%	4,33%	4,17%
6	Kota Surabaya	5,82%	5,63	5,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2017)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Malang secara angka jauh lebih baik dibandingkan dengan Kota Batu dan Kota Surabaya. Berbagai faktor jumlah kemiskinan di kota Malang masih menjadi pekerjaan rumah tangga karena adanya faktor urbanisasi. Masyarakat berpindah dari desa ke kota dengan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup namun tanpa dibekali dengan kemampuan dan keterampilan. Sehingga, menurut data dari BPS tahun 2014 bahwa total jumlah penduduk 840.803 jiwa diantaranya 43.300 jiwa termasuk kedalam golongan miskin dan berprofesi sebagai pemulung dan pengemis.

Pemulung dan pengemis merupakan salah satu bentuk dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Menurut undang-undang no 8 tahun 2012 bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan,

kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan kepada orang lain. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai strategi yang tepat tertuang di dalam visi misinya yaitu dapat menanggulangi kemiskinan secara tepat.

Menurut Rais dalam Dumilah (2016:3) peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan, karena negara / pemerintah menjamin hak hidup masyarakatnya sesuai dengan undang-undang 1945 alinea ke-4. Selain itu, dalam rangka mendukung pengurangan angka kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dalam pasal 5 butir 1 terdapat program percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk dapat terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bentuk penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah terutama Kementerian Sosial yaitu Program Desaku Menanti. Program ini merupakan program rehabilitatif berbasis kekeluargaan yang ditujukan bagi kelompok gelandangan, pengemis, serta anak jalanan dengan menekankan pengembalian ke daerah asal atau remigrasi. Menurut Purnamawati (2017) program ini dilaksanakan di 5 Kota di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasuruan, Padang, serta Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur yang mempunyai jumlah PMKS terbanyak. Berikut ini merupakan data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Malang:

Tabel 1.3 Jumlah PMKS di Kota Malang Tahun 2017

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Fakir Miskin	99.638
2	Anak Jalanan	227
3	Gelandangan	56
4	Pengemis	184
5	Psikotik	38

Sumber : Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani (2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kota malang masih di dominasi oleh fakir miskin, anak jalanan, serta pengemis. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Meta pada tanggal 29 september 2018 selaku Kepala LKS Insan Sejahtera bahwa program ini merupakan salah satu program yang dikatakan cukup berhasil dan menjadi percontohan bagi kota yang lainnya karena mampu mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan menurut Annisa (2017) bahwa pada november 2016 pemerintah (kemensos) telah memberikan fasilitas berupa bantuan berupa pembangunan 40 rumah dan bantuan dana usaha sebesar Rp 1,8 miliar yang digunakan sebagai pengembangan ekonomi kreatif dengan tujuan dana yang telah diberikan dapat digunakan secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan data tentang jumlah penerima program Desaku Menanti:

Tabel 1.4 Jumlah penerima program desaku menanti

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
Sukun	20
Janti	1
KedungKandang	16
Blimbing	2
Klojen	1
JUMLAH	40

Sumber : Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani Kota Malang (2016)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial bersama dengan Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera berkomitmen dalam mengatasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Hingga sampai saat ini aktor-aktor tersebut masih melakukan pemberdayaan dengan melakukan inovasi-inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait yaitu mampu merubah hunian yang layak tinggal dengan merubah kampung yang dapat menjadi salah satu destinasi wisata

di Kota Malang. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dusun Baran Kecamatan Kedung Kang, Kota Malang yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya yang ada di Kampung Topeng Malang. Oleh sebab itu, peneliti memberikan judul penelitian **“Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Desaku Menanti(Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang) ?
2. Bagaimanakah hasil pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Desaku Menanti dalam aspek ekonomi dan aspek sosial(Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Desaku Menanti(Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang).
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang).

D. Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk dapat mengembangkan potensi wisata Desaku Menanti.
 - b. Memberikan masukan bagi masyarakat kelompok sadar wisata Dusun Baran dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan. Selain itu, bab ini mengemukakan pula rumusan masalah untuk memfokuskan hal-hal yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan-landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan Sosial, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdapat data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini yang berupa penyajian data yang telah diperoleh melalui permasalahan yang dibahas dan tercantum di dalam fokus penelitian, kemudian, data yang didapat tersebut akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan terdapat 2 sub bab pokok pembahasan yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian yang sudah ditemukan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, sedangkan saran merupakan masukan untuk dapat mengatasi masalah dalam penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Administrasi Publik

secara harfiah, administrasi dalam bahasa Arab yaitu *yudabbiru*, sedangkan dalam bahasa Prancis “*administer*” dan dalam bahasa Inggris sebagai *administration*. Menurut Siagian dalam Safiie (2008:3) administrasi merupakan sebuah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pasolong (2008:3) administrasi juga bermakna pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, serta rasional. Dapat disimpulkan bahwa, administrasi merupakan sebuah proses kerjasama yang dilakukan oleh kelompok melalui sebuah keputusan yang telah disepakati bersama sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan. Menurut Syafiie (2008:10) bahwa negara merupakan suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayaha yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintahan yang lebih tinggi. Terdapat 4 syarat dapat dikatakan sebagai sebuah negara yaitu adanya wilayah, adanya pengakuan dari negara lain, adanya pemerintahan, serta adanya rakyat.

Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan Administrasi negara. Menurut Kasim (1993:21) administrasi negara salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan dan terlibat didalam seluruh proses kebijakan publik. Selain itu, administrasi



negara juga mempelajari tentang seluruh proses, organisasi, dan individu sesuai dengan peran dan tupoksi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan peradilan. Menurut Syafiie (2008:35), menguraikan ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

1. Bidang hubungan, peristiwa, dan gejala pemerintahan meliputi administrasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, pemerintahan desa, pemerintahan kotamadya, pemerintahan kota administratif, departemen dan non-departemen.
2. Bidang kekuasaan meliputi administrasi politik luar negeri, politik dalam negeri, partai politik, serta administrasi kebijaksanaan pemerintah.
3. Bidang perundang-undangan meliputi landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional.
4. Di bidang kenegaraan meliputi tugas dan kewenangan negara, hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara, fungsi dan prinsip negara, unsur-unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.
5. Di bidang ketatalaksanaan meliputi administrasi pembangunan, perkantoran, kepegawaian, kemiliteran, kepolisian, perpajakan, pengadilan, kepenjarahan dan administrasi perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk dapat mengorganisir dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah secara efektif, efisien, serta rasional sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Administrasi publik juga dapat dikatakan sebagai administrasi pembangunan karena di dalam administrasi negara tidak hanya mempelajari tata kenegaraan yang meliputi tugas dan kewenangan negara, fungsi-fungsi negara juga merupakan sebuah alat untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional.

C. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Pembangunan

.Secara konsep, administrasi pembangunan terdiri dari dua kata yaitu Administrasi dan Pembangunan. Secara umum, administrasi merupakan sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dimana di dalamnya menerapkan unsur-unsur manajemen misalnya *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling*. Menurut Siagian (2003:5) dalam listyaningsih (2014:18) bahwa administrasi merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam segala aspek kehidupan dalam mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pembangunan sendiri berasal dari kata bangun yang artinya proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan untuk merubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Pembangunan menurut Siagian (1984:28) bahwa terdapat 4 konsep dasar yaitu:

a. Pembangunan mengandung makna perubahan.

Perubahan disini maksudnya adalah dalam kehidupan bernegara untuk dapat mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik diperlukan sebuah usaha atau harus melalui proses yang sangat panjang. Kondisi yang lebih baik tidak hanya dapat dilihat dari segi infrastruktur atau sarana dan prasarana saja tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya misalnya pembangunan terhadap sumber daya manusia. Pembangunan manusia tidak hanya mencakup masalah finansial atau ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek lainnya misalnya sosial, budaya, serta aspek politik.

b. Pembangunan mengandung makna perubahan.

Perubahan disini maksudnya adalah dalam kehidupan bernegara untuk dapat mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik diperlukan sebuah usaha atau harus melalui proses yang sangat panjang. Kondisi yang lebih baik tidak hanya dapat dilihat dari segi infrastruktur atau sarana dan prasarana saja tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya misalnya pembangunan terhadap sumber daya manusia. Pembangunan manusia tidak hanya mencakup masalah finansial atau ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek lainnya misalnya sosial, budaya, serta aspek politik.

c. Pembangunan adalah pertumbuhan

Pertumbuhan adalah kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Suhri & Rosma (2003:60)

pembangunan secara kuantitatif maksudnya adalah bagaimana masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan ekonomi, namun secara kualitas dapat diukur melalui bagaimana kemandirian, kemahiran, bahkan pengetahuan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi lebih baik.

d. Pembangunan yang dilakukan secara sadar dan terencana

Pembangunan yang dilakukan secara sadar mengandung makna bahwa pembangunan dilakukan tidak dengan sendirinya dan hanya kebetulan semata tetapi dilakukan dalam sebuah proses yang dikerjakan di bawah alam sadar manusia. Secara Konseptual maupun secara operasional pembangunan dilakukan secara terencana yang di mulai dari proses perencanaan (*planning*), mengorganisir (*organizing*), penganggaran (*budgeting*), serta controlling dilakukan secara bertahap dan berkala, sehingga terdapat step atau tahapan-tahapan yang harus di lalui. Tahapan-tahapan yang harus di lalui melalui perencanaan yang matang serta disusun secara rapi dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembangunan dapat mencapai titik tujuan tertentu

Tujuan juga mempunyai makna yang sama dengan cita-cita. Tujuan tersebut berarti harapan-harapan apa yang akan di dapatkan ketika sedang melakukan sebuah usaha tertentu atau dalam kata lain wujud pembangunan yang nantinya akan mengubah masyarakat baik perilaku maupun yang lainnya untuk menjadi lebih baik.

Administrasi pembangunan menurut Tjokroamodjojo (1995:13) dalam Listyaningsih (2014:18) adalah proses pengendalian usaha oleh pemerintah untuk

dapat merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selain itu, pendapat berbeda di ungkapkan oleh Sondang (2003: 4-5) dalam Listyani (2014:19) bahwa administrasi pembangunan merupakan sebuah rangkaian yang di lakukan secara sadar dan terencana baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta pembangunan yang dilakukan yang diarahkan mengarah ke modernitas dimana mengubah cara berfikir masyarakat menjadi lebih rasional tetapi tetap menggunakan budaya lokal setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang di lakukan oleh negara, institusi, bahkan elemen yang terkecil dalam tataran bernegara untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih modern.

2. Tujuan Administrasi Pembangunan

Menurut Todaro (2004:34) tujuan dari sebuah pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
- b. Meningkatkan taraf hidup, yaitu dengan memlalui menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang baik, perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan baik dalam hal sosial, jasmani, maupun rohani.
- c. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perseorangan dan bangsa dengan memberikan kebebasan dan ketergantungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat merubah perilaku masyarakat dimana tujuannya adalah untuk perubahan yang lebih baik. perubahan tersebut diantaranya untuk memajukan perekonomian masyarakat, merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat menjadi yang lebih baik sesuai dengan cita-cita dari pembangunan itu sendiri.

3. Ciri-ciri Pembangunan

Menurut Tjokrowinoto (1996) ciri-ciri pembangunan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk menuju ke perubahan sosial yang lebih baik.
- b. Pembangunan yang dilakukan secara sadar dan terencana.
- c. Pembangunan sebagai perubahan sosial yang bebas nilai.
- d. Pembangunan sangat berkaitan dengan sebuah proses terhadap pencapaian suatu tujuan

4. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial menurut Huraerah (2008:19) pembangunan sosial tidak hanya berkaitan dengan individu dalam bentuk memberikan pelayanan dan bantuan, penyembuhan atau rehabilitasi, tetapi pembangunan sosial juga berfokus kepada komunitas atau masyarakat serta proses dan struktur sosial secara keseluruhan. Pembangunan sosial hendaknya dilakukan secara dinamis, maknanya adalah dapat mendorong dan meningkatkan proses pertumbuhan serta perubahan. Pembangunan sosial juga dapat disebut sebagai mata rantai, yaitu usaha yang dilakukan dalam pembangunan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya termasuk usaha-usaha untuk pembangunan dalam bidang ekonomi,

sosial, maupun budaya untuk dapat mengintegrasikan atau menyatukan dari proses sosial, ekonomi, maupun budaya tersebut. selanjutnya, Huraerah (2008:20) membagi kategori makna pembangunan sosial menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sosial sebagai upaya untuk pengadaan pelayanan masyarakat
- b. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk dapat mencapai tujuan sosial yang lebih kompleks dan bervariasi.
- c. Pembangunan sosial sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas manusia untuk menjadi lebih membuat karya.

Menurut Su'adah mengatakan bahwa dalam pembangunan sosial sangat identik dengan *people centered development* atau pembangunan manusia yang berfokus kepada pembangunan manusia (SDM) di berbagai tingkat baik individu, masyarakat, maupun negara.

- a. Individu. Pembangunan sosial dari segi individu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas individu melalui peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, sehingga bserguna bagi pribadinya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghasilannya.
- b. Masyarakat. Pemberdayaan SDM pada masyarakat bertujuan untuk perubahan aspek dalam kehidupan dapat berfungsi secara maksimal, nilai-nilai atau norma yang dijalankan tanpa hambatan serta diiringi dengan membaiknya kondisi sosial ekomi masyarakat.
- c. Negara. Pemberdayaan SDM negara mengarah kepada terciptanya tatanan atau bentuk kebijakan negara terutama yang berkaitan dengan kepentingan

rakyat, kebutuhan dan kesejahteraannya yang mendukung kelangsungan suatu negara sehingga akan tercipta negara yang lebih sejahtera.

Selanjutnya menurut Huraerah (2008:28) tujuan pembangunan nasional menurut *Economic and Social Commission for Asia and Pasific* (ESCP) yaitu pembangunan yang bertujuan untuk membangun atau mengembangkan taraf hidup masyarakat “*development off the well being of the people*”. Sehingga dapat disimpulkan baha pembangunan sosial menurut ESCP melihat bahwa pembangunan berfokus kepada rakyat atau komunitas sehingga pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan berfokus terhadap manusia itu sendiri.

Menurut Suharto (2008:5) model pembangunan sosial menurut Hardiman dan Midgley menekankan bahwa pengentasan kemiskinan terutama bagi masyarakat gelandangan dan pengemis, yakni denngan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui:

- a. Menumbuhkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas masyarakat yang lemah secara ekonomi untuk dapat diberdayakan sebagai aset tenaga kerja.
- b. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Conyers dalam Suharto (2008:6-7) bahwa pembangunan nasional memiliki 3 karakteristik sebagai berikut:

- a. Pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial yang mencakup program di dalamnya misalnya di bidang, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.
- b. Pembangunan sosial merupakan sebagai wujud upaya meningkatkan nilai-nilai kemandirian keluarga dan masyarakat (*self reliance*), harga diri (*self esteem*), kebebasan dari dominasi (*liberation*), dan hidup sederhana (*plain living*).
- c. Pembangunan sosial sebagai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial lebih berfokus kepada pembangunan kepada manusia secara terpusat (*people centered development*) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan berasal dari kata berdaya atau daya yang artinya adalah kemampuan atau kekuatan. Menurut Ife dalam Kartiwa (2011:180) bahwa pemberdayaan merupakan sebagai upaya dalam memberikan otonomi, wewenang, serta kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu komunitas serta mendorong masyarakatnya untuk dapat bersikap kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya

dengan sebaik mungkin. Sedangkan menurut Friedman dalam Kartiwa (2011 : 180) bahwa konsep pemberdayaan yaitu :

“pemberdayaan merupakan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung”.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berdaya (dalam hal ini memiliki kemampuan baik *soft skills* maupun *hard skills*) untuk dapat mempengaruhi dan memberikan kekuatan atau kemampuan kepada orang lain baik individu maupun kelompok agar dapat bersaing, serta dapat merangsang masyarakat untuk dapat lebih menyuarakan aspirasinya melalui proses demokrasi yang sangat sederhana bertujuan untuk mengambil kesepakatan yang berasaskan musyawarah mufakat.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang maknanya adalah konsep pembangunan masyarakat yang bersifat terpusat, menghendaki adanya partisipasi, *powering* atau memberikan kekuatan, serta *sustainable* atau berkelanjutan (chambers:1995). Menurut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) dalam Kartiwa (2011:181) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana atau iklim yang baik adalah dengan memperkenalkan setiap elemen potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya untuk dapat dikembangkan secara maksimal. Artinya, dengan modal yang dimiliki oleh

masyarakat dapat membangun daya, yaitu dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan secara maksimal.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

Selain menciptakan suasana atau iklim yang baik juga diperlukan suatu cara untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masukan-masukan (*input*) yang diajarkan kepada masyarakat akan memberikan peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya yaitu dengan melalui penguatan individu masyarakat serta memperkenalkan setiap pranata-pranata yang dimiliki oleh komunitas tersebut. selain itu, memperkenalkan budaya-budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, serta tanggung jawab juga merupakan suatu upaya agar masyarakat lebih berdaya.

- c. Memberdayakan berarti melindungi

Pemberdayaan juga meliputi upaya untuk melindungi masyarakat dari pihak yang lemah terhadap pihak yang lebih dominan. Melindungi bukan berarti mengasingkan atau mengisolasi masyarakatnya untuk menutup diri dari interaksi sosial masyarakat namun melindungi yaitu upaya bagaimana pemberdaya dapat mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat melindungi potensi yang dimiliki dari pihak-pihak tertentu untuk dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Selain itu, pemberdayaan juga bukan merupakan sebuah upaya masyarakat menjadi

lebih bergantung terhadap berbagai program pembeian (*charity*) tetapi pemberdayaan sebagai upaya pendampingan agar masyarakat dapat lebih mandiri, produktif, dan lebih kreatif untuk dapat mengelola setiap potensi yang dimiliki di wilayahnya.

Menurut Suharto (2005:58) dalam Fiulaizi (2017:25) bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan diantaranya:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana seseorang menjadi lebih kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi pehatiannya.
- c. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Kartasasmita(2009) pemberdayaan juga memiliki konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Secara umum, ekonomi memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat mengembangkan perekonomian masyarakat diperlukan sebuah konsep yang matang sehingga dapat menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam rangka menekan angka kemiskinan. Di dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang terhadap Warga Binaan Sosial (WBS)

yang terdapat di Kampung Topeng Malang, tidak hanya memberikan pelatihan bagi para WBS saja, tetapi juga memberikan dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai modal usaha melalui bantuan dana untuk dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi. Sehingga prinsip-prinsip menurut Sumodiningrat dalam Akbar (2017:24) prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*).
- b. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
- c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitbale*).
- d. Hasil yang telah didapatkan dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*).
- e. Pengelolaan dana dan hasil yang telah dicapai dapat dengan mudah dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas (*replicable*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan terstruktur serta mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Tujuan tersebut diantaranya untuk memperkuat kekuasaan dalam rangka untuk mengentaskan individu-individu yang berada di garis kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menghendaki adanya proses perubahan sosial dimana masyarakat yang tidak berdaya dapat menjadi masyarakat yang berdaya sehingga baik secara fisik

maupun non fisik mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan yang lainnya. sehingga pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk dapat membina, memberikan contoh, serta mengarahkan untuk dapat bersikap menjadi masyarakat yang mandiri dan kreatif untuk dapat mengelola sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

2. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan merupakan langkah-langkah yang harus di lalui untuk dapat mencapai suatu tujuan. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi menjadikan masyarakat lebih bersikap mandiri dalam berbagai kegiatannya, seperti yang dikatakan oleh Sumodiningrat dalam Sulistyani (2007:78) bahwa pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya namun bersifat terus menerus atau *sustainable* sampai masyarakat dirasa mampu untuk hidup mandiri dan tetap dipantau agar tetap stabil. Selanjutnya, Sulistyani (2007:83) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembelajaran sehingga mampu mencapai status mandiri yang di lakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan yang harus di lalui adalah:

- a. Tahap pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli sehingga setiap pribadi akan lebih bersikap untuk meingkatkan kapasitas diri.
- b. Tahapan transformasi yaitu tahapan dimana masyarakat diberikan wawasan, pengetahuan, dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga akan membentuk kemampuan berinovasi dan inisiatif dalam mencapai kemandirian.

Sedangkan menurut Suharto (2009:67) menekankan pemberdayaan dari segi proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. Penayadaran

Penayadaran dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi terhadap komunitas atau POKJA (kelompok pekerja) agar mereka dapat mengerti pentingnya pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta dapat dilakukan secara mandiri (*self help*).

- b. Pengkapasitasan

Di dalam pengkapasitasan, masyarakat akan diajarkan bagaimana kecakapan dalam mengelola organisasi atau komunitas, atau tahapan ini disebut dengan *capacity building* yang terdiri dari pengakapsitan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

- c. Pendayaan

Pada tahapan ini target atau sasaran diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat. Tahap tersebut akan menyadarkan masyarakat pentingnya program kerja dalam pemberdayaan masyarakat, serta dibekali dengan pemberian wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta peningkatan kualitas lembaga atau

komunitas sehingga masyarakat lebih memiliki peluang yang besar agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan dapat bersaing dengan komunitas lainnya.

3. Indikator-indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2009:63) pemberdayaan mencakup 3 dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Selain itu, menurut Parson et.al juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui fokus dan tujuan secara operasional, maka diperlukan indikator-indikator. Indikator inilah yang akan menjadi acuan apakah program pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang diharapkan serta aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Berikut ini merupakan indikator-indikator pemberdayaan:

Tabel 2.1 Indikator-indikator Pemberdayaan

Jenis Hubungan dan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya. • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Assertiveness dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum, dan pengucilan politik. • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik.
Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan huruf • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan
Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat

<p>hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p>	<p>dihasilkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. • Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar 	<p>termasuk keputusan keluarga berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik.
<p>Kekuasaan dengan: meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern. • Mampu memberikan gaji terhadap orang lain. • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. • Partisipasi dalam gerakan-gerakan subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

Sumber : Suharto (2009:65)

4. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat masing-masing aktor yang melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah, masyarakat, serta swasta. Menurut Sulistyani (2004) aktor-aktor yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Peran aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran
Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi dan monitoring dan evaluasi mediasi.	Berbagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa.
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi.	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan pemeliharaan.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring.	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsional, kontrol, dan menjadi objek.

Sumber : Sulistyani (2004:97)

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam membuat regulasi yang tepat. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa menjalankan perannya tanpa dibantu oleh pihak swasta. Sebagai kanan tangan dari pemerintah, pihak swasta merupakan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan strategi bersama masyarakat agar program yang akan dijalankan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, pihak swasta dalam

menjalankan regulasi juga memiliki fungsi memonitoring terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Bentuk monitoring yang dilakukan adalah dengan melakukan konsultasi serta rekomendasi terhadap program yang dijalankan di lapangan sesuai dengan realita. Monitoring yang dilakukan agar masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam pemberdayaan, tetapi juga dapat berperan sebagai subjek sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap keberlangsungan program yang dijalankan.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus mempunyai program atau kegiatan yang tujuannya jelas dan harus dapat dicapai. Sehingga, dalam pelaksanaan pemberdayaan memerlukan strategi atau “tak tik” untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa strategi diartikan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Strategi sebagai suatu rencana. Rencana yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rumusan-rumusan strategi yang dibuat hendaknya dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, peluang, dan ancaman oleh pesaingnya atau dengan kata lain dapat menggunakan teknik analisis SWOT (*SWOT analysis*).
- b. Strategi sebagai suatu kegiatan. Strategi sebagai suatu kegiatan yaitu suatu upaya yang dilakukan baik oleh individu, swasta, maupun pemerintah untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara kontinyu bahkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

- c. Strategi sebagai pola pikir, yaitu suatu strategi yang berlandaskan pada tindakan serta wawasan yang luas tentang keadaan internal dan eksternal.

Selain itu, kemampuan pola pikir juga diajarkan mengenai kemampuan baik individu maupun kelompok untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang dianggap tepat oleh suatu forum yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan atau ancaman yang datang. Selanjutnya menurut Ismawan dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:170) menetapkan 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

- a. Pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok.
- c. Pemupukan modal masyarakat.
- d. Pengembangan usaha produktif.
- e. Penyediaan informasi tepat guna.

Sementara itu, pendapat lain diutarakan oleh Suharto (2005:67) bahwa strategi dalam pemberdayaan masyarakat mengandung 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, pengokongan, dan pemeliharaan.

- a. Pemungkinan yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menciptakan suasana atau iklim yang baik sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensinya. Selain itu,

- pemberdayaan juga harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan yang dihadapinya baik masalah budaya (*cultural*) dan struktural.
- b. Penguatan yaitu strategi yang dilakukan dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat misal melalui pendidikan sehingga masyarakat mampu memecahkan permasalahannya serta memperoleh kepercayaan diri yang dapat menunjang kemandirian mereka.
 - c. Perlindungan yaitu upaya yang dilakukan dalam melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar masyarakat lebih menghadapi tantangan serta hambatan yang dihadapinya misalnya menghindari persaingan yang tidak seimbang serta mencegah untuk mengeksploitasi kelompok masyarakat yang lemah.
 - d. Penyokong yaitu memberikan bimbingan serta dukungan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami terkait dengan peran dan fungsinya agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya.
 - e. Pemeliharaan yaitu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga kondisi tetap stabil atau nyaman agar tetap terjadi distribusi kekuasaan yang baik antar kelompok dalam masyarakat.

Dari paparan yang sudah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan menerapkan program-program yang tepat sasaran. Program-program tersebut diantaranya adalah melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) misalnya dengan memberrikan konseling atau bimbingan secara intensif. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menggunakan pengembangan kelembagaan misalnya yaitu

dengan lebih memahami tentang fungsi dan peran yang sedang dilaksanakan sehingga dengan melakukan strategi tersebut diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan baik untuk dapat berinteraksi secara luas.

6. Permasalahan dalam pemberdayaan

Menurut Prasojo (2004:11) masalah yang kerap kali dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah ketidakjelasan konsep pemberdayaan masyarakat, batasan atau indikator mengenai kesuksesan pemberdayaan, peran masing-masing antar pemerintah, swasta, dengan masyarakat yang masih tumpang tindih, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pemberdayaan:

- a. *Diskontinuitas dan diskoordinasi.* Dalam melaksanakan program pemberdayaan koordinasi tidak dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya miss komunikasi antara pemerintah, swasta, dengan masyarakat sehingga yang terjadi adalah pemerintah seringkali bersebrangan dengan pendampingan yang dilakukan oleh swasta / LSM.
- b. *Disinformasi* program. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan swasta / LSM kadang kerap kali tidak dipahami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena bahasa yang digunakan tidak dapat dipahami oleh masyarakat.
- c. *Disorientasi.* Di dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan pendekatan – pendekatan yang tentunya memerlukan sebuah proses yang panjang. Berbagai masalah yang muncul disertai dengan tidak atau belum nampaknya hasil yang diinginkan menjadikan masyarakat sedikit berputus asa. Oleh

sebab itu, pentingnya fasilitator atau LSM baik dari pendamping LSM maupun pemerintah untuk dapat merubah kebijakan menjadi lebih nyata dengan membuat langkah-langkah strategis.

- d. *Generalisasi*. Di Indonesia mempunyai kemajemukan budaya yang tak ternilai harganya serta menimbulkan perbedaan di dalamnya yaitu perbedaan sosial, politik, serta budaya sehingga dengan adanya keberagaman yang ada tidak membuat pemerintah untuk menyamaratakan pembangunan atau dengan kata lain pembangunan yang dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh masyarakat.
- e. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional. Rentang birokrasi sangat terkait dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang dianggap oleh masyarakat kaku dalam pelaksanaan pemberdayaan. Selain itu, alur komunikasi yang terlalu panjang akan mengakibatkan komunikasi yang dilakukan menjadi tidak lancar karena terlalu banyaknya prosedur yang harus di laksanakan. Yang terakhir adalah peraturan yang didasarkan pada surat keputusan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan sistem penanggaran juga akan turut mempengaruhi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dengan mengidentifikasi serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan teknik-teknik dan indikator yang tepat perlu dilakukan secara komprehensif atau mendalam. Dengan mengidentifikasi atau mengelompokkan masalah-masalah

tersebut menjadi lebih sempit, sehingga akan dengan mudah menemukan alternatif-alternatif dalam menemukan solusi yang dianggap paling baik dalam masalah yang dihadapi. Selain itu, dengan pemecahan masalah secara komprehensif dan dengan menggunakan indikator yang tepat akan dengan mudah mengarahkan tujuan utama dalam pemeberdayaan. Tujuan tersebut diantaranya dapat berupa tujuan umum dimana dirumuskan secara luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur. Tujuan khusus meliputi tujuan yang dapat diukur dan berorientasi kepada hasil (*output*) bukan pada proses (*input*). Pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan maksimal apabila terdapat koordinasi yang baik antara masyarakat sebagai pelaksana program, pemerintah sebagai perumus kebijakan sekaligus evaluator, serta swasta yang turut dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu program tersebut.

D. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian dan Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana seseorang merasa aman, nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhannya baik sandang, papan, maupun pangan. Menurut UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga, di dalam pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa untuk

dapat mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Menurut Suharto(2009:2) bahwa konsep kesejahteraan sosial merujuk pada tiga konsep yaitu :

- a. Kondisi kehidupan yang sejahtera meliputi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
- b. Kondisi institusi. Institusi merupakan arena atau kegiatan yang melibatkan sebuah lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan yang direncanakan serta diorganisir dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang sejahtera.

Berdasarkan Pasal 3 UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan upaya yang di lakukan baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani serta berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dalam tatanan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi tiga hal yaitu peningkatan standar hidup yaitu dengan melalui pelayanan jaminan sosial terutama bagi kelompok yang rawan dengan masalah sosial, peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat meningkatkan kualitas diri dan martabat kemanusiaan, penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan. Kesejahteraan sosial mencakup aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat pelayanan yang dilakukan adalah dalam bentuk perlindungan sosial (*social protection*) baik dalam bentuk formal maupun informal. Salah satu perlindungan sosial dalam bentuk formal yaitu dalam bentuk bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*) bagi orang cacat atau miskin, tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*), dll. Di sisi lain, perlindungan sosial dalam bentuk informal antara lain usaha ekonomi produktif,

kredit mikro dan berbagai bentuk lainnya yang di laksanakan oleh masyarakat, organisasi lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2. Pengertian dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kemiskinan, ketunaan sosial, keterbelakangan, serta bencana alam maupun bencana sosial. Kemudian, Kementerian Sosial menggolongkan jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sebagai berikut:

- a. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun dimana ia menghabiskan sebagian dari kehidupannya di tempat umum maupun dijalanan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya.
- b. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dimana ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dasarnya (sandang, papan, pangan) karena faktor-faktor tertentu misalnya terlantar secara psikis maupun sosial.
- c. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,

serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap mengembara di tempat umum.

- d. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- e. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas dari pemukiman penduduk, pertokoan dengan maksud untuk didaur ulang serta dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis.
- f. Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya sehingga rentan mengalami masalah sosial seperti gay, waria, dan lesbian.
- g. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- h. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan faktor sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena tidak mampunya menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- i. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Dapat disimpulkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmanai maupun rohani. Hambatan yang dihadapi yaitu kemiskinan, ketunaan sosial, keterbelakangan, bencana alam, maupun bencana sosial. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus peneliti adalah kemiskinan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di perkotaan. Salah satu faktor alasan seseorang atau kelompok untuk turun kejalan dalam rangka untuk meminta belas kasih dari orang lain adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Selain itu, kelompok gelandangan dan pengemis sudah merasa di dalam zona yang nyaman, dimana untuk dapat mencari rezeki cukup dengan meminta belas kasihan dari orang lain. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program dalam rangka perbaikan moral maupun pendidikan. Salah satu perbaikan moral yang dilakukan adalah dengan merubah mindset kelompok tersebut dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Keluarga juga merupakan entitas sosial yang menanamkan, mengajarkan, serta mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Kelompok keluarga yang terjaring dalam operasi gelandangan dan pengemis akan diberikan pendidikan

informal. Pendidikan informal yang dilakukan tergabung didalam perserikatan kelompok pekerja dimana kelompok tersebut sudah memiliki keahlian, sumberdaya, serta jaringan yang kuat. Kelompok tersebut yang bertugas memberikan pendampingan serta juga sebagai penggerak utama dalam penentu serta pengendali program yang dilaksanakan oleh pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-naratif dimana penulis akan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang baku sesuai dengan tata cara penulisan karya tulis ilmiah, serta bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Menurut Moleong (2006:14) bahwa penelitian kualitatif berdasarkan teori yang ada. Selain itu, penelitian kualitatif berdasarkan kepada penelitian lapangan (*field research*) dimana digunakan sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif sehingga peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan atau keadaan yang sebenarnya (alamiah) serta mencocokkan kembali dengan teori yang sudah ada. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang ilmiah yang dapat digunakan untuk menafsirkan terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan serta dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada misalnya dengan teknik wawancara, pengamatan langsung atau observasi, dan ketersediaan dokumen yang ada.

Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif kualitatif mengutamakan peneliti dalam melihat kondisi dimana objek yang dimana merupakan objek yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan sebagai instrumen kunci yang utama. Dalam penelitian kualitatif, sebuah “proses” lebih diutamakan dibandingkan dengan sebuah “hasil” yang diperoleh karena peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan sebuah data, sehingga keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data dapat dipertanggungjawabkan.

B. Fokus Penelitian

Spradley yang dikutip dalam Sugiyono (2008:208) menyatakan bahwa “*a focused refers to a single cultural domain or a few related domains*” yang artinya fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan pada tingkat kebaruan sebuah informasi dari situasi sosial untuk lebih memahami secara luas serta mengkomparasikan antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Penetapan fokus di lapangan bertujuan untuk membatasi agar peneliti dapat fokus terhadap apa yang sedang diteliti sehingga data yang akan diambil nantinya tidak menimbulkan permasalahan dalam proses penelitian. Adapun yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program desaku menanti dusun Baran Kecamatan KedungKandang, yaitu sebagai berikut:
 - a. Proses Pemberdayaan Masyarakat Kampung Topeng Malang

- b. Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Masyarakat PMKS Melalui Program Desaku Menanti
 - 1) Pengembangan sumber daya manusia
 - 2) Pengembangan kelembagaan kelompok
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi kreatif
 - c. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program desaku menanti dusun Baran Kecamatan KedungKandang yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah
 - 2) Swasta
 - 3) Masyarakat
 - 4) Fasilitator
2. Hasil pemberdayaan melalui program Desaku Menanti meliputi:
- a. Aspek ekonomi
 - b. Aspek sosial

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitiannya dalam rangka untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian harus berdasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses sebuah informasi, dimana informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid. Lokasi penelitian yang akan diambil oleh

peneliti adalah Kota Malang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kota Malang merupakan salah satu daerah yang sedang melaksanakan program dari Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan terutama golongan mantan gelandangan dan pengemis.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap atau mengamati fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun Situs penelitian ini adalah Kampung Topeng Malang yang terletak di desa Baran, kelurahan Tlogowaru, kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dimana kampung tersebut merupakan pusat aktifitas dalam melaksanakan program Desaku Menanti.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah dalam berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan serta data tambahan yang meliputi dokumen, foto, dan sebagainya. Data-data tersebut akan dikumpulkan dan diolah secara normal namun tetap dalam batasan konteks permasalahan. Data-data tersebut yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung yang dianggap benar-benar mengetahui tentang permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Sehingga menurut Silalahi (2009:289) sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data atau sumber utama yang akan digunakan oleh peneliti secara langsung. Menurut Sarwono (2006:16) data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan tertulis baik menggunakan kuesioner maupun secara lisan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman peneliti untuk dapat lebih menggali informasi dari informan. Dalam menentukan informan yang tepat, menurut Afrizal (2016:76) diperlukan teknik yang tepat agar informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan fokus masalah penelitian. Salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik gelinding bola salju (*snowballing*). Teknik ini merupakan teknik yang diperoleh di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bukan berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Ketua LKS Mutiara Insani.
- b. Masyarakat Kampung Topeng Malang.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial
- d. Pekerja Sosial
- e. Masyarakat / tenaga sukarela

2. Data Sekunder

Menurut Sarwono (2006:210) data sekunder di dapatkan melalui proses dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperlukan oleh peneliti dalam menunjang penelitiannya. Sumber-sumber tersebut merupakan sebuah data yang telah

dikumpulkan, disajikan, atau disusun oleh pihak/ instansi terkait serta merupakan dokumen historis bagi kebutuhan peneliti. Jenis data Sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa dokumen, laporan, artikel, jurnal ilmiah, buku, serta lampiran-lampiran yang relevan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- c. Peraturan Kementerian Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Profil LKS Insan Sejahtera.
- e. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Desaku Menanti.
- f. Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desaku Menanti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai pengamat. Sehingga, dalam mendapatkan data, peneliti tidak meliabtkan aspek psikologis dalam teknik pengambilan data Sugiyono (2016:64). Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Topeng Malang Desaku Menanti yang beralamat di Desa Baran

Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang untuk memperoleh data yang sebenarnya sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara tau bertanya secara langsung dengan sumber data utama yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara akurat yang berkaitan dengan objek atau masalah yang dibahas. Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti bebas mengeksplorasi atau mengembangkan terkait dengan fokus yang akan dibahas. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan mulai dari yang bersifat umum maupun yang lebih rinci dan mendalam (*indepth interview*). Dalam menentukan informan yang tepat diperlukan teknik yang tepat agar informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan fokus masalah penelitian. Salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik gelinding bola salju (*snowballing*). Teknik ini merupakan teknik yang diperoleh di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bukan berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Afrizal:2016 hal 76). Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Malang
- b. Ketua LKS Insan Sejahtera
- c. Pekerja Sosial
- d. Masyarakat / tenaga sukarela
- e. Masyarakat Kampung Topeng Malan

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:30) mengatakan bahwa salah satu metode penelitian yang menunjang peneliti dalam memperoleh sebuah data adalah dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data kualitatif dengan melihat serta menganalisis yang bersumber dari surat kabar, majalah, koran, transkrip, dan sebagainya. Data yang akan diperoleh melalui Dinas Sosial Kota Malang , Kampung Wisata Topeng Malang Desaku Menanti, serta LKS Mutiara Insani.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti yang digunakan untuk menunjang dalam mengumpulkan sebuah data di lapangan. Dalam penelitian, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Untuk dapat menunjang dan mempermudah peneliti dalam mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, maka peneliti menggunakan panca indera untuk melihat secara langsung kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berkaitan dengan fokus yang ingin diteliti. Peneliti dalam terjun langsung ke lapangan juga dibekali dengan *interview guide* agar topik atau bahasan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dalam memudahkan untuk mencari informasi dan keterangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dari narasumber yang dianggap peneliti berkompentensi di bidangnya.

3. Perangkat penunjang lainnya.

Berupa alat bantu yang digunakan oleh peneliti misalnya notebook, tape recorder, kamera dan sebagainya untuk dapat menangkap apa yang sedang terjadi di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah tahap analisis data. Melalui tahap analisis data, peneliti akan mengungkapkan gagasan dan temuan-temuan yang ada di lapangan berdasarkan teori yang ada. Menurut Creswell (2012:274-275) analisis data merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga dapat dengan mudah dipahami, serta dapat diinformasikan dengan mudah kepada orang lain. sehingga, menurut Creswell (2012:276-284) menjabarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyiapkan bahan wawancara, menyaring materi, serta memilah-memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis tergantung kepada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan melakukan *general sense*. General sense adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peneliti dalam menangkap berbagai fenomena atau informasi yang diperoleh dengan memaknai secara keseluruhan. Pada tahapan ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus tentang fenomena atau gambaran umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data

Tahap ketiga dalam analisis data adalah coding. Coding merupakan proses memilih dan memilah data atau informasi yang didapatkan di lapangan ke dalam sekmen / bagian tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dimulai dengan mengambil data yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensekmentasi / mengkategorikan gambaran sesuai dengan jenisnya, kemudian memberikan label kategori dengan menggunakan istilah-istilah khusus.

4. Proses *coding*

Coding merupakan proses memisahkan gambaran umum atau tema untuk dapat dianalisis menjadi lebih kompleks. Pada tahap ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang setting, orang-orang yang terlibat, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis.

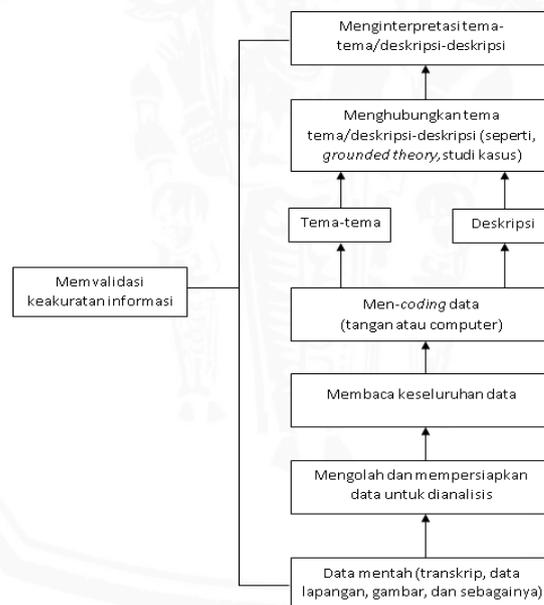
5. Menghubungkan tema atau deskripsi

Pada tahap ini, peneliti harus jeli dalam menangkap fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti dituntut untuk dapat menghubungkan kronologi keterkaitan antar tema.

6. Mengintepretasikan atau memaknai data

Dalam tahap ini, peneliti akan mengkroscek / meneliti kembali terkait dengan temuan yang ada di lapangan sehingga peneliti akan membenarkan atau menyangkal informasi yang didapatkan. Interpretasi dapat juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari data dan analisis, bukan dari hasil ramalan peneliti. Berikut ini adalah gambar model analisis

Cresswel:



Gambar 3.1 Metode Analisis Data Cresswell

Sumber : Cresswel (2015:255)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang sedang terjadi di lapangan serta mendapatkan informasi maupun data yang diperoleh melalui Kampung Topeng Malang, Dinas Sosial Kota Malang, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Insan Sejahtera. Observasi merupakan suatu proses untuk melihat, memahami, serta menangkap fenomena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berada di kampung topeng malang melalui program desaku menanti yang meliputi kegiatan pendampingan dan pengembangan desaku menanti yang dilakukan oleh Kampung Topeng Malang dan LKS Mutiara Insani. Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara melalui narasumber untuk dapat menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu, pekerja sosial / TKSK, wakil / pengurus LKS, serta warga yang melaksanakan program desaku menanti.

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang memiliki penduduk sekitar 820.243 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan yaitu kecamatan Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru. Kota Malang mempunyai beberapa julukan misalnya Kota Pendidikan, Kota Pesiar, Kota Militer, Kota Bunga, serta Paris of Java karena terkenal dengan kondisi alam yang indah, iklimnya yang sejuk, dan kota yang bersih.

b. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu tujuan Destinasi Wisatawan di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang mendukung. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m diatas permukaan laut. Secara astronomis, Kota Malang terletak pada posisi 112.06 – 112.07 Bujur Timur, 7.06 – 8.02 Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan KarangPloso.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Serta dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu:

- 1) Utara : Gunung Arjuno
- 2) Timur : Gunung Semeru
- 3) Selatan : Gunug Kelud

4) Barat : Gunung Kawi dan Panderman



Gambar 4.1 Peta Kota Malang

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang

c. Kondisi Demografi

Tabel 4.1 Presentase Penduduk di Kota Malang Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita sebulan tahun 2012-2016

Tahun	Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah)						Jumlah
	<200.000	200.000 s/d 299.999	300.000 s/d 499.999	500.000 s/d 7499.999	750.000 s/d 999.999	>1.000.000	
2012	0,85	4,51	29,98	25,74	11,70	27,22	100,00
2013	0,00	2,45	31,60	18,30	14,40	33,25	100,00
2014	0,00	1,84	15,88	23,32	18,03	40,93	100,00
2015	0,00	2,40	16,11	22,33	14,19	44,97	100,00
2016	0,00	2,69	19,16	14,66	13,12	50,38	100,00

Sumber : BPS Kota Malang Tahun 2016

d. Keadaan Geologi

Keadaan di wilayah Kota Malang antara lain:

- a) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri.

- b) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.
- c) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- d) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan
- e. Visi Misi Kota Malang
 - 1) Visi : Terwujudnya Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik (BERMARTABAT).
 - 2) Misi Kota Malang Yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan.
 - Tujuan 2: terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan.
 - b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
 - Tujuan 1: terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.
 - Tujuan 2: terwujudnya perluasan kesempatan kerja.
 - Tujuan 3: terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.

- c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: terwujudnya peningkatan kualitas insfrastruktur dan daya dukung kota

Tujuan 2: terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

- d. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasa masyarakat

Tujuan 1: terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan 2: terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorienasi pada kepuasan masyarakat.

2. Gambaran Umum LKS Insan Sejahtera

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk

mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

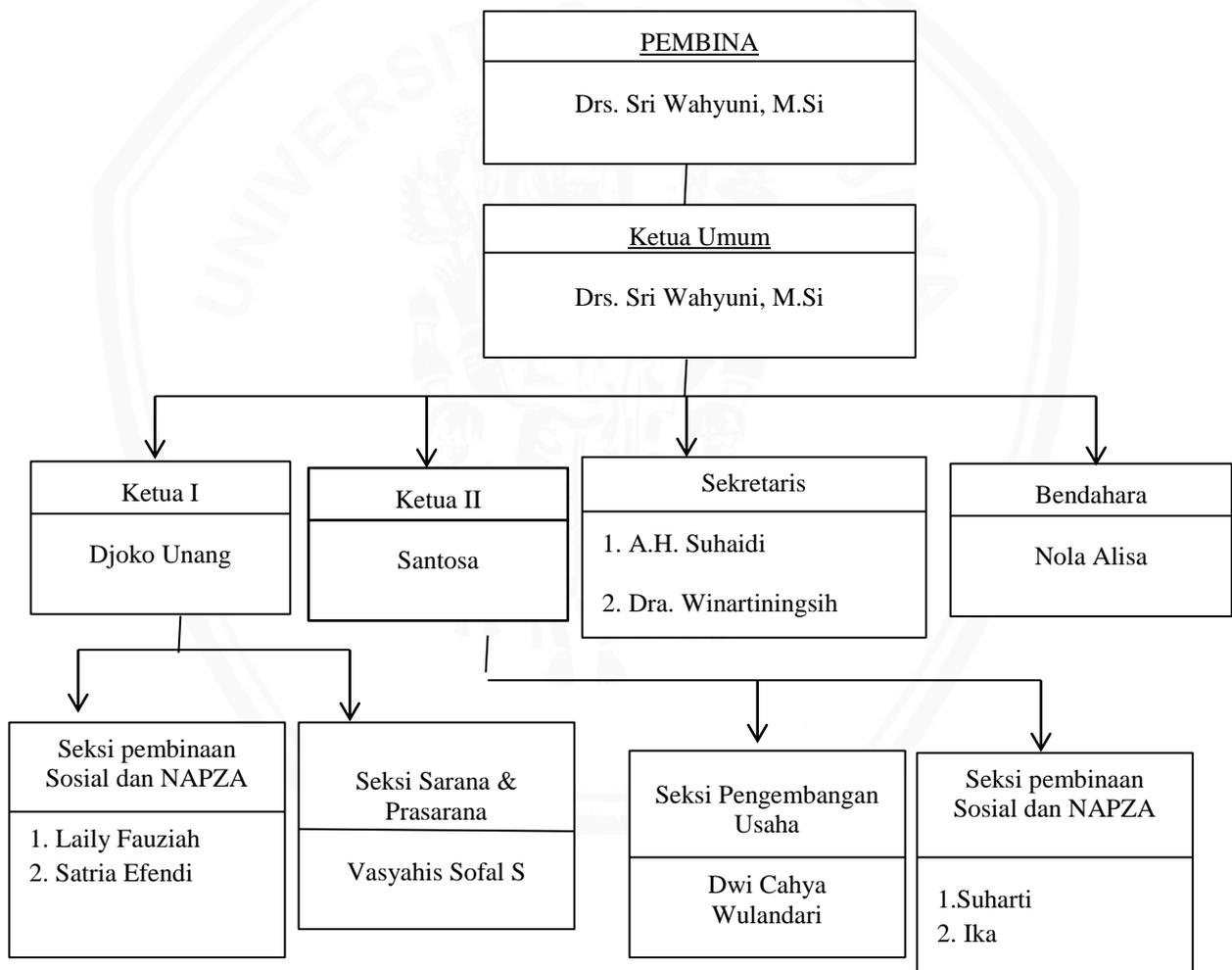
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada peraturan di atas, diperlukan tindakan secara terus menerus dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan organisasi untuk menggalang kekuatan untuk menangani PMKS, baik perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Persoalan yang mendasar tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar antara lain kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi

untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan. Untuk itu diperlukan penanganan PMKS terpadu dengan membangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial “INSAN SEJAHTERA”berharap dapat berperan dalam ikut serta mengentaskan PMKS tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi LKS Insan Sejahtera:

Bagan 4.1 Stuktur Organisasi LKS Insan Sejahtera



Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

3. Gambaran Umum Kampung Topeng Malang

a. Sejarah Singkat Kampung Topeng Malang

Kampung Topeng Malang yang terletak di Dusun Baran, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang merupakan sebuah kampung tematik yang merupakan inovasi dari Dinas Sosial untuk dapat mengentaskan kemiskinan bagi mantan gelandangan, pengemis, serta anak jalanan. Kampung tersebut merupakan kelanjutan dari program Desaku Menanti yaitu sebuah program yang digawangi oleh Kementerian Sosial dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Program yang dilaksanakan merupakan inovasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang dilakukan secara komprehensif dan mengedepankan keterpaduan rehabilitasi sosial bagi mantan gelandangan, pengemis, serta anak jalanan serta dilakukan secara terpadu berbasis desa.

Kampung Topeng Malang yang pada mulanya merupakan sebuah hutan bambu yang kemudian disulap menjadi sebuah pemukiman siap huni yang diperuntukkan bagi mantan gelandangan, pengemis, serta anak jalanan yang sudah diberikan pelatihan / rehabilitasi selama jangka waktu tertentu. Kampung Topeng Malang terinspirasi dari Kampung Topeng yang ada di China serta Kampung warna-warni yang ada di Jodipan yang dijadikan sebagai pengembangan pariwisata sehingga dapat membantu perekonomian masyarakatnya. Oleh sebab itu, Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Tenaga Kerja Sosial Kota Malang (TKSK) untuk membuat sebuah kampung yang tujuannya agar masyarakat tidak kembali turun kejalan melakukan aktivitas mengemis. Mantan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan tidak hanya

diberikan fasilitas berupa pemukiman yang layak huni, di kampung tersebut juga dilengkapi dengan Bengkel Kerja dimana bengkel tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dapat mengembangkan potensi / menerapkan keterampilan yang sudah pernah diajarkan oleh tenaga terampil dibawah binaan Dinas Sosial Kota Malang. Tidak hanya dilengkapi dengan bengkel Kerja, Kampung Topeng Malang juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mendukung yang disesuaikan dengan kontur atau struktur tanah yang terasering dimana dapat dimanfaatkan untuk berbagai wahana misalnya outbound, serta spot *selfie* sesuai dengan kondisi kekinian yang sedang diminati oleh kalangan muda-mudi saat ini.

Kampung Topeng Malang yang diresmikan pada tanggal 14 Februari 2017 memiliki sebuah slogan yaitu “Berwisata sambil Beramal”. Slogan tersebut merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan digalakkan oleh masyarakat kampung topeng malang dengan tujuan wisatawan yang berkunjung ke kampung tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat kampung tersebut. tiket masuk yang dipatok oleh kampung tersebut cukup murah, hanya dengan mengeluarkan Rp 5000 wisatawan akan mendapatkan camilan yang merupakan produk olahan hasil dari karya ibuk-ibu kampung topeng malang serta pengunjung bebas untuk dapat memanfaatkan spot-spot menarik yang ada di kampung tersebut. menurut data dari LKS Insan Sejahtera jumlah pengunjung pada tahun 2017 sejumlah 3564 orang sedangkan hingga bulan Mei tahun 2018 sejumlah 4085 orang.

B. Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program Desaku Menanti

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat PMKS Melalui Program Desaku Menanti

Program Desaku Menanti program rehabilitatif berbasis kekeluargaan diinisiasi oleh Kementrian sosial yang ditujukan bagi kelompok gelandangan, pengemis, serta anak jalanan dengan menekankan pengembalian ke daerah asal atau remigrasi. Sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar, sehingga tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan keberfungsian keluarga gelandangan dan pengemis dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Kriteria penerima bantuan program desaku menanti yaitu (1) keluarga gelandangan dan pengemis, miskin yang memiliki usia <60 tahun, (2) msih produktif, (3) berkeluarga, (4) menjadi gelandangan dan pengemis karena keterpaksaan, (5) tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, (6) tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Berikut ini merupakan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program desaku menanti.

1) Tahap Penyadaran

Pemberdayaan masyarakat melalui program desaku menanti khususnya di Desa Baran Kecamatan KedungKandang Kota Malang memiliki tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan dimana tahap awal yaitu tahap penyadaran. Tahap penyadaran masyarakat diberikan pencerahan serta motivasi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan keunikan sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup serta output yang diharapkan dapat keluar dari zona nyaman. Sehingga, pada tahap ini adalah dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif (kemampuan dalam mengungkap, menggabungkan, serta memecahkan ide atau gagasan), belief, dan healing (penyembuhan). Adapun tahap penyadaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, tenaga pendamping atau pekerja sosial. Tahap penyadaran yang telah dilakukan oleh pihak terkait adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendampingan keterampilan serta motivasi kewirausahaan.

a) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pendampingan keterampilan

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi kelompok yang terberdaya dan mencegah masyarakat untuk turun ke jalan. Bentuk-bentuk yang diberikan melalui pelatihan keterampilan. Pelatihan yang diberikan misalnya memasak, berternak, serta berbagai keterampilan lainnya sesuai dengan minat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pemberian

motivasi dan konseling atau pendampingan tidak hanya diberikan pada saat pelatihan saja, namun juga dilakukan pada pasca pelatihan. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Metha mengatakan bahwa :

“sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk merangsang masyarakat agar dapat hidup menjadi lebih baik mengingat latar belakang masyarakat yang dulunya meminta-minta, mencari sampah rongsokan. Selain itu, dari hasil pelatihan diharapkan masyarakat dapat menopang perekonomian keluarga serta yang paling pokok adalah agar masyarakat kampung topeng tidak dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh salah satu pekerja sosial yang mengatakan bahwa:

“untuk dapat merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik membutuhkan waktu, pikir, serta tenaga yang ekstra dalam mendampingi warga karena setiap warga mempunyai karakter yang berbeda-beda ada yang sekali diberikan pelatihan langsung bisa mempraktekan, ada yang harus berkali-kali baru bisa sehingga, istilahnya kita harus bisa sabar dalam mendampingi sampai bisa. ”

Motivasi terkait dengan pelatihan tidak hanya diberikan oleh pihak terkait tetapi juga diberikan oleh mitra kerja, instansi pendidikan turut mengapreasi proses yang dilalui oleh masyarakat mulai dari tahap pengenalan, pendampingan pelaksanaan usaha, sampai mendirikan sebuah usaha. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak wulan selaku penanggung jawab produksi olahan camilan di Rumah Kerja Desaku Menanti (RKDM) yaitu:

“kendala yang dihadapi setelah melakukan pelatihan adalah bagaimana upaya agar masyarakat tidak lupa terkait materi atau praktek yang sudah dilakukan. Selain itu, kendala modal dan pemasaran sehingga inovasi yang dilakukan adalah dengan menjualkan hasil produksi kepada pengunjung, serta pengunjung membayar 5000 ribu rupiah dan akan mendapatkan 1 makanan ringan”.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap awal saja atau tahap pengenalan dan praktek saja, sosialisasi juga dilakukan sampai pada tahap pengemasan dan pemasaran ke konsumen.

b) Motivasi kewirausahaan

Motivasi kewirausahaan yang dilakukan oleh Tenaga ahli dimana tenaga ahli yang didatangkan langsung oleh LKS telah menjadi mitra kerja dan dipercaya untuk memberikan pelatihan serta motivasi kepada peserta dalam berwirausaha. Motivasi yang dilakukan adalah dengan memberikan *tips and trick* dalam memulai sebuah usaha. Dalam memberikan tips and trick tenaga ahli akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau kejadian utama yang dihadapi misalnya hambatan, tantangan, serta konsistensi dalam memulai sebuah usaha. Kemudian tenaga ahli dan peserta akan melakukan komunikasi dua arah untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Motivasi yang dilakukan pada tahap pendampingan, karena pada tahap ini masyarakat yang tidak mempunyai pengalaman akan membutuhkan motivasi sehingga masyarakat merasa tidak putus asa dalam membangun sebuah usaha. Sehingga proses motivasi ini biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setiap 3 bulan sekali yang dilaksanakan dalam rangka memonitoring usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Adanya sosialisasi dan motivasi yang diberikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut diharapkan mampu

menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri masyarakat untuk lebih berani dalam memulai hal yang baru, berani dalam mengambil semua resiko di masa mendatang, sehingga usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat menambah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut serta dapat menambah penghasilan keluarga. Pak Gito mengatakan sebagai salah satu warga yang mengikuti pelatihan ternak lele bahwa:

“kalau bisa saya ingin ada pelatihan tambahan atau lanjutan mengingat kendala yang dihadapi dalam ternak lele salah satunya adalah perawatan yang membutuhkan banyak biaya dan cuaca sehingga masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan secara cepat”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mempunyai kesadaran dan kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalankan melalui pelatihan yang diberikan. Motivasi-motivasi yang diberikan sangat diperhatikan dengan baik mengingat adanya usaha serta kemauan warga untuk dapat mengembangkan ternak lele yang dikelola. Sehingga kedepannya yang diharapkan warga lain juga mempunyai motivasi yang sama untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan tahap dimana warga atau masyarakat diberikan bekal keterampilan melalui pelatihan. Pelatihan dibedakan menjadi pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Pada umumnya tahap ini meliputi:

a) Tahap persiapan

Tahap yang paling dasar sebelum dilaksanakannya pelatihan adalah tahap persiapan. Berikut ini merupakan tahap persiapan secara umum:

Bagan 4.2 Tahap-tahap Pelatihan Secara Umum

Persiapan Tim	Sosialisasi	Pelatih / fasilitator
<ul style="list-style-type: none"> • ketua LKS memberikan informasi pelatihan kepada koordinator kampung • koordinator kampung memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian mendata anggota yang akan ikut serta 	<ul style="list-style-type: none"> • materi, jadwal, dan lokasi akan di informasikan melalui koordinator kampung • pelaksanaan sosialisasi • evaluasi pelaksanaan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • identifiikasi tenaga pelatih • pemilihan dan penetapan

Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

I. Persiapan Tim

Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan dalam memberdayakan msyarakat untuk melatih masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Tahapan yang dilakukan dalam mempersiapkan tim yang pertama penyampaian informasi. Informasi yang diiperoleh oleh Dinas Sosial terutama di bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengadakan pelatihan dalam rangka agar masyarakat memiliki keahlian di bidang lain serta sebagai bentuk kontroling atau pengawasan terhadap masyarakat. Kemudian, informasi yang sudah didapatkan akan didistribusikan melalui koordinator kampung. Koordinator kampung mempunyai tugas sebagai jembatan antara warga dengan Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera. Untuk pelatihan yang akan dilaksanakan,

peserta yang akan mengikuti diambil melalui kelompok pekerja yang ada di RKDM. Tidak hanya itu, anggota atau ibu-ibu yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan juga akan turut diikutsertakan.

Tahap kedua yaitu sosialisasi. Setelah koordinator kampung memperoleh data atau daftar nama yang akan mengikuti pelatihan akan disetorkan kepada LKS. Daftar nama yang telah didapat akan direkap dan kemudian akan ditentukan jadwal dan mempersiapkan materi. Tahap ketiga yaitu mempersiapkan materi. Materi yang akan biasanya menyesuaikan dengan permintaan dari masyarakat. Seperti pernyataan mbak wulan selaku pengembangan usaha produksi yaitu:

“biasanya baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin menambah kemampuan atau keterampilan di bidang lain bilang kepada saya kalo ingin ada pelatihan misalnya ternak lele. Usulan dari warga akan disampaikan ke bu meta dan bu meta biasanya akan mencarikan mentor yang sesuai dengan yang di inginkan warga, tapi ya kebanyakan pelatihan diadakan oleh Dinas Sosial”

Selanjutnya pelaksanaan pelatihan warga beserta pendamping menuju lokasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Alat-alat serta bahan sudah disiapkan oleh mitra kerja. Seperti yang dilakukan oleh Mitra Kerja dalam budidaya ternak lele mengatakan bahwa:

“untuk masyarakat kami berikan keterampilan berupa ternak lele mengingat dapat memanfaatkan lahan yang minim untuk dijadikan sebagai lahan usaha. Tahap pertama akan kami berikan modal berupa bak penampungan lele, pakan lele, serta kami ajarkan bagaimana cara beternak hingga sampai panen. Setelah panen, kami juga akan bantu dalam memasarkan kepada masyarakat. Tidak lupa, kami juga akan melakukan kontroling atau pengawasan minimal 6 bulan sekali untuk mengecek perkembangan ternak lele”.

Pelatihan dan penjadwalan disesuaikan juga dengan jumlah peserta, lokasi, serta jenis pelatihan yang dilakukan. Berikut ini merupakan jenis pengelompokan berdasarkan tipe pelatihan.

Tabel 4.2 pengelompokan Jenis Pelatihan

No	Pelatihan	Jenis Pelatihan	Materi
1	Tipe 2	makanan	Kue basah, kue kering, bakso, kerupuk, dll
		kerajinan tangan	Sulam pita, payet, manik-manik
	Tipe 3	Aneka usaha (salon)	Salon, potong rambut, dan perawatan potong rambut
		Aneka Usaha (Ternak lele)	Penyiapan lahan, cara memilih bibit, melihat langsung kolam lele, cara perawatan kolam, pemeliharaan dan pakan, dan cara memanen
		Aneka Usaha (Ternak Cacing)	Pembuatan media cacing, pengembangbiakan cacing, pemeliharaan cacing, proses pemanenan, pemasaran cacing

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2017)

II. Sosialisasi

Tahap sosialisai bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pihak baik pekerja sosial maupun masyarakat sehingga diharapkan semua aktor-aktor dalam pemberdayaan dapat bersinergi dalam bentuk keterlibatan langsung di dalam setiap prosesnya sehingga dapat memahami setiap peran dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan pelatihan dan monitoring. Seperti yang dikatakan oleh Pak Heri selaku Kabid Rensos yang mengatakan bahwa

“tahap selanjutnya yaitu sosialisasi mbak. biasanya kalau mau ada sosialisasi tentang pelatihan akan kami infokan ke LKS langsung melalui bu Meta. Karena sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan skill atau kemampuan dari masyarakat maka kami pun juga akan memilih pakar atau ahli di bidangnya, salah satu syaratnya adalah minimal sudah memiliki ijin usaha serta sudah berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun. Tidak menutup kemungkinan kita juga bekerjasama dengan instansi pendidikan seperti universitas yang tentunya juga memiliki pengetahuan dan teknologi yang lebih canggih.”

Selanjutnya, Ibu Meta selaku Ketua LKS Insan Sejahtera mengatakan bahwa:

“pembekalan pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat harus jelas jumlahnya, materi yang disampaikan, serta siapa saja yang akan terlibat juga harus jelas karena juga menyangkut pendamping. Pendamping disini juga dapat sebagai fasilitator bagi masyarakat, sehingga nantinya apabila mengalami kendala di lapangan pendamping juga dapat sama-sama belajar dan memperoleh ilmu yang baru. Setelah diadakan pelatihan, rencananya akan dilakukan pendampingan kembali sehingga pendamping juga bisa sama-sama berkomunikasi dengan peserta dan tenaga ahli yang hadir”.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai pendamping atau pekerja sosial tidak hanya mendampingi warga ketika sedang diadakan pelatihan berlangsung, tetapi pekerja sosial juga dapat dikatakan sebagai penghubung sehingga ketika pembekalan sedang dilakukan kita dituntut dan dipacu untuk dapat terus memantau proses pelatihan dan mendampingi peserta latihan sebagai antisipasi timbulnya usaha yang mati dan dapat meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan.

III. Identifikasi Pelatih / fasilitator

Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam keberhasilan sebuah pelatihan. Keberadaan pelatih sangat dibutuhkan dan mempunyai peranan yang penting. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah analisis

atau identifikasi dan pemetaan pelatih yang dianggap mempunyai keahlian di bidangnya baik dari sisi teknis maupun operasional di lapangan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Heri bahwa:

“untuk pelatih, tidak hanya kita nilai dari sisi kemampuan dalam mengelola usahanya atau jejak rekam pengalamannya saja, tetapi juga harus sah atau legal setidaknya mempunyai sertifikat pernah mengikuti pelatihan sebelumnya sehingga kami tidak ragu dalam memilih pendamping yang profesional bagi warga”.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam memilih tenaga profesional, tidak boleh sembarang orang atau yang biasa disebut sebagai *the right man in the right place*. Tenaga ahli yang dipilih harus mempunyai rekam jejak yang bagus, baik dari segi pengalaman dalam teknis produksi juga dapat mampu menginspirasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga akan membuat masyarakat mempunyai kepercayaan diri dan menumbuhkan sikap optimis dalam dirinya untuk dapat memulai sesuatu usaha yang baru.

IV. Pemilihan dan penetapan pelatih

Pemilihan dan penetapan pelatih harus tepat. Kriteria yang ditentukan dalam pemilihan dan penetapan pelatih adalah yang mempunyai kredibilitas atau kemampuan di bidangnya minimal 5 tahun, memiliki izin usaha, pernah mengikuti seminar dan pelatihan yang serupa, serta memiliki kecakapan dalam mengelola mulai dari proses produksi, perawatan, memanen, hingga memasarkan hasil produksinya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Heri bahwa:

“pemilihan pelatih harus yang benar-benar mempunyai kemampuan di bidangnya mbak karena disini kan tujuannya untuk mengajarkan masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemilihan pelatih biasanya rekomendasi dari teman-teman SKPD yang tentunya menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga yang paling terpenting adalah pelatih tersebut mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengabdikan dan mengajarkan kepada masyarakat dengan sepenuh hati”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak Alif yang mengatakan bahwa:

“awal mula saya dapat menjadi pelatih atau mentor ternak lele karena saya ditawarkan oleh pak heri dari Dinsos mbak, kemudian beliau cerita kalau sedang membangun masyarakat di kampung topeng malang dimana latar belakangnya adalah mantan gelandangan dan pengemis yang kemudian diberdayakan. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk mendedikasikan dan membagikan ilmu saya kepada masyarakat. Yang paling terpenting adalah adanya semangat dari masyarakat untuk mau berusaha itu saja menurut saya sudah cukup”.

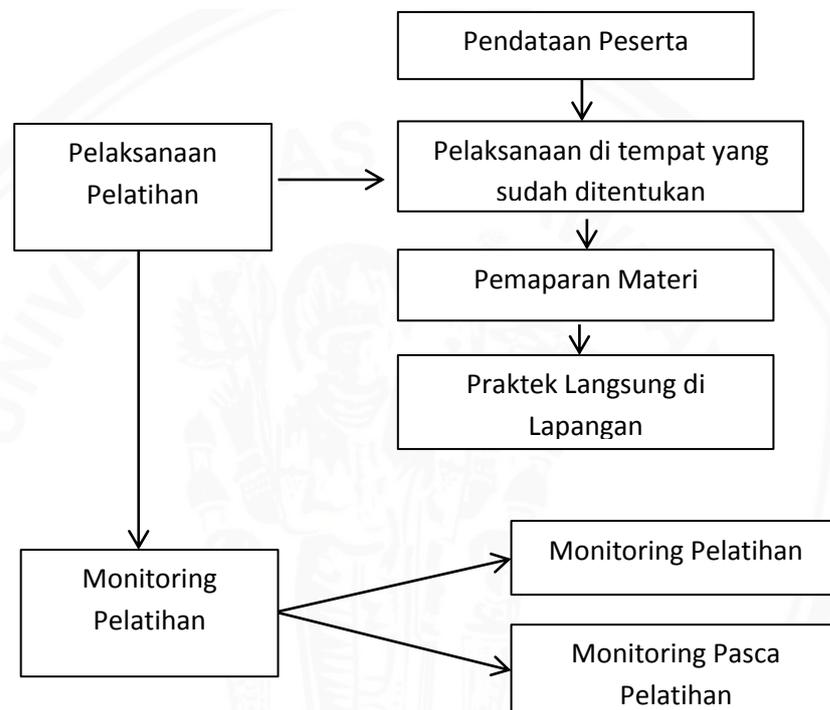
Dari wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pelatih tidak hanya sebagai pengajar ataupun fasilitator dalam proses pelatihan saja, namun pelatih juga dapat sebagai inspirator bagi masyarakat. Karena yang menjadi hal utama dalam pelatihan adalah menilai dari proses bukan menilai dari hasilnya sehingga diperlukan motivasi dan kerjasama yang saling bersinergi agar sama-sama terwujud tujuan yang diharapkan bersama.

b) Pelaksanaan

Tahap kedua dalam proses pemberdayaan yaitu pelaksanaan pelatihan. Tahap inilah merupakan proses transfer ilmu, informasi, serta keahliannya dalam meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat kampung topeng malang. Pada dasarnya, program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial

dan LKS Insan Sejahtera sangat banyak dan beragam jenisnya namun yang menjadi kendala adalah semangat dan motivasi yang ada didalam individu masyarakat yang kurang. Berikut ini merupakan skema atau bagan secara umum proses pelaksanaan pelatihan di Kampung Topeng Malang:

Bagan 4.3 Proses Pelaksanaan Pelatihan Secara Umum



Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

I. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan merupakan tahap yang paling menentukan dalam keberhasilan sebuah program sudah berjalan sesuai dengan target atau sasaran yang dituju. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan tidak hanya diberikan materi tentang produksi secara teknis saja, tetapi juga diberikan motivasi tentang kewirausahaan menuju keluarga yang mandiri. Pelaksanaan pelatihan keterampilan ini dilakukan dalam persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya,

yakni informasi mengenai kegiatan pelatihan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial akan didistribusikan melalui Koordinator Kampung, kemudian Koordinator Kampung akan mendata sejumlah 20 orang yang akan mengikuti kegiatan tersebut Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan akan diberikan imbalan berupa uang transport dan makan siang sebagai wujud apresiasi bagi warga yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan. Penentuan jumlah peserta tidak dibatasi, namun idealnya dalam pelaksanaan pelatihan sekitar 20-30 orang hal ini dikarenakan agar masyarakat dapat fokus dengan materi yang disampaikan oleh fasilitator. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Meta bahwa:

“pelaksanaan pelatihan yang dilakukan tidak dibatasi jumlahnya hanya sekitar 20-30 orang hal ini dikarenakan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang dimiliki atau terbatas.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan diikuti oleh sekitar 20-30 orang, serta pelatihan yang dilaksanakan akan digilir sehingga semua warga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk ibu-ibu akan diberikan pelatihan berupa keterampilan memasak, menjahit sedangkan bapak-bapak akan diberikan keterampilan berupa beternak di lahan yang minim. Para pemuda-pemudi pun tak luput dari perhatian dengan diberikan pelatihan berupa membuat olahan topeng cokelat. Namun, yang menjadi kendala adalah minat dari bapak –bapak yang kurang tertarik dalam pelatihan. Hal ini sesuai pernyataan mas Satria bahwa:

“untuk keaktifan dari warga setempat terutama bapak-bapak masih kurang, hal ini dikarenakan bapak-bapak yang ada di sini sudah mempunyai pekerjaan menjadi buruh walaupun penghasilan mereka yang kurang”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat bapak-bapak dalam berwirausaha sangat minim. Berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan minat bapak-bapak seperti ternak caing dan ternak lele juga tidak berjalan dengan baik dan hanya beberapa usaha ternak lele yang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk menjadi buruh serta hasil yang didapatkan perharinya sudah jelas sebesar Rp60.000. sejak Tahun 2017 sebenarnya LKS dan Dinas Sosial telah memberikan bantuan dana usaha yang berasal dari Kementrian Sosial namun juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan adalah dengan mencari donatur yang langsung memberikan bantuan berupa alat produksi yang mendukung misalnya untuk ternak lele akan disediakan tempat penampungan dan pakan lele sehingga masyarakat hanya merawat hingga proses panen tiba. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heri bahwa:

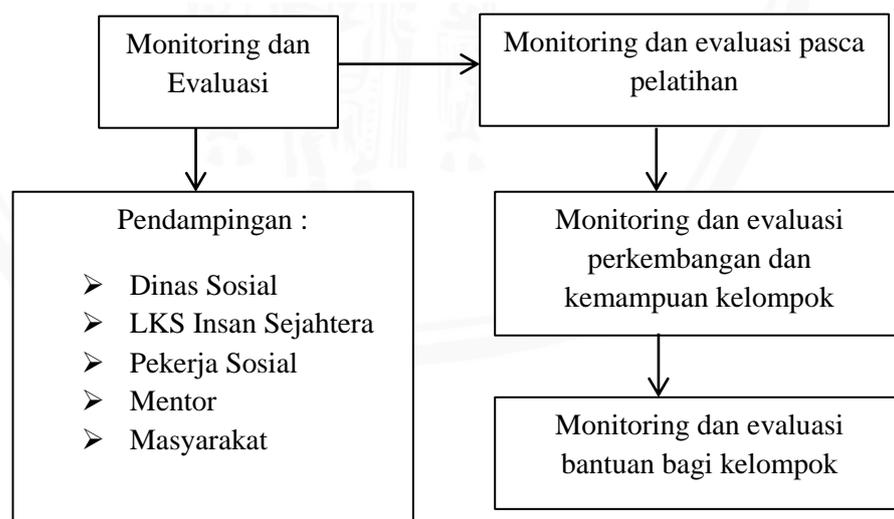
“sebenarnya kami ada konsep mbak dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian yaitu dengan memberikan berbagai pelatihan. Setelah kami berikan pelatihan, akan diberikan modal berupa dana namun juga tidak berjalan. Opsi selanjutnya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa alat produksi langsung namun hal itu tidak berjalan dengan baik. bahkan setelah kami adakan monitoring, yang kami temui di lapangan alat yang sudah kami berikan adal yang dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga solusi yang sedang kami coba adalah dengan memberikan alat produksi dan kami akan pantau dengan ketat perkembangannya yang tidak seperti dahulu memang dalam pemantauan kami agak kurang. Sehingga kami sudah komitmen agar masyarakat tetap semangat yaitu tetap mendampingi warga mulai dari proses produksi hingga membantu mencari mitra untuk pemasaran”.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai modal awal masyarakat dalam membangun sebuah usaha. Dengan melihat pelatihan dan perkembangan yang dilakukan, maka Dinas Sosial akan memberikan modal apabila usaha yang dijalankan menuai hasil atau benar-benar terlihat hasilnya serta melihat semangat dan motivasi masyarakat untuk bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kehidupannya.

II. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan mulai dari Dinas Sosial, LKS Insan sejahtera, mentor atau fasilitator, pekerja sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Tujuan dilaksanakan monitoring adalah untuk memantau kegiatan dan target yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut ini merupakan skema tahapan monitoring dan evaluasi secara umum:

Bagan 4.4 Skema Monitoring dan Evaluasi Pelatihan



Sumber : Data Diolah oleh peneliti (2018)

Pendampingan ditujukan untuk memberikan tambahan kemampuan dalam hal teknis produksi bagi kelompok pelatihan. Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi kelompok dalam mengembangkan usahanya. Pendampingan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pendampingan saat pelatihan serta pasca pelatihan. Pendampingan saat pelatihan umumnya hanya menggambarkan terkait hal-hal teknis secara umum, sedangkan untuk pendampingan pasca pelatihan adalah pelatihan yang dilakukan lebih mendalam dibandingkan dengan saat pelatihan. Yang menjadi perhatian utama yaitu pendampingan langsung pasca pelatihan karena masyarakat akan mempraktekkan apa yang sudah diajarkan dan terlibat langsung di dalam prosesnya. Salah satu bentuk contoh yang dilakukan dalam bentuk pendampingan pasca pelatihan adalah dengan tetap mengawasi masyarakat yang bekerja di RKDM dalam membuat snack yang nantinya akan dijual ke konsumen atau pengunjung. Tujuan dilakukan hal ini adalah tetap menjaga kualitas dari resep yang telah diberikan sebelumnya. Selain itu, salah satu bentuk monitoring yang dilakukan adalah dengan membuat sebuah kompetisi yang diikuti oleh anggota RKDM untuk menguji apakah materi yang telah disampaikan telah diserap dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mbak Wulan selaku pekerja sosial yang bertanggung jawab di RKDM bahwa:

“setiap hari saya harus memantau, mengontrol kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga kualitas camilan layak untuk dijual ke konsumen. Selain itu, salah satu bentuk monitoring adalah dengan melakukan kompetisi yang terdiri 4 kelompok masing-masing kelompok berisi 4-5 orang dan kelompok tersebut akan membuat kembali apa yang sudah diajarkan sebelumnya sehingga dari kompetisi tersebut dapat terlihat warga mana yang belum mampu atau kurang dalam pelatihan, sehingga kedepannya akan dilaksanakan pelatihan kembali”.

Mekanisme dalam monitoring dan evaluasi pasca pelatihan dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas (*bottom-up*), dimana semua pihak akan turut aktif dalam proses monitoring sehingga nantinya mereka akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait secara terpisah maupun bersama-sama. Seperti yang diungkapkan oleh mas satria bahwa:

“hari ini kebetulan terdapat monitoring dan evaluasi dari mitra kerja ternak lele. Dari hasil monitoring di dapatkan hasil bahwa masyarakat harus kompak dalam mengelola usahanya serta masyarakat melakukan konseling secara langsung terkait dengan permasalahannya misalnya suhu yang terlalu panas, harga pakan yang terus naik, serta solusi yang ditawarkan adalah kembali dengan melakukan pelatihan teknis bagaimana membuat pakan yang murah tetapi dengan kualitas yang sama sehingga dapat mengurangi harga produksi.”

Selanjutnya Bu Meta mengatakan bahwa dalam proses monitoring akan terus kami pantau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu sehingga kedepannya untuk promosi dapat mengikuti pameran. Seperti yang diungkapkan oleh bu Meta bahwa:

“untuk saat ini, kami akan terus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta perlahan-lahan kami juga mempersiapkan SDM agar mampu mendampingi wisatawan agar tertarik dengan produksi yang dihasilkan. Untuk sementara, hasil produksi masih kami pasarkan ke teman-teman OPD di Kota Malang saja.”

Proses monitoring tidak hanya dilakukan untuk masyarakat, namun pekerja sosial profesional atau aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan juga melakukan evaluasi dengan tujuan agar tujuan atau target yang telah ditentukan selama satu tahun telah tercapai. Sehingga dengan adanya target atau standar yang telah ditentukan maka aktor akan lebih terarah, terencana, dan lebih

mudah dalam mencapai sasaran tersebut. berikut ini merupakan salah satu target sesuai dengan SAK pekerja sosial:

Tabel 4.3 Standar Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Mengumpulkan data peserta sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
	Melaksanakan indentifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah (home visit)
	Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang calon penerima program pelayanan kesejahteraan
	Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
	Melaksanakan kegiatan temu bahas asil asesmen masalah, kebutuhan, sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial
	Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecah masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial
	Melaksanakan pemeliharaan fisik penerima program pelayanan kesejahteraan sosial
	Memantau aktivitas sehari-hari penerima program pelayanan kesejahteraan sosial
	Melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan alat-alat yang digunakan dalam proses program pelayanan kesejahteraan sosial
	Memantau perkembangan eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

Sumber : Dinas Sosial (2018) yang diolah oleh peneliti

Dari hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial yang dibawah naungan dari Dinas Sosial pada tahap awal akan mendata masyarakat

yang akan menjadi calon warga binaan melalui program Desaku Menanti. Salah satu kriteria yang ditetapkan yaitu anak jalanan (anjali), gelandangan, serta pengemis yang tidak mempunyai pekerjaan dan rumah yang tetap. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, pekerja sosial akan melaksanakan home visit yang bertujuan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan serta mencocokkan kembali apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah menemukan calon warga binaan yang sesuai dengan kriteria, maka warga binaan akan ditampung dan dibina untuk mendapatkan pelatihan. Pelatihan yang diberikan tentunya disesuaikan dengan minat dan bakat dari individu tersebut. Warga binaan yang sudah dianggap layak dan mampu secara ekonomi akan dikembalikan ke daerah asalnya (apabila masih mempunyai sanak saudara), namun apabila sudah tidak mempunyai akan ditampung di wilayah pemukiman yang dibangun melalui dana APBN/D dari pemerintah. Sehingga, bagi masyarakat atau warga binaan yang sudah menempati wilayah tersebut akan terus dipantau aktivitasnya oleh pekerja sosial. Salah satu aktivitas yang dipantau adalah terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan. Pelatihan yang diberikan nantinya diharapkan dapat berkembang sehingga dapat menunjang penghasilan masyarakat. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi keterampilan dari pelatihan yang sudah diberikan.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Keterampilan di Kampung Topeng Malang

No	Nama Warga	Produk	Tahun	Produksi, pemasaran, omzet	Bantuan Modal
1	Ngatani	Jualan rujak	2017	Sudah	Rp. 2000.000
2	Sujai'i	penjahit	2017	Sudah	Rp. 2000.000
3	Kustiari	Toko	2017	Sudah	Rp 2.000.000
4	Mujihadi	Ternak Lele	2017	Sudah	Rp 2.000.000
5	Gito	Ternak lele	2017	Sudah	Rp 2.000.000
6	Adi Sudarsono	Bengkel	2017	Sudah	Rp.2.000.000
7	Yulianingtyas	Makaroni	2017	Sudah	Rp. 2000.000
8	Miftah & Indah	Bakso	2017	Sudah	Rp. 2000.000
10	Heri Rusdianto	Pangsit Mie ayam & tahwa	2017	Sudah	Rp. 2000.000
11	Gimah	Toko	2017	Sudah	Rp. 2000.000
12	Karti	Bakso	2017	Sudah	Rp. 2000.000

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2017)

Monitoring pasca pelatihan dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Dinas Sosial, tenaga pendamping, LKS Insan Sejahtera. Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi pasca pelatihan adalah monitoring dan evaluasi perkembangan kelompok, monitoring dan evaluasi kemampuan kelompok, monitoring dan evaluasi bantuan bagi kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pelatihan keterampilan yang dilakukan dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi di Desaku Menanti, dimana dengan 33 KK hanya sekitar 8 orang yang cukup dikatakan berhasil dalam proses pemberdayaan. Kenyataan di lapangan bahwa masyarakat sebenarnya sudah diajarkan tentang beternak cacing, namun kendala yang dihadapi dalam ternak cacing adalah suhu yang tidak pas atau faktor cuaca, adanya hama, serta kemauan atau motivasi dari masyarakat berkurang. Berbagai respon dari masyarakat salah satunya adalah Ibu Yuli mengatakan bahwa:

“ya macam-macam mbak, biasanya orang-orang yang mengikuti pelatihan nampak semangat diawal saja dan hanya mengambil untung dari uang transportasi yang diberikan oleh Dinas. Selain itu, kalau bapak-bapak lebih memilih untuk menjadi buruh harian karena sudah jelas per hari dapat berapa.”

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam perkembangan dan kemampuan kelompok yaitu dengan mengadakan lomba. Lomba yang diselenggarakan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan menilai kembali kelompok mana yang mampu dan memahami materi yang telah disampaikan dalam pelatihan sebelumnya. Aspek-aspek yang dinilai meliputi kebersihan, kemampuan dalam mengelola bahan, cita rasa yang dihasilkan, serta penyajian hingga sampai ke konsumen. Kemudian, bagi kelompok yang dianggap mampu dan memenuhi kriteria diatas, maka secara perlahan akan diberikan modal usaha sebesar Rp2.000.000 yang digunakan dalam membuat sebuah usaha. Modal yang diberikan berasal dari donatur, LKS, maupun Dinas Sosial.

3) Tahap Pendayaan

Tahap ketiga dalam proses pemberdayaan yakni tahap pendayaan. Pada tahap ini, salah satu bentuk pendayaan yang akan diterima oleh WBS adalah melalui bantuan modal dan perizinan serta pemasaran produk anggota.

a) Bantuan Modal dan perizinan

Pemberdayaan yang dilakukan setelah diadakan pelatihan adalah dengan memberikan bantuan modal dan perizinan. Pada tahun 2016, Kementerian Sosial sebenarnya sudah memberikan bantuan modal usaha kelompok sebesar

Rp10.000.000 yang akan digunakan sebagai sarana dalam membangun usaha kelompok. Namun, ketika dalam pelaksanaannya, dana usaha yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya persiapan dari sumber daya manusia, dana yang digunakan dipergunakan untuk membayar hutang, serta alat yang diberikan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Meta selaku Ketua LKS yang mengatakan bahwa:

“dahulu, para warga WBS pernah mendapatkan bantuan modal usaha, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan tidak ketat yang mengakibatkan LKS kecolongan dengan sikap warga. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan sanksi berupa lisan. Selain itu kami akan menilai kelompok mana yang benar-benar memiliki niat dan usaha untuk meningkatkan ekonomi dan akan memberikan bantuan berupa alat bukan bantuan berupa uang.”

Bantuan modal yang diberikan yaitu salah satunya adalah dengan mengurus perizinan PIRT. Izin PIRT merupakan sebuah izin usaha produksi rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu-ibu WBS yang ada di RKDM. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan agar modal usaha yang diberikan benar-benar digunakan adalah dengan memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Setiap 3 bulan sekali akan dilakukan monitoring. Monitoring yang dilakukan biasanya tentang kendala yang dihadapi dalam menjalankan sebuah usaha, serta terdapat sistem bagi hasil dengan LKS yaitu sebesar 30%. Dana usaha inilah yang akan dipergunakan dikemudian hari apabila terjadi sesuatu atau kendala dalam mengatasi permasalahan yang ada.

b) Pemasaran produk anggota

Pemberdayaan yang dilakukan dalam proses pendayaan adalah dengan memasarkan produk atau hasil dari anggota WBS. Pemasaran yang dilakukan dibantu oleh mitra kerja yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan LKS dimana mitra kerja juga mempunyai andil dalam proses pemberdayaan. Warga WBS yang berhasil memproduksi usahanya akan dibantu dengan memberikan ruang untuk dapat memasarkan hasil usahanya. Untuk saat ini, salah satu bentuk pemasaran yang dilakukan di RKDM adalah dengan menawarkan hasil produksinya melalui internal OPD atau promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, bantuan yang diberikan adalah dengan membangun galeri topeng. Galeri topeng merupakan dana CSR yang diberikan oleh Bank BNI sebagai salah satu wujud kepedulian dalam pemasaran. Galeri topeng memuat berbagai macam usaha yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga masyarakat atau pengunjung yang tertarik dengan kerajinan yang dihasilkan dapat membeli sebagai bentuk buah tangan dari Kampung Topeng Malang. Yang kedua adalah bentuk pemasaran yang dilakukan untuk usaha ternak lele yang dikelola oleh masyarakat adalah dengan menghubungkan antara masyarakat dengan pengepul melalui mitra kerja sebelumnya yang telah mendampingi dalam proses pelatihan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan, kampung topeng malang berinovasi dengan menawarkan berbagai paket wisata yang agar menarik pengunjung seperti paket wisata outbond, paket wisata membuat dan mewarnai topeng, membuat coklat, serta praktik langsung produksi dan mengemas camilan yang ada di RKDM.

b. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat PMKS Melalui Program Desaku Menanti

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah usaha yang dilakukan baik individu maupun kelompok dalam upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada di dalam individu tersebut. dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kampung Topeng Malang yang berperan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mantan kelompok gelandangan dan pengemis adalah Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Insan Sejahtera. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua aktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Kampung Topeng Malang meliputi:

a) Bimbingan fisik, mental, dan sosial

Mantan gelandangan dan pengemis yang sudah dianggap layak untuk dapat menempati rumah yang siap huni akan diberikan bimbingan fisik. Bimbingan fisik yaitu bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkaitan dengan aspek jasmani seorang individu. Bimbingan ini meliputi pengenalan aspek-aspek dasar pola hidup yang sehat, secara teratur dan disiplin, sehingga dengan kondisi jasmani yang sehat maka akan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu bimbingan mental. Bimbingan mental yaitu yang berkaitan dengan aspek rohani yang akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Mantan gelandangan dan

pengemis akan diajarkan tentang kehidupan beragama, mengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, cara berfikir untuk dapat hidup mandiri, serta berkeinginan untuk dapat bersaing dengan individu/kelompok lain. Ketiga, yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial mengarahkan kepada nilai-nilai dasar prinsip hidup seseorang sebagai seorang warga negara. Hal-hal tersebut meliputi tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup masyarakat, tolong menolong, musyawarah dan mufakat, sehingga dampak yang akan dihasilkan adalah masyarakat akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial di lingkungan terkecil (keluarga) maupun di lingkungan yang lebih besar (masyarakat). Seperti wawancara yang dilakukan oleh Ibu Winarti selaku pengurus LKS Mutiara Insani mengatakan bahwa:

“sampai saat ini masih dilakukan upaya bimbingan fisik, mental, maupun sosial sebagai upaya preventif agar masyarakat yang ada di kampung topeng malang tersebut tidak melakukan aktivitas mengemis kembali. Salah satu contohnya adalah ketika mahasiswa UMM yang sedang melakukan KKN melakukan bimbingan fisik yaitu dengan mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan gigi anak-anak. Selain itu, bimbingan mental yang dilakukan adalah dengan membangun sebuah rumah ibadah (mushola) yang dilakukan sebagai aktivitas keagamaan misalnya sholat berjamaah dan kegiatan belajar mengajar Al-qur’an untuk anak-anak. Selain itu, di kampung tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD). Masih dijumpai kendala dalam melaksanakan PAUD adalah jumlah koleksi buku yang ramah anak, jumlah pengajar terdidik yang kurang dan masih mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kota Malang untuk menambah tenaga pengajar tambahan. Namun, dibalik semua kendala yang sedang dihadapi, kami masih terus berusaha untuk dapat merubah mindset atau perilaku masyarakat untuk dapat hidup selayaknya masyarakat menjalani dan mendapatkan hak hidupnya”.

Pendapat serupa juga dikatakan oleh pak rofiqin selaku tenaga pengajar sukarela yang ada di kampung topeng malang mengatakan bahwa :

“bimbingan mental yang kami sedang usahakan dengan LKS adalah dengan berusaha memberikan bimbingan kerohanian berupa pengajian, Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) untuk anak usia dini. Namun, yang menjadi kendala adalah motivasi dari masyarakat yang kurang terutama dari orang tua yang seakan-akan tidak peduli dengan pentingnya pendidikan agama, sehingga yang menjadi fokus kami saat ini adalah dengan memutus benang merah agar anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa nantinya tidak akan memiliki nasib yang sama.”

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses bimbingan yang dilakukan adalah rendahnya minat atau motivasi dari setiap individu. Bentuk-bentuk motivasi yang dilakukan harus bersifat nyata misalnya harus dengan memberikan sejumlah imbalan berupa sejumlah materi agar masyarakat mau melakukan apa yang diharapkan. Selain itu, masyarakat masih terbawa dengan situasi dan kondisi yang serba ada tanpa mengeluarkan usaha (meminta-minta). Salah satu bentuk sosial adalah dengan melakukan advokasi bagi masyarakat yang terindikasi menggunakan narkoba. Berikut ini merupakan data warga yang terindikasi menggunakan penyalahgunaan narkoba:

Tabel 4.5 warga yang mendapatkan penyuluhan narkoba

No	Nama	Usia	No	Nama	Usia
1	Kartini	47 Tahun	11	Bima Rudiansyah	21 Tahun
2	Muhammad Saifudin	22 Tahun	12	Zainullah	22 Tahun
3	Rijal	22 Tahun	13	Irvangga ronanda	24 Tahun
4	Aris	22 Tahun	14	Bagus Nurhayadi	26 Tahun
5	Fanani	29 Tahun	15	Paula Chandra	26 Tahun
6	Pak Andik	58 Tahun	16	Zainal Abidin	40 Tahun
7	Martono	29 Tahun	17	Muji Hadi	56 Tahun
8	Gatot	43 Tahun	18	Saiful Bukhori	40 Tahun
9	Prasetyo Hadi	44 tahun	19	Ririn	21 Tahun
10	Sugik Prasetyo Hadi	25 Tahun	20	Karti	44 Tahun

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 orang warga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan ciri-ciri baik dari segi fisik maupun psikis misalnya mudah depresi, penurunan berat badan yang drastis, sering mengeluhkan sakit kepala, menutup diri, serta perubahan emosi yang tidak stabil. Dengan melihat berbagai ciri-ciri yang ada, maka LKS bekerjasama dengan yayasan Doulos Kota Batu untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang terindikasi narkoba. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi melakukan pendataan dan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan hampir dari separuh orang yang positif terindikasi menggunakan narkoba. Selanjutnya, proses yang dilalui yaitu dengan melakukan konseling dan pendampingan. Dari hasil konseling dan pendampingan berbagai alasan atau latar belakang masyarakat menggunakan narkoba adalah selain karena masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial yang melingkupi kehidupan. Selain itu, pengetahuan yang minim tentang bahaya penggunaan narkoba adalah yang menjadi alasan yang paling mendasar. Oleh sebab itu, berbagai terapi telah dilakukan mulai dari terapi jiwa, terapi rohani, serta terapi sosial. Pada tahap terapi jiwa sudah dilakukan konsultasi dengan psikiater dan psikolog. Pada tahap ini, konselor memposisikan dirinya sebagai fasilitator sehingga masyarakat merasa nyaman ketika sedang melakukan konsultasi. Fungsi fasilitator adalah mendampingi dalam bentuk IQ (*Intelegent Question*), EQ (*Emosional Question*), SQ (*Spiritual question*), ESQ (*Emotional Spiritual Question*). Selanjutnya

pada tahap rohani klien atau masyarakat akan diberikan semacam pendampingan dan konseling agar terhindar dari penggunaan narkoba. Selain itu, akan dilakukan tahap penguatan dari segi kerohanian dimana akan diberikan pengarahan dan pengajaran agar lebih mendekatkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah terapi sosial. Terapi sosial merupakan terapi yang menguatkan untuk dapat hidup berdampingan, lebih dekat dan terbuka terhadap lingkungan terutama lingkungan keluarga karena fungsi keluarga merupakan fungsi yang paling sederhana dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Di akhir terapi, masyarakat akan diberikan perhatian sebuah perhatian dalam bentuk penguatan ekonomi dengan memberikan sejumlah sembako dan barang kebutuhan lainnya. rencana kedepan yang akan dilakukan oleh Doulos Kota Batu yaitu akan terus tetap melakukan pengawasan terhadap warga yang telah dibina. Seperti yang diutarakan oleh salah satu konselor Doulos yang mengatakan bahwa:

“harapan kami kedepan terhadap masyarakat yang sudah kami bina agar terhindar dari penggunaan narkoba karena narkoba tidak hanya dapat merusak diri sendiri tetapi juga dapat merusak kehidupan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga langkah kedepan yang akan kami lakukan adalah tetap melakukan pengawasan serta melanjutkan pembinaan ke warga yang lainnya sehingga apa yang kami harapkan dapat mewujudkan generasi mendatang yang berprestasi tanpa menggunakan narkoba”.



Gambar 4.2 Kegiatan Tes Urin

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

b) Bimbingan Keterampilan

Masyarakat yang menempati kampung topeng malang sampai saat ini masih mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan minatnya di Rumah Kerja Desaku Menanti (RKDM) atau biasa disebut dengan rumah bengkel kerja. Upaya ini terus dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup mandiri tanpa tergantung dengan bantuan dana yang diberikan oleh dinas terkait maupun pihak ketiga lainnya. Untuk para ibu-ibu diberikan keterampilan memasak yaitu dengan membuat olahan kripik, kue kering, makanan ringan, yang nantinya akan dijual kepada wisatawan yang datang berkunjung ke kampung tersebut. Selain itu, untuk para bapak-bapak akan diajarkan tentang ternak di lahan yang minim misalnya ternak cacing, ternak lele, usaha potong rambut, dan sebagainya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan mas Satria selaku pekerja sosial yang mengatakan bahwa:

“kami sangat beruntung dapat merasakan manfaat dari program ini dan dapat tinggal di kampung ini karena sedikit merubah kehidupan kami yang jauh dikatakan layak dengan pendapatan yang rendah, tidak dapat membayar biaya sekolah, dan lain-lain. Dengan mengikuti bimbingan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial, kami sebagai masyarakat

merasa terbantu dan kembali memiliki kepercayaan untuk dapat merasakan hidup layaknya orang-orang pada umumnya yang dapat memenuhi kebutuhan pokok serta dapat menyekolahkan anak-anak. Rumah Kerajinan pembuatan topeng malang tidak bisa dikatakan setiap hari produksi, hal ini dikarenakan pengrajin akan membuat topeng hanya berdasarkan pesanan saja (*made by order*). Biasanya kalau lagi ramai hanya pada event-event tertentu yang diadakan misalnya kunjungan wisatawan dari luar negeri, kunjungan dari instansi pemerintahan, dan sebagainya. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah terkait dengan modal usaha dan kendala dalam promosi terhadap hasil produksi kampung topeng malang yang berupa kerajinan topeng. Untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah terus berupaya untuk terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan mengirimkan beberapa proposal yang dapat menunjang permodalan masyarakat”.

Selain itu, untuk ibu-ibu masih sering diadakan pelatihan membuat kue kering yang diselenggarakan oleh berbagai instansi maupun lembaga pendidikan lainnya misalnya pelatihan membuat risoles maupun kue kering lainnya yang diadakan oleh SMKN 2 Malang yang bertujuan untuk tetap menggali dan mengasah kreativitas ibu-ibu Kampung Topeng Malang. Selain itu, pelatihan tidak hanya dilakukan dengan SMKN 2 Malang jurusan tata boga tetapi juga bekerjasama dengan PKK, hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibu Meta yang mengatakan bahwa :

“pelatihan yang diberikan oleh warga terutama untuk ibu-ibu cukup sering mbak. Untuk pemateri juga tidak tentu namun yang cukup sering melakukan pelatihan adalah SMK di Kota Malang yang mempunyai jurusan tata boga misa SMKN 2 Malang yang baru saja memberikan pelatihan membuat kue kering. Hal ini bertujuan agar ibu-ibu tidak hanya memiliki keterampilan 1 bidang saja, tetapi juga di bidang lainnya sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk dapat dijual kembali kepada pengunjung yang datang ke kampung topeng.”

Pada tahun 2017, Kementrian Sosial dan Dinas Sosial telah memberikan sejumlah anggaran yang digunakan sebagai modal usaha masyarakat dalam membentuk sebuah usaha yang dikelola secara kelompok (KUBE). Namun,

pada praktiknya kelompok-kelompok yang diberikan bantuan usaha mengalami kendala. Salah satu kendala yaitu ketidak siapan kelompok dalam mengelola usaha belum berjalan dengan baik. sehingga, solusi yang ditawarkan adalah tetap melakukan pelatihan yang dilakukan oleh mitra kerja serta mempraktekkannya langsung di RKDM. Selain itu, anggota yang tergabung di dalam RKDM akan mendapatkan upah sebesar Rp35.000 – Rp 45.000 per hari serta bergantung dengan lamanya masa kerja di tempat tersebut. selain itu, masyarakat juga diberikan pelatihan membuat bakso. Pelatihan membuat bakso dilakukan selain bakso merupakan makanan yang dianggap sebagai makanan yang banyak diminati oleh masyarakat sehingga menarik wisatawan untuk datang dan membeli juga sebagai menambah kemampuan atau skill masyarakat. Kemampuan yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sebagai permulaan usaha. Usaha yang dibina dan dimonitor oleh LKS ini mempunyai sistem hasil penjualan yang didapatkan akan disetor ke LKS sebesar 35% yang nantinya laba tersebut juga dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pengelolaan wahana wisata yang ada di Kampung Topeng Malang. Berikut ini merupakan salah satu kegiatan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan:



Gambar 4.3 : Kegiatan pelatihan membuat snack tanggal 20 September 2018

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (2018)

Berdasarkan foto diatas, dapat di deskripsikan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera mengadakan pelatihan membuat bakso. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan semuanya sudah disediakan oleh Dinas. Kemudian, di dalam praktik di lapangan, masyarakat sudah mampu dalam membuat dan menjual bakso kepada pengunjung. Namun, yang masih menjadi perhatian adalah masyarakat belum mampu menerapkan sesuai dengan resep yang telah diberikan pada saat latihan, sehingga ketika dijual kepada konsumen kualitas yang dihasilkan baik rasa maupun tingkat kekenyalan tidak sama persis dengan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya di hari berikutnya, Dinas Sosial mengadakan pelatihan membuat risoles.



Gambar 4.4 : Kegiatan pelatihan membuat snack tanggal 21 September 2018

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (2018)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di hari kedua pelaksanaan pelatihan yang diberikan terdapat perbedaan. Antusias warga jika dibandingkan dengan hari pertama sedikit berkurang. Hal ini dikarenakan berbagai faktor misalnya kesibukan warga yang bekerja di pabrik, materi yang disampaikan tidak sesuai dengan minat dan bakat masyarakat, serta berbagai faktor lainnya. Selain itu, menurut masyarakat untuk menjual produk dalam makanan basah sangat sulit untuk menghasilkan laba yang cepat jika dibandingkan dengan makanan kering yang bisa tahan hingga beberapa minggu kemudian. Hal ini sesuai dengan pernyataan bu sutarni bahwa :

“pelatihan yang kedua ini agak susah mbak, soalnya kan termasuk jajanan basah. Semisal kalau mau dijual dan tidak laku akan basi. Soalnya pengunjung lebih tertarik dengan makanan ringan seperti kripik mbak”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjualkan hasil dari pelatihan yang diberikan memerlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah daya ketahanan dari produk yang dihasilkan. Untuk pembuatan bakso, masyarakat akan membuat setiap hari karena bakso merupakan jajanan yang tidak tahan lama atau cepat basi. Selain itu, bakso dipilih karena selera masyarakat menyukai bakso sehingga akan mudah cepat laku dan menghasilkan laba yang cepat. Namun, jika dibandingkan dengan risoles, pengunjung akan jarang membeli. Pembuatan risoles dilakukan hanya *made by order* atau hanya terdapat pesanan dari Dinas saja. Pengemasan dan penyimpanan yang tepat juga akan memengaruhi kualitas dari risoles atau produk yang dihasilkan.

c) Bimbingan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor agar masyarakat dapat keluar dai lingkaran kemiskinan. Sesuai dengan UUD alinea ke-4 yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara untuk dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Namun, bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat kampung topeng Malang masih banyak yang putus sekolah. Tidak hanya diberikan bimbingan berupa kemampuan soft skill atau kemampuan dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat, tetapi juga diberikan bimbingan pendidikan. Bimbingan pendidikan yaitu bimbingan yang dilakukan untuk dapat menempuh pendidikan secara formal bagi warga yang putus sekolah. Bentuk bimbingan yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan warga untuk menempuh ujian baik Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, untuk mencegah masyarakat kembali melakukan aktifitas mengemis, LKS Insan Sejahtera yang bekerjasama dengan Dinas Sosial

membangun sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Mas Satria yaitu:

“memang benar untuk masyarakat yang putus sekolah kami usahakan untuk dapat menempuh pendidikan kejar paket, namun untuk tahun ini belum sempat terlaksana karena masih banyaknya kendala administratif serta keterlambatan dalam mendaftar kejar paket A, B, maupun C. Tujuan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam menempuh pendidikan seperti warga negara lainnya adalah yang pertama agar mereka mendapatkan hak yang sama sesuai dengan UUD alinea ke-4 yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi masyarakat. Yang kedua adalah untuk dapat meningkatkan motivasi warga tentang pentingnya pendidikan sehingga juga akan menjadi motivasi untuk anak-anaknya agar semangat bersekolah mengingat masih banyaknya anak usia sekolah yang masih malas untuk pergi ke sekolah. Untuk rencana kedepan, kami akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk dapat memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti ujian Paket A,B, dan C yaitu dengan memberikan fasilitas berupa tenaga pengajar dan fasilitas yang mendukung lainnya.”Berikut ini merupakan daftar peserta Paket A, B, dan C.

Tabel 4.6 daftar peserta paket A

No.	No. Rumah	Nama	Umur	Pendidikan Akhir	Paket	Keterangan
1	2	Kartini	49	-	A	
2	2	Holifah Sabalila	16	-	A	
3	3	Ngateni	40	-	A	
4	3	Dwi Indayati	28	-	A	
5	4	Rengga Harianto	23	-	A	
6	4	Miffa	19	-	A	
7	10	Siti Mufmainah	43	-	A	
8	10	Rizal	15	-	A	
9	11	Aris Suprianto	22	-	A	
10	15	Poniyem	33	-	A	
11	18	Sunarti	36	-	A	
12	18	Dio Rindi Pratama	16	-	A	
13	19	Mahrus	21	-	A	
14	20	Sugik Prasetyo Hadi	25	-	A	
15	20	Bima Rudiansyah	21	-	A	
16	20	Wahyu Syahputra	16	-	A	
17	34	Karti	42	-	A	
18	38	Aminah	55	-	A	
19	40	Mujihadi	56	-	A	
20	40	Suhermin	50	-	A	
21	19	Muhammad	23	-	A	

		Zainuri				
22	26	Siti Ningsih	45	-	A	
23	36	Roni Sianturi	13	-	A	
24	37	Kustiari	55	-	A	
25	35	Sumiati	65	-	A	
JUMLAH						25

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

Tabel 4.7 daftar peserta Paket B

No.	No. Rumah	Nama	Umur	Pendidikan Akhir	Paket	Keterangan
1	6	Moch Saifudin	21	SD	B	
2	9	Siska Damayanti	24	SD	B	
3	11	Nur Indah Sari	17	SD	B	
4	16	Fera Yuliani	30	SD	B	
5	19	Suma'yah	17	SD	B	
6	26	Irvangga Ronanda S	14	SD	B	
7	21	Tri Ari Panguestu	35	SD	B	
8	22	Fikri Rizky Ramadhan	18	SD	B	
9	26	Ananta Tri Putra	18	SD	B	
10	27	Agung Setiawan	32	SD	B	
11	38	Kamto Sutrisno	47	SD	B	
12	26	Ita Revina Putri S	20	SD	B	
13	37	Arif Fitriansyah Sandika	20	SD	B	
JUMLAH						13

Sumber: LKS Insan Sejahtera (2018)

Tabel 4.8 Daftar Peserta Paket C

No.	No. Rumah	Nama	Umur	Pendidikan Akhir	Paket	Keterangan
1.	7	Puji Astutik	27	SMP	C	
2.	12	Fahmi Musafa	22	SMP	C	
3.	33	Paula	25	SMP	C	
4.	24	Zainullah	22	SMP	C	
5.	21	Heri Rusdiyanto	41	SMP	C	
6.	23	Yuditya Pamungkas	30	SMP	C	
7.	25	Inda Safitri	17	SMP	C	
8.	1	Siti Yasimah	20	SMP	C	
9.	1	Achmad Yani	27	SMP	C	
10.	27	Lilis Purnawati	24	SMP	C	
11.	27	Bagus Nurhayadi	26	SMP	C	
12.	29	Yulianti Ningtiyas	34	SMP	C	
13.	29	Gito	40	SMP	C	
14.	30	Sandi Kosbianto	38	SMP	C	

15.	30	Ismy Harfiah	27	SMP	C	
16	37	Puspa Yuniar Sari	24	SMP	C	
JUMLAH						16

Sumber LKS Insan Sejahtera (2018)



Gambar 4.5 Kegiatan Gosok Gigi untuk PAUD

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti (2018)

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah melalui Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera telah melakukan pemberdayaan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia melalui bimbingan fisik, mental, sosial, bimbingan keterampilan, serta bimbingan pendidikan formal. Salah satu bentuk bimbingan fisik dan mental yaitu dengan mengajarkan masyarakat untuk dapat hidup sehat. Berdasarkan hasil pengamatan, kesehatan masyarakat sudah cukup dikatakan layak yaitu salah satu kriteria keluarga sehat adalah dengan memiliki sanitasi yang baik, pola hidup yang sehat dengan tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah diberikan pengarahan masyarakat sedikit lebih berubah ke arah yang lebih baik. namun,

masih terdapat beberapa warga terutama warga yang masih mengkonsumsi rokok dimana dampaknya akan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua yaitu, bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan saat ini masih terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari para industri kecil terutama pengrajin topeng dan usaha makanan ringan. Tujuan tetap dilakukan bimbingan pelatihan adalah tetap ingin menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat kampung topeng malang. Selain itu, juga melatih kemampuan kreativitas masyarakat dan tidak hanya bisa pada satu keterampilan saja. Bimbingan keterampilan yang diadakan oleh instansi terkait dengan pengawasan Dinas Sosial juga merupakan sebagai kontrol atau evaluasi terhadap hasil produksi yang telah dilakukan dengan tujuan agar hasil produksi dapat semakin beragam dan meningkatkan kualitas produksi yang telah dihasilkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya berbagai fasilitas-fasilitas untuk dapat menunjang kehidupan masyarakat Kampung Topeng Malang yang disediakan baik oleh Dinas Sosial maupun LKS Insan Sejahtera, sudah melaksanakan program dari Kementerian Sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya sebatas bimbingan teknis saja, namun juga mengajarkan bagaimana untuk dapat mengembangkan keterampilan yang ada melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif. Menurut UNESCO (Riswan:2015) Industri kreatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan pengetahuan, produk, jasa yang orisinal, serta merupakan hasil karya sendiri. Sehingga industri kreatif juga dapat dikatakan

sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan meniru hasil karya orang lain dengan menambahkan inovasi-inovasi sehingga meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Tujuan pengembangan industri ekonomi kreatif adalah sebagai sarana untuk dapat mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut, meningkatkan kreativitas, serta melatih masyarakat untuk berwirausaha sehingga akan terbentuk mental yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan usaha ekonomi kreatif juga dapat melatih keterampilan masyarakat untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan / *problem solving*, dimana kebiasaan masyarakat yang berada di Kampung Topeng Malang menyelesaikan masalah dengan cara yang instan tanpa melalui prosedur yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mas Satria selaku pekerja sosial yang ada di Kampung Topeng Malang.

“upaya yang dilakukan untuk dapat merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya melakukan aktivitas dengan mengemis kami berikan pelatihan-pelatihan. Di dalam pelatihan, mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam memulai sebuah usaha sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing individu. Setelah diberikan pelatihan, warga akan diberikan modal usaha. Modal usaha inilah yang akan digunakan untuk dapat membangun usaha. Sebagai langkah antisipatif apabila sebuah usaha tidak dapat berjalan dengan baik, kami akan terus melakukan bimbingan, pelatihan, serta motivasi. Untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kampung Topeng Malang, masyarakat diajarkan untuk membuat kerajinan khas malang yang dapat dijadikan sebagai buah tangan bagi masyarakat. Selain itu, untuk lebih memikat wisatawan, di Kampung Topeng melakukan sebuah pengembangan dengan melakukan inovasi yaitu dengan menambah wahana-wahana yang dapat dimanfaatkan pengunjung misalnya spot foto yang kekinian atau *instagramable*, wahana *flying fox*, serta wisata Bank Sampah Malang (BSM) yang terinspirasi dari Kampung 3G untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat kampung tersebut. sebagai permulaan dalam melakukan sebuah usaha, Kampung Malang mematok harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat untuk dapat berkunjung ke Kampung kami yaitu hanya sebesar 5 ribu rupiah wisatawan akan mendapatkan camilan atau kudapan ringan hasil dari karya ibu-ibu kampung topeng malang. Sedangkan untuk

wahana *flying fox* dipatok dengan harga 15 ribu rupiah. Namun, untuk saat ini wahana *flying fox* tidak beroperasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya operator yang menjalankan serta sedikit sekali pengunjung yang datang.”

Pengembangan usaha ekonomi kreatif seringkali dirasakan oleh sebagian masyarakat menjadi sebuah kendala atau hambatan. Hambatan umum yang sering dihadapi adalah kurangnya dukungan pemerintah atau birokrasi dalam mengembangkan suatu usaha yang sedang dijalankan oleh pengusaha yang mempunyai modal yang minim. Untuk mengatasi masalah tersebut, membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas perekonomian lokal, serta yang menjadi fokus utama adalah usaha yang dilakukan dapat menjadikan daya minat tersendiri dalam menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Kampung Topeng Malang sehingga dapat dijadikan sebagai ciri khas bagi kampung tersebut dalam meningkatkan kreativitas para pelaku usaha dalam menciptakan produk yang inovatif. Salah satu bentuk perhatian yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera agar masyarakat Kampung Topeng Malang dalam meningkatkan perekonomian terutama masyarakat yang mempunyai keterampilan dan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan untuk terus berusaha sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing individu.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Putri selaku staff Dinas Sosial Kota Malang mengatakan bahwa:

“usaha yang dilakukan saat ini adalah mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat membantu mempermudah dalam mendirikan sebuah usaha adalah dengan memberikan kemudahan dalam mengurus surat ijin dan legalisasi usaha agar

secara hukum dinyatakan sah atau mempunyai posisi yang kuat. Sehingga, kami mengajarkan kepada masyarakat tentang hal teknis dalam memperoleh ijin usaha mengingat masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang minim agar dapat mempermudah masyarakat dalam menekuni usaha sesuai dengan minat individu tersebut. sebab, tujuan utama kita sebenarnya adalah usaha dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih mandiri serta sebagai suatu usaha antisipatif agar masyarakat tidak kembali ke jalanan. Selain itu, usaha yang dilakukan mempunyai harapan agar usaha yang dilakukan dapat terus berjalan dan mencapai produksi yang terus meningkat.”

Adapun usaha yang dilakukan dalam mendapatkan surat ijin usaha salah satu contohnya adalah untuk mendapatkan ijin usaha dalam bentuk PIRT. PIRT merupakan singkatan dari Produk Industri Rumah Tangga yang merupakan ijin produksi pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur yang harus dilakukan adalah dengan membuat proposal usaha kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Malang untuk mendapatkan rekomendasi dari pihak Provinsi. Sebelum diterbitkan ijin usaha, pengusaha melalui tahap proses pengecekan dari Dinas terkait dengan melihat tahap proses pembuatan sampai tahap pengemasan sesuai dengan standar yang berlaku. Tahap paling akhir adalah apabila usaha tersebut dinyatakan layak oleh Dinas terkait akan diterbitkan ijin usaha baru untuk dapat mendirikan usaha dan diberikan kepada pemilik usaha. Selain ijin usaha sebagai salah satu syarat dalam mendirikan sebuah usaha, Dinas Sosial juga berupaya untuk membangun Bengkel Kerja. Bengkel Kerja merupakan pusat industri pengolahan rumah tangga yang dikelola secara swadaya oleh ibu-ibu Kampung Topeng Malang dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Pembangunan Bengkel Kerja mendapatkan dukungan dari berbagai pihak-pihak donatur mulai dari instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan lain-

lain. Berikut ini merupakan rincian pembangunan Bengkel Kerja yang berada di Kampung Topeng Malang.

Tabel 4.9Daftar Donatur Pembangunan Bengkel Kerja Kampung Topeng Malang

No	Uraian	Jumlah
1	Bank Jatim	Rp 2.000.000
2	Asli Malang	Rp 500.000
3	Raymond	Rp 250.000
4	Matos	Rp 1.000.000
5	Bagus Gunawan	Rp 5.000.000
6	Pak Subandi	Rp 10.000.000
TOTAL		Rp 18.750.000

Sumber : LKS Insan Sejahtera Tahun 2016

Pendapat serupa diungkapkan oleh Mas Udin selaku penanggung jawab galeri Desaku Menantsi bahwa:

“untuk pengembangan galeri kami masih terus melakukan inovasi-inovasi. Kendala-kendala yang kami hadapi banyak mbak selain bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berkarya, kami juga terkendala dengan pemasaran mengingat untuk sehari saja bisa dikatakan kurang dari 10 pengunjung yang datang dan membeli hasil kreasi dari karang taruna yang ada di disini. Sebagai contoh coklat topeng yang dijual disini masih diproduksi oleh salah satu teman saya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki belum bisa dikatakan siap produksi dan masih harus terus berlatih agar layak untuk dijual ke konsumen. Selain itu, mahalny biaya untuk produksi coklat yang mahal seperti cetakan, bahan dasar coklat belum mendapatkan persetujuan anggaran dari Dinas Sosial sehingga kami harus menunggu hingga tahun depan.”

Kesimpulan yang diperoleh dari pernyataan diatas bahwa pengembangan usaha ekonomi kreatif yang dilakukan dengan adanya program Desaku Menanti sudah berjalan dengan baik. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LKS dan Dinas Sosial mulai dirasakan manfaatnya oleh warga binaan. Warga binaan sudah

repository.ub.ac.id

dapat dikatakan sebagai warga yang mandiri meskipun masih memerlukan bimbingan dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Diharapkan, melalui usaha-usaha inilah yang berhasil merubah pola pikir serta kebiasaan masyarakat untuk menjadi individu yang lebih baik sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat pada umumnya sehingga LKS dan Dinas Sosial akan terus berupaya hingga 5 tahun kedepan dan akan terus memantau perkembangan dari masyarakat kampung topeng malang. seperti yang diutarakan oleh Ibu yuli di Kampung Topeng Malang bahwa:

“perubahan yang dirasakan ya dulunya saya mengemis tidak mempunyai penghasilan bahkan untuk makan saja sudah susah, namun sekarang sejak saya mempunyai usaha bersama ibu-ibu binaan LKS merasa hidup menjadi lebih baik. sekarang, kami merasa beruntung saat ini kami sudah dapat mencari nafkah dengan cara yang halal, menyekolahkan anak, serta dapat hidup yang layak. Dulunya pendapatan sehari saya sebagai pengeemis bisa mencapai 100.000, namun setelah dilakukan pelatihan pemasukan ya walaupun usaha yang dijalankan dengan pendapatan lebih sedikit yang penting berkah mbak. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah terkait promosi mbak. Masih sedikit masyarakat yang kurang mengetahui kampung dan hasil produksi yang kami hasilkan, ya harapannya semakin banyak masyarakat yang mau datang dan membeli hasil produksi kami”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya mempunyai keinginan untuk hidup lebih baik, namun karena terkendala ekonomi masyarakat menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi perekonomiannya. Berbagai fasilitas sudah disediakan dengan baik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya usaha yang dijalankan saat ini, maka warga binaan dapat meningkatkan perekonomiannya. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah kurangnya minat dari masyarakat untuk datang berkunjung dan membeli

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hasil kerajinan yang dihasilkan. Sehingga warga binaan berharap pemerintah dapat bekerjasama dan menyelesaikan masalah dengan dinas terkait.

Inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh LKS dalam mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis masyarakat mengingat jumlah pengunjung dalam sebulan bisa mencapai 150 orang. Pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat juga merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh LKS dalam memberdayakan masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga, dalam mengembangkan potensi pariwisata, tidak hanya bertumpu pada aspek profit oriented saja, namun juga mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki oleh masyarakat serta merangsang masyarakat dalam berkontribusi mengelola aset yang dimiliki. Oleh sebab itu, prinsip yang dianut dalam mengembangkan potensi yang ada di Kampung Topeng Malang adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendapatan yang diperoleh melalui penjualan tiket, makanan ringan, wahana, serta pendapatan yang lain akan digunakan untuk pengelolaan pariwisata. Berikut ini merupakan rincian pengelolaan wisata kampung topeng malang:

Tabel 4.10 Jumlah Pengelolaan Wisata Kampung Topeng Malang

No	Rincian Kegiatan	Keterangan
1	Pengelolaan Taman 3 Orang	Rp 360.000
2	Pengelolaan Wahana 3 Orang	Rp 270.000
3	Pengelolaan Sampah seminggu 2x	Rp 130.000
	Total	Rp 760.000

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018) yang diolah peneliti

Program Desaku Menanti merupakan program nasional yang dilaksanakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis secara

rehabilitatif, preventif, serta berkelanjutan dianggap berhasil oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial karena mampu mengembangkan program yang dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui potensi pariwisata *heritage* sesuai dengan ciri khas Kota Malang. Melalui kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan beberapa masukan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Kampung Topeng Malang. Sehingga, inovasi-inovasi yang akan dilakukan dalam mengembangkan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan usaha peningkatan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

a). Pembangunan Pos Tiketing

Inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif adalah dengan membangun psos tiketing secara permanen. Maksudnya permanen adalah dengan membangun pos tiket dikelola dan dijaga secara swadaya oleh karang taruna sehingga akan memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh LKS. Selain itu, rencana yang akan dilakukan adalah dengan memberikan seragam bagi karang taruna yang akan menjaga pos tiketing. Tujuan dibangun pos tiketing adalah masih banyaknya masyarakat ketika memasuki area wisata tidak dikenakan biaya tiket masuk sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Selain itu, juga mengajarkan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab terhadap fasilitas yang telah diberikan oleh pihak-pihak terkait.

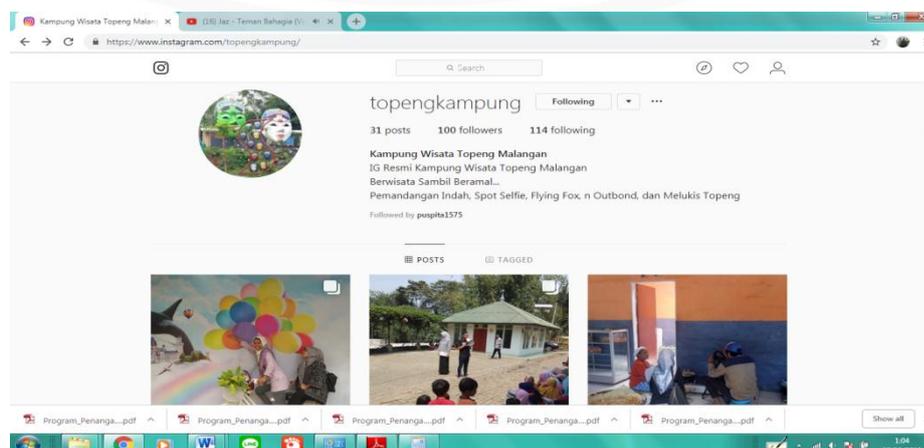
b). Pertunjukan Kesenian

Seni merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia terutama Kota Malang. Kota Malang saat ini terkenal dengan tagline promosi wisata yaitu “*Beautiful Malang*” menjadi Malang Raya Tourism “MALAYA”. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan mengangkat budaya yang dimiliki oleh Kota Malang yaitu keunikan topeng, wisata heritage, kampung-kampung tematik, serta tariam yang menjadi unggulan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada, maka Dinas Sosial provinsi Jawa Timur memberikan saran kepada Dinas Sosial agar membentuk sebuah tim kesenian dimana tim kesenian terdiri dari Karang Taruna Kampung Topeng Malang yang akan memberikan suguhan pertunjukan kesenian baik kesenian tarian, kesenian musik, maupun kesenian lainnya pada setiap Sabtu dan Minggu seperti mengadopsi konsep pengembangan wisata yang ada di Bali. Tujuan ini diharapkan dapat menambah penghasilan dari hasil pertunjukan juga dapat dijadikan ajang tukar budaya kepada masyarakat dalam melestarikan budaya yang dikemas secara apik sehingga pengunjung dapat menikmati suguhan pertunjukan sembari menikmati wahana yang disediakan di Kampung tersebut.

c). Menggunakan Sosial Media sebagai Sarana untuk Promosi

Sosial media merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Di Era globalisasi saat ini, masyarakat bisa mengakses informasi secara aktual dan cepat. Begitupun dalam hal

mengembangkan potensi wisata. Promosi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akun sosial media baik Facebook, Twitter, instagram, maupun Blogg. Sampai saat ini, Kampung Topeng Malang sudah mempunyai akun instagram yang mempunyai pengikut sebanyak 100 orang. Akun instagram yang bernama @KampungTopengmerupakan akun resmi kampung topeng malang yang dikelola oleh karang taruna. Didalamnya termuat aktifitas-aktifitas yang dapat dilakukan ketika mengunjungi kampung topeng malang sehingga dapat menarik wisatawan baik lokal maupun asing untuk datang berkunjung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat dilakukan dalam mengembangkan promosi pariwisata yang ada di kampung topeng malang melalui akun sosial media adalah dengan menambahkan tagar-tagar tertentu atau tagar unik yang diletakkan di beberapa spot *photobooth* kemudian akan memudahkan pengunjung dalam menggunggah di sosial media masing-masing sehingga masyarakat yang belum mengetahui lokasi serta wisata kampung topeng malang cukup dengan mencari tagar tersebut misalnya #KampungTopengMalang atau #KuyNangKampungTopeng dan berbagai tagar unik lainnya. berikut ini merupakan akun sosial media Kampung Topeng Malang:



Gambar 4.6 Akun Sosial Media Instagram Kampung Topeng Malang

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang (2018) diakses melalui instagram



Gambar 4.7 Website Kampung Topeng Malang
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang (2018)

c. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan Desaku Menanti

1) Dinas Sosial Kota Malang

Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan program Desaku Menanti seperti yang diutarakan oleh Bapak Heri Selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sebagai berikut:

“peran Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan program Desaku Menanti adalah mengontrol berbagai kegiatan yang ada di kampung tersebut yang dibantu dengan LKS. Kami juga sebagai fasilitator siap membantu apabila masyarakat mempunyai kendala dalam melaksanakan usaha yang dilakukan oleh warga tersebut sehingga apabila terdapat warga yang mendapatkan keluhan atau bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan akan kami tegur. Selain itu, kami juga membantu memasarkan hasil produksi olahan camilan yang dibuat ibu-ibu Kampung Topeng Malang melalui teman-teman OPD” (hasil wawancara 26 September 2018 di Kampung Topeng Malang).

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Metha selaku Ketua Insan Sejahtera bahwa:

“peran Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana teknis dimana dinas Sosial akan merencanakan program-program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung dengan dibantu dengan LKS”

Dapat disimpulkan bahwa, Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai fasilitator juga sebagai pelaksana tugas dalam urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang kemudian juga bekerjasama dengan LKS Insan Sejahtera.

2) LKS Insan Sejahtera

Peran LKS Insan Sejahtera dalam proses pemberdayaan yang ada di Kampung Topeng Malang yaitu sebagai berikut:

“Dinas Sosial Kota Mlang yang bekerjasama dengan LKS Insan Sejahtera yaitu sebagai lembaga yang dipercaya dalam mengelola sumber dana dan melaksanakan program tersebut. selain itu, kami juga sebagai fasilitator dengan sabar akan terus memantau dan mengajari masyarakat hingga 5 tahun kedepan atau sampai masyarakat benar-benar mandiri dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, LKS juga berperan sebagai pendamping bagi anak-anak yang kurang pandai dalam hal akademis sehingga harapan kedepannya adalah dapat memutus benang merah agar anak tersebut tidak mempunyai nasib yang sama dengan orang tuanya.”

Dapat disimpulkan bahwa, LKS juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Topeng Malang. LKS juga dapat berperan sebagai penyambung antara Dinas Sosial dengan Masyarakat Kampung tersebut. sehingga, LKS juga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di Kampung tersebut dengan terus melakukan kontroling, pendampingan, serta pelatihan bagi masyarakat tersebut.

3) Pekerja Sosial

Peran pekerja Sosial dalam proses pemberdayaan yang ada di Kampung Topeng Malang adalah sebagai berikut:

“saya disini sebagai pekerja dibawah naungan LKS dan Dinas Sosial mbak, kebetulan saya diberikan wewenang dalam mengontrol bengkel kerja yang ada di kampung topeng sehingga kita dapat terus memantau kualitas produksi yang dihasilkan agar sesuai dengan selera masyarakat.”

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial merupakan bagian/anggota yang dinaungi oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera dalam melaksanakan pemberdayaan tersebut. sebagai fasilitator, pekerja sosial sering berinteraksi dengan warga dalam memberikan kritik dan saran mengenai hasil produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan keterampilan yang sudah dibekali sebelumnya. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung topeng malang contohnya adalah membantu memfasilitasi dalam pendaftaran kejar paket A, B, dan C.

4) CSR

Dunia Usaha atau CSR mempunyai peran dalam pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

“Dunia Usaha atau CSR mempunyai peran dalam mendukung pelaksanaan program Desaku Menanti. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi bantuan mesin pembuatan kripik, bakso, kolam penampungan leledan lain-lain yang ditujukan untuk membuat sesuatu yang kreatif sehingga dapat meningkatkan hasil jual ekonomi sehingga dapat membantu pemasukan warga tersebut. sehingga tidak hanya bantuan secara fisik saja, bantuan moril pun diberikan dengan membantu

membangun kamar mandi umum sebagai wujud peduli terhadap kesehatan warga tersebut”.

Berikut ini merupakan daftar CSR yang diterima Kampung Topeng

Malang sampai Tahun 2017:

Tabel 4.11 Daftar CSR Tahun 2016-2018

No	Nama Instansi / Perusahaan	Keterangan
1	PLN	1. Pembelian alat transportasi distribusi sampah. 2. Pengelolaan sampah dan penghijauan lingkungan. 3. Sosialisasi dan pelatihan bank sampah. 4. Pembelian alat-alat kebersihan dan pengolahan sampah.
2	Bank Indonesia	1. Pelatihan olahan makanan dan pengemasannya. 2. Alat-alat produksi UEP
3	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Sarana dan prasarana UEP
4	Kemendikbud	Pembangunan PAUD
5	Bank Jatim	Sarana dan prasarana Alat Permainan Edukatif (APE) outdoor
6	PDAM	Sembako dan Sprei untuk para WBS.
7	Komunitas Pengusaha GOWES	Pavingisasi jalan menuju kampung 400m
8	BNI	Bantuan Sarana dan Prasarana Pengembangan UEP
9	BPJS Ketenagakerjaan	Bantuan berupa pembangunan Kamar Mandi sejumlah 3 unit
10	Universitas Muhammadiyah Malang	Bantuan Sarana dan Prasarana Trenak Lele

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

Dapat disimpulkan bahwa, untuk penunjang dalam pelaksanaan program Desaku Menanti Kota Malang juga bekerjasama dengan pihak ketiga atau CSR dalam mensukseskan program tersebut. selain itu, CSR

juga berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat Kampung Topeng Malang dalam memberikan pelatihan dan keterampilan sebagai bentuk kepedulian sesuai dengan bidang yang dikuasai.

5) Masyarakat atau tenaga sukarela

Masyarakat atau tenaga sukarela juga berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang ada di Kampung Topeng Malang, peran tersebut yaitu sebagai berikut:

“saya sebagai siswa SMKN 2 Malang yang sedang magang dan juga sebagai volunteer merasakan bahwa turut ikut memberdayakan sesuai dengan modal yang telah diberikan oleh sekolah sehingga kami turun praktek langsung ke lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya minat anak-anak dalam belajar sehingga seringkali kami harus menjemput kerumah untuk mau belajar. Yang kami fokuskan adalah anak-anak yang tidak naik kelas karena anak tersebut belum mampu dalam membaca dan menulis yang tentunya juga dibawah arahan bu meta.”

Pendapat serupa juga di ungkapkan oleh Alif selaku mahasiswa brawijaya yang sedang melaksanakan magang mengungkapkan bahwa :

“kami sebagai mahasiswa tidak hanya melakukan magang saja, namun kami juga membantu pekerja sosial dalam melakukan kontroling yang dilakukan di kampung tersebut sehingga kami juga sedikit belajar mengamalkan apa yang sudah di dapatkan di kampus melalui mengajar sesuai dengan kemampuan yang saya miliki”.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peran volunteer sangat membantu dalam proses pemberdayaan yang ada di kampung topeng malang mengingat kurangnya tenaga dalam mengelola, mengontrol, serta membimbing masyarakat yang masih mempunyai perilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Sosial dan LKS Insan

Sejahtera. Sumber daya manusia yang terdidik saat ini sangat dibutuhkan sehingga dapat membantu mengatur, mengelola sebanyak 33 Kepala Keluarga sehingga sedikit mengurangi beban yang ada.

6) Masyarakat Kampung Topeng Malang

Masyarakat Kampung Topeng Malang dalam pelaksanaan pemberdayaan program Desaku Menanti seperti yang diungkapkan oleh bu gimah sebagai salah satu masyarakat kampung topeng malang menyatakan sebagai berikut:

“saya disini sebagai penghuni di kampung sini mbak sejak adanya kampung topeng ini berdiri. Kami awalnya terjaring razia oleh satpol PP dan Dinas Sosial ketika mengemis di perempatan, kemudian kami didata dan diberikan pelatihan di Liponsos atau balai pelatihan. Setelah melalui beberapa tahapan yang dianggap oleh dinas sosial mampu, kami diberikan tempat tinggal, jaminan hidup berupa sembako, sehingga istilahnya kami hanya mencari nafkah untuk lauk pauk sebab untuk biaya sekolah juga sudah ditanggung oleh LKS”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan yang berlokasi di Kampung Tmopeng Malang masyarakat mantan gelandangan dan pengemis menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program tersebut. saat ini, masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan yang ada di kampung misalnya gotong royong bersih desa, pembinaan kerohanian, serta dilibatkan dalam musyawarah yang membahas terkait dengan pengembangan kampung topeng malang. Namun, tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam proses tersebut. hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk dapat berubah menjadi lebih baik dan hanya berpangu tangan menunggu

bantuan dari pemerintah. Sehingga yang menjadi harapan LKS dan Dinas Sosial adalah masyarakat sedikit peduli terutama untuk menghidupi keluarga dengan layak.

2. Hasil pemberdayaan masyarakat melalui Program Desaku Menanti

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang rehabilitasi sosial. Permasalahan yang sering terjadi di perkotaan menjadi tantangan yang harus di hadapi oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberika solusi untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui program Desaku Menanti.

Secara umum, pelaksanaan desaku menanti adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Malang menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki misalnya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi-potensi yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga menciptakan tujuan yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergitas dalam bentuk rencana strategis antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, serta partisipasi masyarakat sehingga manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat. Seperti yang tertuang di dalam Visi Kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik atau biasa disngkat dengan Kota yang BERMARTABAT. Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi salah satu misinya adalah dengan meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja, penguatan

perekonomian melalui sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah. Sehingga, dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah di susun sesuai dengan rencana tentunya memiliki kendala-kendala. Kendala atau permasalahan inilah dapat menjadi bumerang sehingga dapat menghambat tujuan tersebut, sedangkan kendala juga dapat menjadi sebuah penguat apabila dapat dikelola secara baik dengan menggunakan metode dan alat yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Pelaksanaan program Desaku Menanti yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial dan dilaksanakan di 5 Kota salah satunya di Jawa Timur yaitu Kota Malang dan Kota Pasuruan. Pelaksanaan program yang sudah menginjak tahun kedua tentunya mempunyai berbagai macam kendala. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini yang meliputi partisipasi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari program Desaku Menanti adalah untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan secara komprehensif dengan mengedepankan keterpaduan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Tujuan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengembealikan gelandangan dan pengemis dari kota ke daerah asal melalui rehabilitasi sosial dimana sebelum dikembalikan ke kota asal masyarakat akan diberikan pembinaan secara terpadu sehingga mereka dapat hidup mandiri dan dapat menjalankan kembali fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini dibenarkan oleh mbak putri selaku pekerja sosial dalam wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan program Desaku Menanti merupakan program yang di prakarsai oleh Kementerian Sosial dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Program yang dilaksanakan di 5 Kota yaitu Yogyakarta, Pasuruan, Padang, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, serta Kota Malang. Tujuan khusus yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini adalah dapat merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat menjadi lebih baik mengingat mereka dulunya aktivitas yang dilakukan hampir sepenuhnya di jalanan dan upaya yang kami lakukan diharapkan agar tidak kembali mengemis kembali”.

Pendapat serupa juga didukung dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan ibu Winarti selaku salah satu pengurus LKS menjelaskan bahwa:

“tujuan dari program ini memang lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga yang selalu menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak kembali kejalanan. Proses-proses yang dilalui tidak instan ya mbak seperti membangun infrastruktur yang langsung kelihatan hasilnya, namun berbeda dengan membangun manusia atau SDM perlu kesabaran dan keterampilan untuk mengajarkan agar masyarakat dapat hidup secara mandiri secara ekonomi dan sosial”.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tujuan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Topeng Malang mempunyai harapan bahwa masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas selayaknya masyarakat pada umumnya yang mencari nafkah dengan cara yang halal, berperilaku hidup sehat, serta hidup gotong royong dan berdampingan agar dapat diterima kembali keberadaanya di wilayah tersebut. secara harfiah, pemberdayaan atau *empowerment* yang mempunyai makna bahwa kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam mempengaruhi kelompok lain sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sehingga tujuan pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat yang lemah baik secara fisi maupun

non fisik. Sehingga, pemberdayaan juga merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat yang menekankan kepada pelatihan keterampilan, pengetahuan, serta kontrol yang dilakukan agar pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Program Desaku Menanti merupakan program yang dilakukan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang ada di perkotaan secara komprehensif, yang mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Sehingga, kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat rehabilitatif, preventif, maupun suportif, tetapi juga dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus (*sustainability*). Pelaksanaan program ini dilaksanakan atas dasar rehabilitasi sosial berbasis desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya dengan tujuan untuk meningkatkan penghargaan harkat dan martabat sehingga program yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan yang sudah dilakukan dalam 2 tahun belakangan ini mempunyai fokus rehabilitasi sosial bagi WBS. Kemudian di tahun selanjutnya kegiatan akan difokuskan kepada pengembangan rehabilitasi sosial yang diarahkan kepada kegiatan preventif untuk masyarakat sekitar Kampung Topeng Malang sehingga, dampak yang dapat diketahui yaitu melalui aspek ekonomi dan aspek sosial.

1) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan salah satu yang menjadi fokus dalam pembangunan sumber daya yang ada di Kampung Topeng Malang. Hal ini

dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor utama yang dihadapi oleh WBS yang dahulu terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Berbagai faktor melatarbelakangi masyarakat lebih memilih melakukan aktivitas mengemis daripada mencari pekerjaan yang layak yaitu salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim. Selain itu, warga lebih memilih untuk turun kejalan dengan alasan lebih mudah dan cepat dalam memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, untuk mencegah WBS kembali turun kejalan, Dinas Sosial dan LKS melakukan pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing individu. Sebagai fasilitator, LKS berupaya untuk memfasilitasi baik dari segi financial, infrastruktur, maupun dari segi yang lainnya. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heri selaku warga Kampung Topeng Malang mengatakan bahwa:

“semenjak saya mengikuti program ini, dampak positif yang saya dapatkan adalah saya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara yang halal sehingga dapat menghidupi keluarga kami dengan beternak cacing. Kami diberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai beternak cacing karena mengingat adanya lahan yang cukup untuk beternak cacing sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai mata pencaharian yang baru.”

Selain itu, pendapat serupa diungkapkan oleh yuli yang menyatakan bahwa

“setiap bulannya kami akan mendapatkan gaji dari LKS dengan melakukan perawatan dan pengelolaan yang ada di kampung misalnya membantu jaga parkir, membantu memasarkan produk hasil olahan ibu-ibu kampung topeng malang ”

Disisi lain, pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibu Puji Astutik yang mengatakan bahwa:

“secara ekonomi ya gak cukup mbak, penghasilan saya setiap hari ya bergantung sama Dinas, saya diberi upah sebesar Rp 130.000 per bulan buat menyapu wilayah taman kampung, sedangkan bapak penghasilan ya gak tentu soale kan ya buruh harian mbak, kalo pas ada pemasukan ya bisa 250.000”

Pendapat lain diungkapkan oleh Wahyu salah satu masyarakat mengatakan bahwa :

“saya disini diberikan tugas oleh Dinas untuk mengelola galeri bersama-sama dengan Karang Taruna biar gak nganggur mbak. kalau ada pesenan topeng kami kerjakan bersama.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, yang menjadi kendala yaitu letak kampung topeng malang yang jauh dari perkotaan mengakibatkan akses menuju ke kampung terkendala karena tidak adanya transportasi umum yang dapat menjangkau hingga menuju ke lokasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LKS memberikan fasilitas berupa bentor yang merupakan dana CSR dari PLN yang dapat dimanfaatkan warga sebagai alat untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu, untuk menambah akses menuju kampung topeng malang, LKS membuat petunjuk arah yang disediakan di beberapa titik serta melakukan perbaikan jalan sekitar lokasi menuju kampung topeng malang dengan memberikan aspal sehingga akan memudahkan pengunjung dalam menemukan, mempermudah, serta memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang akan datang berkunjung ke lokasi kampung tersebut. Penambahan area bermain seperti outbond juga dapat meningkatkan perekonomian yang juga merupakan salah satu usaha dalam menambah kreativitas masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sekitar lahan kampung tersebut yang potensial. Namun, untuk

secara khusus masyarakat Kampung Topeng Malang masih terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan harian sebesar Rp 15.000 – Rp. 30.000 menyesuaikan dengan pendapatan perhari sebesar Rp 45.000 dimana akan menyesuaikan dengan konsumsi jumlah anggota keluarga mencapai 4-7 orang tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan harian. Sehingga, masih ada sebagian masyarakat yang kembali turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari saja. Namun, apabila Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera kembali menemukan warga binaan yang kembali turun ke jalan secara berkala maka akan diberikan sanksi berupa lisan maksimal 3 kali. Berikut ini merupakan gambar dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat:



Gambar 4.8 Hasil Kerajinan Topeng di Galei Kampung Topeng Malang

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

2) Aspek Sosial

Aspek sosial merupakan faktor kedua yang menjadi fokus dari program pemberdayaan yang ada di Kampung tersebut. aspek sosial yang menjadi fokus perhatian adalah merubah perilaku dan mencegah masyarakat untuk tidak kembali ke jalanan. Selain itu, penguatan kerohanian, sikap tenggang rasa dan kebersamaan, gotong royong, kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian

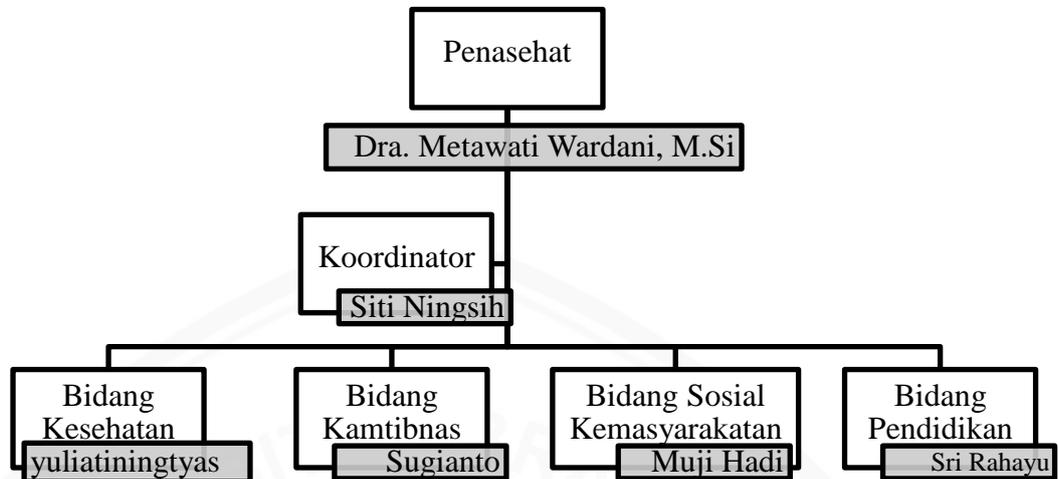
yang utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi atau mengajarkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih seperti cara mencuci tangan yang baik dan benar; menjaga kesehatan dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih seperti difteri, demam berdarah, tifus, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga mengikuti sosialisasi dari BNN agar masyarakat terhindar dari bahaya penggunaan narkoba. Sehingga, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yaitu pak samin mengatakan bahwa:

“untuk dampak sosial yang kami rasakan adalah kami tidak melakukan aktifitas mengemis dan memungut sampah yang ada di jalanan. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh LKS adalah pengajian yang dilakukan seminggu sekali setiap hari minggu di mushola dengan bapak-bapak yang ada di sini. Selain itu, kami juga rutin melakukan kebersihan kampung yang dipimpin oleh mas satria penanggung jawab LKS.”

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, LKS sudah berupaya memberikan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan keagamaan, kebersihan kampung yaitu dengan menyediakan alat-alat kebersihan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Program keagamaan yang dilakukan dirasa sudah efektif sehingga masyarakat tidak hanya diberikan keterampilan tetapi juga mementingkan kebutuhan hubungan dengan yang Maha Kuasa sehingga kebutuhan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga kebutuhan rohani. Yang menjadi kekurangan dan tantangan yang dihadapi oleh LKS dan Dinas Sosial adalah kurangnya tenaga medis yang ada di Kampung tersebut, mengingat letak kampung yang jauh dari kota dengan minimnya sarana transportasi yang memadai untuk berobat meskipun setiap awal bulan sudah terdapat pemeriksaan gratis namun tetap harus ada fasilitas kesehatan yang

memadai untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan atau universitas kedokteran serta menyediakan fasilitas ambulance dan dokter yang bersedia mengabdikan di Kampung tersebut. Selain itu, manfaat sosial dari hasil pemberdayaan yang dilaksanakan adalah perbaikan infrastruktur atau akses jalan menuju Kampung Topeng Malang yaitu menuju Desa Baran Kelurahan Wonokoyo menjadi lebih baik. Dampak Negatif dari adanya pelaksanaan program Desaku Menanti adalah adanya kesenjangan sosial antara masyarakat sekitar dengan warga binaan sosial. Kecemburuan sosial sering nampak di lingkungan masyarakat sehingga perlu adanya koordinasi antara Dinas Sosial, LKS, serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibentuklah koordinator kampung. Koordinator kampung merupakan perwakilan warga yang ditunjuk secara sukarela, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk dapat berkoordinasi dengan LKS, Dinas Sosial, serta masyarakat di luar wilayah Kampung Topeng Malang. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari koordinator Kampung Topeng Malang:

Bagan 4.5 Struktur Organisasi Koordinator Kampung Topeng Malang



Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

Dari bagan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan sudah mulai tampak dengan dibuktikan dengan adanya koordinator kampung. Proses pemilihan koordinator kampung dilakukan secara musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh warga dengan di dampingi oleh salah satu pengurus LKS Insan Sejahtera. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan yang diungkapkan oleh mas satrua bahwa:

“tujuan dibentuknya koorinator kampung agar antara mmasyarakat, Dinas Sosial, serta masyarakat kampung topeng maupun masyarakat di luar wilayah kampung topeng daoat saling berkoordinasi, bekerjasama, dan saling membantu apabila terdapat salah satu warganya yang mendapatkan musibah, mengingat secara administratif warga kampung topeng Malang yang ikut di dalam bagian warga RW7 Dusun Baran Kecamatan KedungKandang, Kota Malang.”

Selain itu, Siti Ningsih selaku Koordinator Kampung Topeng Malang

Mengatakan bahwa:

“ya saya ditunjuk oleh warga sebagai koordinator kampung melalui proses foting atau musyawarah dengan warga, ya mungkin karena saya juga dianggap mampu oleh warga kampung topeng malang dapat mengkoordinir warga dengan baik, sehingga apabila terdapat warga yang misalnya sakit atau ada warga yang meninggal saya wajib membantu dan melapor ke ketua RW 7 dan orang Dinas atau pihak LKS”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinator bekerjasama dengan warga di bidang kesehatan, kamtibnas, sosial kemasyarakatan, serta bidang pendidikan. Masing-masing bidang mempunyai tugas dan pokok masing-masing misalnya di bidang kamtibnas. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Sugianto selaku koordinator Kamtibnas yang mengatakan bahwa :

“bidang kamtibnas mempunyai tugas yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di kampung. Setiap malam, akan dilakukan ronda malam”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Mujihadi di Bidang Sosial Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa :

“saya juga bekerjasama dengan pak sugianto dalam mengamankan dan ketertiban warga. Selain itu, juga bekerjasama dengan kaang taruna dalam memfasilitasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh karang taruna misalnya pertunjukan kesenian yang akan dilaksanakan ketika terdapat tamu. Selain itu, bidang ini juga mengkoordinasi masalah sampah. Setiap bulannya per rumah akan ditarik sebesar 5 ribu rupiah yang akan digunakan sebagai kebersihan kampung. Dana yang telah terkumpul akan digunakan sebagai biaya angkut sampah setiap 2 minggu sekali, biaya perawatan taman wisata, dan lain sebagainya”.

Dapat disimpulkan bahwa secara sosial kemasyarakatan, sebagian warga sudah bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat musibah warga kampung topeng yang meninggal dunia, warga sekitar kampung tersebut bahu membahu dan takziah atau melayat untuk membantu keluarga yang mengalami kesusahan. Namun, untuk beberapa kasus

masih saja ditemui terkait dengan lahan pemakaman untuk masyarakat kampung Topeng Malang. Sebagian masyarakat di luar wilayah kampung topeng malang masih beranggapan bahwa masyarakat kampung tidak termasuk di dalam wilayah tersebut. sehingga, solusi yang ditawarkan adalah dengan membeli lahan kosong yang akan digunakan sebagai lahan pemakaman bagi warga kampung topeng malang dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Heri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial yang mengatakan bahwa :

“untuk lahan pemakaman, masih sering terjadi perdebatan antara sesama warga, sehingga kami terus melakukan koordinasi dengan petugas pemakaman yang ada di kelurahan polehan untuk dapat membantu dalam proses pemakaman. Selain itu, rencana kedepan adalah kami akan membeli sebidang tanah yang akan digunakan sebagai lahan pemakaman mengingat pemakaman yang berada di wilayah terdekat dengan kampung topeng malang penuh”.

Dampak sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Desaku Menanti adalah secara umum, pendidikan yang sudah ditempuh oleh masyarakat masih di tingkat SD. Sehingga, untuk dapat mendaftar pekerjaan di perusahaan pendidikan minimal yang harus ditempuh minimal SMA. Oleh sebab itu, LKS Bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin menempuh ujian kesetaraan SMA. Kendala yang ditemui di lapangan bahwa antusias dari masyarakat hanya diawal dalam pelaksanaan belajar mengajar. Di sisi lain, Dinas Sosial dan LKS juga berfokus kepada pendidikan anak-anak SD-SMA yang putus sekolah. Mereka yang putus sekolah akan di berikan fasilitas berupa pengembalian ke

sekolah dan biaya pendidikan sebagian ditanggung oleh Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Metha selaku Ketua LKS bahwa:

“kami juga memfasilitasi bagi anak-anak yang putus sekolah dan mempunyai semangat untuk bersekolah akan kami berikan biaya pendidikan, namun dengan catatan anak tersebut harus memiliki semangat dan niat bersungguh-sungguh untuk bersekolah. Terdapat sekitar beberapa anak yang kami nilai mau dan mampu untuk bersekolah, serta didukung dengan semangat dari orangtua dalam mendorong anaknya untuk bersekolah juga menjadikan alasan untuk membiayai anak tersebut. selain itu, pendidikan anak usia dini juga kami perhatikan yaitu dengan membangun PAUD dengan menggunakan dana APBN.” Berikut ini merupakan daftar nama siswa PAUD:

Tabel 4.12 Daftar nama siswa PAUD Insan Sejahtera

No	Nama	Keterangan
1	Syaqilla Anastasia	PAUD
2	Alfi Zahri Hamzah Rifqi	PAUD
3	Alifiana Azahra	PAUD
4	Aulia Mutiara Dibah	PAUD
5	Mohamad Fardan	PAUD
6	Cinta Putri	PAUD
7	Arzieta Fizilia	PAUD
8	Naizar Fatur Ferdiansyah	PAUD
9	Sekar Arum Pangastuti K.	PAUD
10	Asyera Sibbilea Cahyadi	PAUD
11	Arziki Pratama Aditia	PAUD

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang berada di PAUD Insan Sejahtera cukup banyak. Namun, ketika ditemui di lapangan, buku bacaan yang ramah untuk anak-anak masih minim. Sehingga untuk dapat meningkatkan minat baca anak-anak sangat diperlukan donasi dalam bentuk buku-buku sehingga dapat menarik anak untuk mengenal dan menyukai untuk membaca buku. Selain itu, tenaga pengajar yang bertanggung jawab di PAUD tersebut sedikit dan dikelola secara swadaya dan sukarela.

C. Analisis Data

1. Pemberdayaan Masyarakat PMKS melalui Program Desaku Menanti di Kampung Topeng Malang

a. proses pemberdayaan Masyarakat PMKS melalui Program Desaku Menanti

Kementerian Sosial telah menerbitkan program Desaku Menanti dimana program tersebut merupakan program nasional yang dilaksanakan di 5 Kota di Indonesia terutama di Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan dan Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang menjadi kota percontohan dalam membangun dan mengembangkan dalam mengatasi permasalahan gelandangan, pengemis, maupun pemulung. Menurut Siagian dalam Suryono (2012:12) pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, program Desaku Menanti merupakan program yang dilakukan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh aktor-aktor publik dalam mengatasi permasalahan yang dianggap menjadi permasalahan yang klasik di Indonesia. Usaha yang dilakukan dapat dimaknai sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial yaitu dengan menciptakan inovasi yang baru dengan memberikan efek atau dampak yang dapat dirasakan langsung oleh individu kelompok, organisasi, dan masyarakat.

Bentuk komitmen yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera adalah dengan memberdayakan masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Program yang dilaksanakan tidak hanya dengan tujuan rehabilitatif saja, tetapi

usaha yang dilakukan juga bertujuan untuk sustainability atau berkesinambungan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pemerintah melakukan inovasi dengan memberdayakan masyarakat berbasis desa atau biasa disebut sebagai kampung tematik. Sehingga, keberhasilan suatu program dapat diketahui melalui indikator-indikator yang ditetapkan pada wilayah tersebut.

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh aktor-aktor publik dalam hal ini Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera yang bekerjasama dengan Mitra Kerja dan masyarakat saling bersinergi satu sama yang lain sehingga target atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Komitmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera telah sesuai dengan proses-proses pemberdayaan yang diungkapkan oleh Suharto (2009:67) adalah sebagai berikut:

- 1.tahap penyadaran yaitu tahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi dalam diri masyarakat sehingga akan terbentuk perilaku yang sadar dan peduli dalam meningkatkan kapasitas yang ada di dalam individu tersebut.
- 2.tahap pengkapasitasan atau tahap transformasi dimana dalam tahap ini masyarakat akan diberikan wawasan, pengetahuan, dan memberikan keterampilan dasar sehingga masyarakat akan belajar dalam mengelola organisasi atau komunitas.
- 3.Tahap pendayaan atau tahap peningkatan intelektual yaitu sasaran atau masyarakat akan diberikan daya, kekuasaan, serta peluang sesuai dengan

kecakapan yang sudah diperolehnya sehingga akan terbentuk inisiatif masyarakat menuju masyarakat yang mandiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, aktor-aktor publik bahwa Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, dan Mitra Kerja telah melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi. Upaya atau komitmen yang dilakukan oleh aktor tersebut sudah maksimal sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat dan saling bekerjasama. Oleh sebab itu, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk dapat merubah dan menguatkan pribadi masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun sosial agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengambil peran dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartiwa (2011:181) yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mempengaruhi masyarakat menuju perilaku yang lebih baik yang didukung oleh suasana atau iklim yang memungkinkan dan dapat sebagai pelindung bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang perlu dikembangkan sehingga yang menjadi titik penting dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan pelatihan menuju masyarakat yang mandiri, produktif, dan lebih kreatif (*self-reliant communities*) serta yang paling utama adalah dengan mengajarkan masyarakat untuk tidak bergantung kepada bantuan atau charity yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, Sulistyani (2004:80) tujuan yang hendak dicapai dalam pemberdayaan adalah dengan membentuk dan merubah masyarakat menjadi pribadi yang lebih mandiri. Definsis mandiri yang diharapkan oleh aktor-aktor

publik adalah mandiri dalam berfikir, bertindak, dan mampu mengelola dalam mengeksplor kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih dan memperbaiki kehidupannya yang lebih baik.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh pranarka dan prijono (1996:2) proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui 3 fase yaitu:

1. Fase inisiasi adalah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh aktor-aktor publik dengan sasaran yang dituju adalah yaitu masyarakat, masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan di inginkan oleh pemerintah dan tetap bergantung kepada pemerintah.

2. Fase partisipatoris adalah fase dimana masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam proses pemberdayaan yang ditandai dengan adanya koordinator kampung sebagai jembatan antara Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera. Sehingga pada tahap ini, peran masih didominasi oleh pemerintah serta masyarakat dapat memberikan pendapat tentang kekurangan dari program yang sedang dijalankan.

3. Fase emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat bebas untuk menemukan dan mengaktualisasikan kemampuan yang ada dalam dirinya. Sehingga, dalam tahap ini masyarakat dibebaskan dalam merencanakan, eksekusi di lapangan, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada dan saling bersinergi dengan pemerintah.

Pada tahap inisiasi peran Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera lebih banyak dalam menjalankan program. Tahap yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kerangka peraturan dan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, kebutuhan sumber daya baik manusia maupun anggaran yang dilakukan secara terpusat. Selanjutnya, pada tahap partisipatoris yaitu masyarakat mulai diajarkan untuk terlibat langsung dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahap ini, keterlibatan pemerintah berkisar 60% dan masyarakat sebesar 40%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi dengan dibentuknya sebuah koordinator. Koordinator yang ditunjuk oleh warga secara sukarela diharapkan dapat menampung aspirasi yang dirasakan oleh warga sehingga dapat disampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Saat ini, program yang dilaksanakan hampir tahun ke 2 perlahan-lahan mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat saling memiliki dan saling menjaga aset atau fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas Sosial dengan cara tidak merusak dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara baik. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat masih bersifat pasif serta bergantung kepada LKS dan Dinas Sosial. Ketidak siapan masyarakat dapat dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan yang dapat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia serta lingkungan.

Program Desaku Menanti merupakan salah satu program terpadu dalam memberdayakan masyarakatnya melalui gerakan yang terencana dan terprogram secara rapi dengan tujuan untuk membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat agar berubah kearah yang lebih baik dan lebih mandiri

dalam berbagai aspek. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah, LKS, dan Mitra kerja.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka yang ditemui di lapangan bahwa saat ini masyarakat berada di tahap penyadaran, dimana masyarakat diberikan wawasan, pengetahuan, serta motivasi untuk dapat mandiri secara ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Sehingga, langkah yang akan dilakukan adalah dengan mempersiapkan masyarakat. Sehingga, masyarakat seharusnya sudah memasuki tahap partisipatoris dimana dalam tahap tersebut proses pemberdayaan masyarakat berasal dari pemerintah sehingga pemberdayaan yang dilakukan agar masyarakat dapat dilibatkan langsung dalam proses pemberdayaan atau disebut dengan pemberdayaan oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Sehingga, dalam pelaksanaan program ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan aktor-aktor seperti pemerintah, Lembaga Sosial, serta masyarakat itu sendiri. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada 3 tahapan yaitu tahap penyadaran dimana pemerintah dan lembaga sosial sebagai aktor utama dalam pemberdayaan mempunyai peran yaitu untuk menyadarkan kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, pada tahap transformasi masyarakat sudah mempunyai wawasan dan keterampilan dalam mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki dan tahapan peningkatan intelektual masyarakat sudah mulai diajarkan untuk terbuka serta dilibatkan dalam proses pembangunan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan kepada WBS di kampung topeng malang masih menuju tahap partisipatoris dimana masyarakat sedang berusaha menuju masyarakat yang mandiri sehingga memerlukan dorongan berupa motivasi agar lebih berdaya. Melalui berbagai macam proses pembelajaran dan pengajaran yang telah diberikan, sebagian masyarakat telah mempunyai kemauan untuk ikut terlibat dalam proses pemberdayaan. Sehingga, tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini adalah kemauan masyarakat terlibat dalam proses memberdayakan diri dan lingkungannya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses pemberdayaan masyarakat masih berada di tahap pengkapasitasan atau tahap transformasi dimana dalam tahap ini masyarakat akan diberikan wawasan, pengetahuan, dan memberikan keterampilan dasar sehingga masyarakat akan belajar dalam mengelola organisasi atau komunitas sehingga akan merangsang kemampuan masyarakat untuk dapat mengantarkan menuju kemandirian.

Sehingga, kesimpulan dari semua proses pemberdayaan yang dilakukan adalah LKS dan Dinas melakukan seleksi calon WBS dari hasil Razia PMKS di Kota Malang. Syarat utama untuk bisa menempati Desaku Menanti adalah warga Kota Malang yang mau dan berkomitmen untuk mengikuti program yang dijalankan, serta tidak mempunyai rumah yang tetap, sewa, maupun kontrak. Selain itu, bagi warga Kota Malang juga berkesempatan untuk dapat tinggal di Desaku Menanti dengan catatan masyarakat tersebut tidak mempunyai sanak saudara dan tempat tinggal yang tetap. Sehingga, dari hasil Razia ditemui

sebanyak 108 anak jalanan, 131 pemulung, serta 158 pengemis yang sudah melalui tahap seleksi administratif maupun pelatihan dan dianggap layak, terdapat 40 KK siap huni dan menempati lingkungan Desaku Menanti. Diharapkan, dengan mengikuti program ini masyarakat mempunyai niat dan kemauan untuk dapat merubah nasib keluarga menuju keluarga sehat dan mandiri.

b. bentuk-bentuk pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desaku Menanti

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. sehingga di dalam melaksanakan kesejahteraan sosial, diperlukan kerjasama yang baik antara tenaga kesejahteraan sosial, Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial serta aktor-aktor yang lain sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan dalam memberdayakan masyarakatnya. Sehingga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mampu dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya. Senada dengan hal itu, di dalam pasal 12 ayat 1 pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha. Berdasarkan penyediaan data yang telah disampaikan, aktor-aktor yang terlibat di dalam pemberdayaan sudah maksimal dalam memberikan pemberdayaan sosial. Bentuk-bentuk yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan motivasi masyarakat untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yaitu dengan mengubah Kampung Hunian menjadi Kampung wisata atau kampung tematik yang sedang menjadi ikonik di Kota Malang. Setelah itu, untuk dapat mengembangkan potensi wisata, masyarakat diberikan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan secara intens oleh aktor terkait diharapkan dapat menjadi stimulus masyarakat untuk dapat berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, manusia, maupun sumber daya yang lainnya. sehingga, pendamping atau aktor pemberdayaan sosial akan menilai bahwa masyarakat sudah siap untuk mendirikan sebuah usaha yaitu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, peralatan usaha, dan tempat usaha. Pemberian modal yang diberikan bekerjasama dengan CSR maupun donatur yang bersedia menyumbangkan partisipasinya untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan semangat masyarakat dalam berwirausaha. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Sosial dan Dinas Sosial yang dilakukan dalam pemerdayaan sosial adalah dengan membantu dalam bentuk bantuan dana yang bersumber dari APBD yang kemudian dimanfaatkan untuk penyediaan lahan dan

pembangunan pemukiman, serta membantu memasarkan produk masyarakat. Bentuk pemasaran yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan *mouth to mouth* teman-teman OPD serta melakukan promosi melalui media sosial.

Bentuk-bentuk pemberdayaan lain yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan berupa bimbingan fisik, mental, serta spiritual. Hingga sampai pelaksanaan program yang berjalan hampir 2 tahun ini, masyarakat masih menerima berbagai macam bentuk bimbingan. Bimbingan yang dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat baik dari universitas maupun masyarakat yang peduli dan secara sukarela mereka lakukan untuk dapat membangun masyarakat menjadi lebih baik. Berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan harus berdasarkan asas keadilan, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam proses pemberdayaan dengan dibentuknya koordinator kampung yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Koordinator yang dipilih berdasarkan atas sukarela yang ditunjuk oleh masyarakat. Selain itu, asas profesionalitas juga nampak dari aktor-aktor yang terlibat seperti pekerja sosial yang profesional. Pekerja sosial yang ada di Kampung Topeng Malang sudah melalui tahap seleksi oleh Dinas Sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, pekerja sosial juga mempunyai target-target yang harus dicapai serta melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal. Evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai perbaikan kedepan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Yang terakhir adalah asas keberlanjutan atau *sustainability*. Pemberdayaan yang dilakukan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau satu sampai dua tahun saja. Hasil pemberdayaan yang dilakukan akan nampak hasilnya minimal 5 tahun. Sehingga, rencana yang akan dilakukan oleh aktor terkait adalah tetap melakukan pemantauan dan tetap melakukan pelatihan dan memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang belum dan kurang maksimal dalam pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan

Program Desaku Menanti merupakan sebuah program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Program yang di laksanakan di kota yang ada di Indonesia salah satunya Kota Malang yang cukup berhasil. Program ini tidak hanya berfokus terhadap aspek rehabilitatif saja, namun juga memerhatikan aspek preventif yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan yang di laksanakan di Kampung Topeng Malang Dusun Baran, Kecamatan Kedungkandang tentunya melibatkan beberapa pihak terutama yang berperan aktif dalam pelaksanaan program ini yaitu Dinas Sosial Kota Malang, LKS Insan Sejahtera, Masyarakat Kampung Topeng Malang, Swasta, serta volunteer.

Menurut Sulistyani (2004:97) menyatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah, swasta, serta masyarakat mempunyai peran masing-masing serta memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang berbeda pula. Secara teori, pelaksanaan program Desaku Menanti sudah baik dengan melihat keterlibatan ketiga aktor tersebut yaitu pihak Dinas Sosial sudah merencanakan anggaran, melaksanakan, memonitoring pelaksanaan program ini salah satunya adalah

dengan memberikan jaminan hidup berupa sembako. Yang kedua adalah keterlibatan LKS dan Pekerja Sosial yang sudah turun ke lapangan dalam memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan pelatihan yang diberikan sesuai dengan minat dan masyarakat kampung tersebut. Peran pihak swasta juga tidak kalah penting, salah satu yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas pavingisasi atau pengembangan jalan atau akses menuju ke kampung tersebut agar mudah dijangkau oleh pengunjung, pembuatan kamar mandi umum sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di bidang kesehatan, serta berbagai bentuk lainnya yang dapat menunjang dalam pelaksanaan program tersebut. Namun yang masih menjadi kendala di lapangan adalah terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat yang ada di Kampung tersebut. Hal ini dikarenakan dengan melihat latar belakang masyarakat yang sudah lama hidup di jalanan dengan melakukan aktivitas mengemis dan memulung yang dilakukan selama bertahun-tahun serta dengan melihat latar belakang pendidikan masyarakat tersebut yang hanya lulusan Sekolah Dasar bahkan terdapat beberapa masyarakat yang tidak tamat sehingga mengakibatkan masyarakat tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, akses menuju ke lokasi pun cukup jauh dan tidak adanya transportasi publik mengakibatkan terhambatnya proses distribusi hasil olahan camilan kepada masyarakat umum. sehingga akan sedikit lebih rumit untuk dapat mengubah perilaku tersebut.

Sifat program desaku menanti merupakan sebuah program yang dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainability*) peran swasta juga menjadi salah satu penghambat dimana swasta terlalu berat apabila harus memfasilitasi

dalam bentuk memberikan financial atau biaya, sehingga alternatif yang diberikan adalah dengan memberikan fasilitas yang sifatnya sementara atau dan tidak terlalu memakan banyak anggaran. Faktor-faktor inilah yang terus menjadi tantangan bagi Dinas Sosial dan LKS bersama dengan pekeja sosial dalam mewujudkan tujuan utama program ini yaitu agar masyarakat yang tinggal di kampung tersebut dapat hidup secara mandiri, sejahtera secara ekonomi dan sosial yaitu dengan memperluas kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta sehingga tujuan dan keterlibatan dari masing-masing aktor dapat bersinergi satu dengan yang lainnya supaya terjadi keseimbangan, memahami, serta melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

2. Hasil pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan yang ideal yaitu pemberdayaan yang dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, serta terdapat adanya inovasi-inovasi yang bertujuan untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. selanjutnya menurut Ite dalam Suharto (2009:59) bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat misalnya lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, terutama di bidang ekonomi. Sehingga, dengan mempengaruhi lembaga-lembaga dalam mencapai akses atau tujuan yang ingin dicapai maka akan dengan mudah dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, alam, maupun sumber daya yang lainnya.

Sesuai dengan peraturan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat bahwa penataan ruang

partisipatif desa digunakan untuk memperkuat dan merencanakan pembangunan desa. Yang kedua yaitu untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah terhadap komoditas yang dimiliki sehingga komoditas tersebut dapat menjadi ciri khas yang dapat menjadikan andalan bagi kawasan tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera memanfaatkan lahan yang ada di desa untuk dibangun sebuah pemukiman yang akan dihuni oleh mantan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pemulung atau termasuk golongan PMKS yang sebelumnya sudah menjalani tahap penjarangan dan diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam memberdayakan masyarakat sudah cukup baik. Bentuk pelayanan yang diberikan dibagi menjadi 2 kategori yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial.

a. Aspek Ekonomi

Secara umum, menurut Kieffer dalam Suharto (2009:63) indikator keberhasilan pemberdayaan dalam aspek ekonomi dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu dapat mengevaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya, dan mempunyai keinginan yang sama akan pemenuhan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. Secara keseluruhan dalam aspek ekonomi masyarakat kampung topeng malang

sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok (Sandang, papan, pangan). Jika dibandingkan dengan kehidupan yang dahulu, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan dari hasil jerih payah di jalanan dimana dalam sehari pendapatan maksimal yang dapat diraih hingga Rp.70.000. dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi faktor utama masyarakat turun ke jalan serta lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim. Selain itu, pemenuhan kebutuhan papan sudah tidak menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakat penerima program desaku menanti tidak perlu mengeluarkan biaya sewa rumah (gratis) sehingga biaya untuk sewa rumah dapat dialokasikan ke sub bagian lain misalnya kebutuhan pangan keluarga.

2. Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan dalam memperoleh akses. Pertama yaitu akses terhadap pelayanan keuangan. Selain itu, masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan akan diberikan akses oleh Dinas Sosial dan LKS untuk diberikan informasi lowongan pekerjaan. Tujuan diberikannya informasi lowongan pekerjaan adalah untuk membantu meringankan beban salah satunya adalah untuk biaya perawatan anak seperti biaya sekolah, keperluan pokok anak, kesehatan dan kebersihan keluarga dan lain-lain. Kedua yaitu penurunan beban dalam pekerjaan domestik termasuk dalam perawatan anak. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan masih ditemui sebagian warga yang kurang bisa memenuhi kebutuhan pokok anak. Oleh sebab itu, LKS memberikan bantuan berupa bantuan peralatan sekolah

seperti buku, sepatu, dan alat tulis namun dengan catatan bahwa anak yang bersangkutan harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bersekolah. Ketiga yaitu akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. Salah satu contoh yang dapat dilihat di lapangan bahwa pada tahun 2017, masyarakat menerima sejumlah bantuan modal usaha sebesar 2 juta rupiah yang akan digunakan sebagai aset kepemilikan usaha produktif rumah tangga sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing masyarakat.

b. Aspek Sosial

Hasil pemberdayaan kedua yang dapat dilihat yaitu aspek sosial. Dalam aspek sosial, indikator yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah yang ditandai dengan kepercayaan diri dan kebahagiaan untuk dapat memiliki kesejahteraan yang sama. Kepercayaan masyarakat muncul ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi misal kebutuhan pokok sandang, papan, serta pangan. Kepercayaan diri dapat dimunculkan melalui pemberian pelatihan. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. selain itu, masyarakat juga diberikan motivasi oleh Dinas Sosial, LKS, maupun pekerja sosial untuk tidak patah semangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui cara yang benar tanpa harus turun ke jalan.
2. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses. Salah satu indikator yang dapat dilihat yang pertama yaitu kesadaran

masyarakat terhadap pelayan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Namun, kenyataan di lapangan terdapat beberapa keluarga yang masih kurang sadar dan peduli dengan kesehatan keluarga. Hal ini ditandai salah satu contohnya adalah keinginan masyarakat untuk dapat mengontrol jumlah anak. Sehingga, anggapan banyak anak banyak rejeki masih menjadi pemikiran yang lumrah di masyarakat. Sehingga, sesuai dengan salah satu indikator keberhasilan program desaku menanti adalah untuk dapat berubah secara fungsi sosial, maka Dinas Sosial dan LKS telah bekerjasama dengan Doulos Kota Batu untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran kesehatan reproduksi dan keluarga salah satunya yaitu mengikuti program KB, bahaya narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menekankan kepada masyarakat untuk dapat memantau pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakes keterampilan termasuk kesadaran dalam kemelekan huruf. Salah satu bentuk pelayanan akses yang diberikan oleh Dinas Sosial dan LKS melalui program Desaku Menanti adalah dengan memberikan akses pendidikan kejar paket bagi masyarakat yang putus sekolah untuk dapat mengikuti ujian kesetaraan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan bagi anak sejak dini juga sudah dilakukan dengan membangun PAUD bagi masyarakat dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Ketiga yaitu pemenuhan status kesehatan dan gizi keluarga. Dinas Sosial telah melakukan koordinasi dengan Puskesmas Kedungkandang untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis

yang dilakukan di setiap 1 bulan sekali serta melakukan program posyandu untuk anak dan balita. Melalui kegiatan posyandu, masyarakat juga diberikan edukasi tentang pemenuhan gizi 4 sehat 5 sempurna dengan menggunakan anggaran yang minim.

Dari hasil pemberdayaan masyarakat melalui program desaku menanti dapat disimpulkan bahwa saat ini aspek sosial menjadi fokus utama. Pembentukan karakter yang sudah menjadi kebiasaan dimana melakukan aktivitas di jalanan sudah dianggap biasa oleh masyarakat marginal. Kehidupan jalanan yang menawarkan berbagai macam kemudahan dalam mencapai sesuatu dengan cara yang instan atau cepat sehingga akan mengakibatkan perubahan pola perilaku yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Berbagai *treatment* atau bentuk pelayanan dan pelatihan yang diberikan juga dapat merubah perilaku masyarakat meskipun hasilnya tidak maksimal. Hingga sampai saat ini masih ditemui masyarakat yang kembali turun ke jalan dengan alasan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari dimana notabene masyarakat mempunyai anggota keluarga 5-8 orang. Apabila melihat realita yang terjadi dilapangan, dari segi ekonomi sudah dapat dikatakan mampu, namun bagi sebagian masyarakat lainnya yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap akan terus difasilitasi dengan membantu mencarikan lowongan pekerjaan.

oleh sebab itu, sampai saat ini aktor-aktor pelaksana program Desaku Menanti masih menjadi tantangan sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga berbagai upaya dilakukan dengan cara preventif (mencegah) dan persuasif (ajakan). Sebab, untuk dapat membangun masyarakat terutama

dalam merubah sikap dan perilaku dari masyarakat juga membutuhkan waktu yang panjang. Di dalam aspek sosial, dengan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan LKS dapat diketahui bahwa masyarakat cenderung masih memiliki permasalahan yang sama yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para WBS. Oleh sebab itu, faktor yang dapat mempengaruhi meliputi:

1) Lingkungan

Lingkungan masyarakat yang beragam dan mempunyai latar belakang yang sama serta di dukung dengan latar belakang pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini. yang paling terpenting adalah lingkungan terkecil yaitu keluarga adalah hal yang paling utama dalam mendukung dan mensukseskan kesejahteraan keluarganyaa

2) Perilaku

Perilaku dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan keluarga sangat minim terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan keluarganya. Sehingga, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat dapat berkembang maju dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan pada bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat PMKS melalui Program Desaku Menanti sudah berjalan dengan baik. sesuai dengan undang-undang no 9 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui 3 kriteria yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, dan pengembangan usaha ekonomi kreatif.
 - a. Dari segi pengembangan sumber daya manusia, proses pemberdayaan masyarakat melalui program desaku menanti yang dilakukan dengan bimbingan fisik, mental, dan sosial masih berada di dalam tahap penyadaran. Dalam tahap ini masyarakat diberikan pengetahuan yang bersifat kognitif yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang pendampingan keterampilan serta motivasi kewirausahaan.
 - b. Dari segi pengembangan usaha ekonomi kreatif, Dinas Sosial telah memberikan bantuan stimulan usaha untuk dapat merangsang

keaktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satunya yaitu usaha berjualan bakso, snack makanan ringan, usaha membuat topeng dari mulai gantungan kunci hingga topeng untuk hiasan dinding. Untuk fasilitas penunjang dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masih belum memadai karena alat dan bahan yang digunakan dalam membuat topeng masih meminjam dari pihak ketiga / pelatih pembuat topeng.

- c. Pengembangan kelembagaan kelompok sudah mulai tampak, hal ini dibuktikan dengan adanya koordinator kampung yang mempunyai wewenang sebagai jembatan antara Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, dan masyarakat. Selain itu, koordinator juga bertanggung jawab sebagai ketua dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kampung Topeng Malang.
- d. Aktor-aktor yang terlibat yaitu Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis dimana Dinas Sosial melakukan sesuai dengan tupoksinya menurut undang-undang yang berlaku mulai dari perencanaan anggaran, hingga pelaporan hasil kegiatan. LKS Insan sejahtera sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial mempunyai wewenang sebagai pelaksana (eksekutor) operasional dalam pelaksanaan pemberdayaan PMKS melalui program desaku menanti yang ada di Kampung Topeng Malang. Serta masyarakat mempunyai peran dapat sebagai pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemberdayaan juga dapat sebagai pemberi pelayanan

kepada PMKS. Pekerja sosial mempunyai tugas yaitu sebagai penyelenggara pemberdayaan PMKS melalui program desaku menanti juga dapat melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional dengan syarat telah memperoleh izin praktik dari menteri dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial melalui lembaga sertifikasi.

2. Hasil pemberdayaan masyarakat PMKS melalui program Desaku Menanti dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Secara umum, menurut Kieffer dalam Suharto (2009:63) indikator keberhasilan pemberdayaan dalam aspek ekonomi dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu dapat mengevaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya, dan mempunyai keinginan yang sama akan pemenuhan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. Secara keseluruhan dalam aspek ekonomi masyarakat kampung topeng malang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok (Sandang, papan, pangan).
2. Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan dalam memperoleh akses. Pertama yaitu akses terhadap pelayanan keuangan. Kedua yaitu penurunan beban dalam pekerjaan

domestik termasuk dalam perawatan anak. Ketiga yaitu akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga.

b. Aspek Sosial

Hasil pemberdayaan kedua yang dapat dilihat yaitu aspek sosial. Dalam aspek sosial, indikator yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah yang ditandai dengan kepercayaan diri dan kebahagiaan untuk dapat memiliki kesejahteraan yang sama.
2. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses. Salah satu indikator yang dapat dilihat yang pertama yaitu kesadaran masyarakat terhadap pelayan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Yang kedua yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakes keterampilan termasuk kesadaran dalam kemelekan huruf. Ketiga yaitu pemenuhan status kesehatan dan gizi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan saran untuk sekiranya dapat mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program desaku menanti ke arah yang lebih baik. Berikut saran yang diberikan penulis, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan prestasi kinerja pegawai atau aktor yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat PMKS melalui program desaku menanti alangkah baiknya jika menambahkan insentif pegawai yakni dengan memasukkan kedalam anggaran belanja, namun

pegawai juga dituntut untuk dapat membuat laporan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dengan adanya cara ini lebih mendorong semangat pegawai dalam menjalankan sesuai dengan tupoksinya.

2. Untuk mengatasi konflik yang sering terjadi antara masyarakat warga binaan di Kampung Topeng dengan wilayah masyarakat sekitarnya dengan memperbaiki komunikasi yaitu dengan cara mengadakan pertemuan rutin antara Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, masyarakat kampung topeng malang, dan masyarakat sekitarnya yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman antar pihak serta melibatkan masyarakat sekitar di berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Topeng Malang.
3. Diperlukan kerjasama yang lebih luas contohnya dalam bidang kesehatan yaitu dapat mengadakan kerjasama dengan pendidikan kedokteran dari universitas di Kota Malang untuk mengatasi apabila warga sedang mengalami gangguan kesehatan sewaktu-waktu. Di bidang pengembangan usaha ekonomi kreatif perlu melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Malang untuk semakin memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Pariwisata yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat misalnya dengan salah satu kriteria yaitu yang memiliki dan mengetahui potensi di bidang pariwisata terutama di bidang wisata kampung topeng serta memiliki kemampuan bahasa yang baik bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat menjadi *tour guide* bagi wisatawan baik lokal maupun asing.

4. Pengembangan ekonomi kreatif di Kampung Topeng Malang sudah cukup baik, namun alangkah lebih baik jika mempersiapkan masyarakat dalam proses pembuatan kerajinan serta perlu mendapat dukungan dari Dinas Sosial untuk dapat memfasilitasi alat-alat produksi kerajinan topeng, gantungan kunci, dan sebagainya.
5. Untuk mendukung proses belajar mengajar yang ada di PAUD Insan Sejahtera, maka perlu adanya penambahan fasilitas salah satunya taman bacaan dengan tujuan selain untuk menambah minat baca siswa, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat merangsang kreatifitas dan daya imajinasi siswa.
6. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, pengelola wisata Kampung Topeng Malang dapat memaksimalkan potensi pariwisata dengan memanfaatkan dan mengupdate di berbagai media sosial baik instagram, twitter, facebook, maupun website.

LAMPIRAN FOTO PENDUKUNG PENELITIAN



Gambar 1. Kegiatan Menggosok Gigi di PAUD Insan Sejahtera

Sumber : Dokumentasi Pribadi(2018)



Gambar 2. Kegiatan Pembagian Sembago setiap awal bulan

Sumber : LKS Insan Sejahtera (2018)



Gambar 3. Pembagian Sembako oleh Doulos Kota Batu

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 4. Pengecekan Kesehatan Gratis dan Tes Urine oleh Doulos Kota Batu

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)





Gambar 7 : Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Insan Sejahtera

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 8 : Kegiatan Belajar Mengajar dan Mengerjakan PR

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 9 : Kegiatan pelatihan di Dinas Sosial

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 10 : Kunjungan Sekolah Alam RIAU yang sedang melakukan Mewarnai Topeng

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 11 : Kunjungan Sekolah Alam RIAU yang sedang melakukan belajar mengemas hasil produksi

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 12 : kegiatan Pembinaan Diri oleh Doulos Kota Batu

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 13. Kegiatan Pembinaan Kesehatan bagi masyarakat

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)



Gambar 14. Kegiatan Bimbingan Pendidikan Paket A, B, dan C

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, S. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT RajaGafindo Persada
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chamhuri, N. H., Karim, H. A., & Hamdan, H. 2012. *Conceptual Framework of Urban Poverty Reduction: A Review of Literature*. Sciverse ScienceDirect, 806.
- Creswell, John W., 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan; Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Iryani, Siti Wahyu. 2016. *Eksistensi KUBE Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin*. Bantul: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Sosial Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Vol.40 No.2 hal. 123-138
- Jones, C. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, G. 2009. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardikanto, Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya

- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Pasolong, H. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ponulele, Roslina Amu. 2016. *dampak Program Bantuan Fasilitas Keterampilan Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Studi Di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*. Bantul: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Sosial Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Vol.38 No.1 hal. 75-84
- Prasojo, Eko dkk. 2004. *People and society empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.IV No.02 Maret-Agustus:10-24.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:PT Refika Aditama
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2007. *Konseptual Model Pemberdayaan LSM sebagai Fasilitator Pembangunan*. Jurnal Kebijakan Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2

Sumodinigrat, Gunawan. 2011. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat: Kumpulan Esei Tentang Penanggulangan Kemiskinan*. Semarang: Bina Reka Pariwara

Syafiie, I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syukur, A. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Makassar: Persadi.

Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zauhar, S. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.

Sumber Online

Annisa. (2016, Maret 12). Diakses pada tanggal 12 Desember 2017, dari www.kemensos.go.id: <https://www.kemensos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang>

Anggraeni, Pipit. (15 April 2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang Tempati Posisi Kedua Se-Jatim*. diakses pada tanggal 20 April 2018 melalui <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/tingkat-pengangguran-terbuka-kota-malang-tempati-posisi-kedua-se-jatim/>

Endang (15 Januari 2017). *Kemiskinan di Malang Dipicu Pendidikan Rendah*. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018, dari www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/kemiskinan-di-malang-dipicu-pendidikan-rendah>

Indiana, Amelia (15 Maret 2018). *Fokus Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. diakses pada tanggal 20 November 2018 melalui <https://www.indntimes.com/news/indonesia/amp/indianamalia/3fokus-pemerintah-dalam-mengatasi-kemiskinan-di-indonesia>

Jajeli, Rois (22 April 2017). *Gubernur Jatim Komitmen Tanggulangi Kemiskinan di Jawa Timur*. diakses pada tanggal 1 Maret 2018 melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3481077/gubernur-jatim-komitmen-tanggulangi-kemiskinan-di-jawa-timur>

Laksmi, Suci. (26 April 2017). *Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*. diakses pada tanggal 1 Maret 2018 melalui https://www.kompasiana.com/slaksmisari/kemiskinan-di-provinsi-jawa-timur_5900c44cce7e616b52aaf3bd ol

Purnamawati, Desi (9 Maret 2017). Mensos Resmikan Kampung untuk Gelandangan dan Pengemis di Padang. diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/616952/mensos-resmikan-kampung-untuk-gelandangan-pengemis-di-padang> pada tanggal 1 Maret 2018

Rachman, Fadli Fauzi (17 Juli 2017). Orang Miskin di Jawa, Presentase Terbesar di Maluku. diakses pada tanggal 1 Maret 2018, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3563157/orang-miskin-terbanyak-di-jawa-persentase-terbesar-di-maluku-papua>

www.sosial.malangkota.go.id
<http://www.desakumenanti.com>

Sumber Undang-Undang

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang
 Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Kementerian Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah
 Kesejahteraan Sosial

Log Observasi

No	Tanggal	Lokasi	Hasil	Keterangan
	20 September 2018	Kampung Topeng Malang	Pembagian Sembako Kepada warga Desmen	Sampai 2 tahun ini, masyarakat Desmen masih menerima bantuan berupa sembako serta pembagian sembako biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali.
	29 September 2018	Dinas Sosial Kota Malang	Pelatihan pembuatan kripik	Sampai saat ini, masyarakat masih memperoleh pelatihan dengan tujuan agar masyarakat tetap memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengajarkan masyarakat untuk tetap menjaga kualitas produksinya.
	3 Oktober 2018	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Monitoring	LKS dan Dinas Sosial bertemu dengan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membahas kelanjutan program Desaku Menanti yaitu dengan memberikan saran agar pemuda-pemudi dapat diberdayakan yaitu salah satunya adalah dengan melestarikan kebudayaan topeng
	3 Oktober 2018	Kampung Topeng Malang	Membantu adik-adik mengajar	Dari proses mengajar, terdapat 3 orang siswi kelas 1 yang tidak naik kelas dikarenakan tidak bisa menghitung. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yaitu: 1. kurang perhatian orang tua dalam pendidikan 2. kekerasan terhadap anak (berkata kasar, kekerasan fisik) yang mengakibatkan trauma. 3. lingkungan yang tidak mendukung seperti premanisme yang ada di sekolah sehingga enggan untuk pergi ke sekolah.
	6 Oktober 2018	Kampung Topeng Malang	Mempersiapkan kegiatan tamu dari SD Bengkulu	Dari hasil kunjungan dari SD Bengkulu dapat menunjang pendapatan masyarakat seperti penjualan aksesoris mencapai Rp 200.000. selain itu, pendapatan snack atau camilan hasil produksi bisa mencapai 500.000. kegiatan yang dilakukan dimulai dengan pembukaan tari Bapang, mewarnai topeng, belajar mengemas hasil olahan produk, serta ditutup dengan makan siang.
	7 Oktober 2018	Kampung Topeng Malang	Mempersiapkan kegiatan belajar mengajar kejar paket	1. Kegiatan dimulai dengan pengenalan dan pembagian kelas. 2. Terdapat 3 kelas yang terdiri dari paket A, B, serta C dengan masing-masing peserta sejumlah 25 orang, 15 orang, serta 30 orang. 3. Peserta yang mendaftar kelas harus memenuhi persyaratan yaitu

				menyerahkan NIK (fotocopy KTP), fotocopy KK, fotocopy ijazah sebelumnya, daftar pekerjaan orang tua, serta menyerahkan foto 3x4
--	--	--	--	---

Log wawancara

No	Tanggal	Narasumber	Lokasi	Hasil
1	26 Juli 2018	Satria sebagai pekerja sosial	Kampung Topeng Malang Desaku Menanti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat merupakan mantan gelandangan, pemulung, serta pengemis yang masih dibina oleh Dinas Sosial dan LKS Insan Sejahtera. 2. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk membantu perekonomian saja, tetapi juga dilakukan pembinaan mental. 3. Sudah terdapat koordinator kamung yang bertugas sebagai jembatan antara LKS, Dinas Sosial, dan masyarakat dengan tujuan agar dapat menampung aspirasi warga dan menyampaikan pesan atau informasi dari LKS dan Dinas Sosial. 4. Saat ini juga berfokus kepada pendidikan masyarakat. Fasilitas yang diberikan adalah dengan memberikan persiapan untuk ujian paket A, B, dan C yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Selain itu, fasilitas TK dan PAUD untuk anak-anak usia 3-5 tahun dimana tidak dipungut biaya sepeserpun. 5. Pengelolaan wisata masih dipegang oleh LKS sehingga warga setiap bulannya akan mendapatkan upah. Pendapatan bersumber dari tiket, penjualan kripik, serta berbagai camilan lainnya. 6. Yang menjadi perhatian saat ini adalah dengan membentuk mental dan kepribadian warga melalui pendidikan dengan cara

				mengikutsertakan warga yang tidak tamat sekolah melalui kejar paket. Selain itu, terdapat beberapa warga yang terindikasi menggunakan narkoba sebanyak 20 warga kemudian diberikan wawasan mengenai bahaya narkoba.
2	30 Juli 2018	Pak Hadi sebagai masyarakat	Kampung Topeng Malang	Pak hadi merupakan mantan pemulung yang kemudian terjaring oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Kemudian, pak hadi di data dan diberikan pelatihan selama 6 bulan. Alasan pak hadi memulung adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, membayar kontrakan, serta membayar uang sekolah. Semenjak tinggal di kampung ini, pak hadi berprofesi sebagai peternak lele yang merupakan hasil binaan dari mahasiswa UMM, serta saat ini pendapatan per hari mencapai 15.000 serta ternak lele per 3 bulan mencapai 3.500.000. berdasarkan hasil wawancara dengan pak Hadi, yang dikatakan cukup berhasil ternak lele terdapat 2 rumah yaitu Pak Hadi dan Pak Prasetyo
3	30 Juli 2018	Ibu Sumaiyah sebagai masyarakat	Kampung Topeng Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Sumaiyah merupakan warga mantan pengemis di depan Masjid Jami' Malang hampir 5 tahun. 2. Kemudian ia terjaring dengan Dinas Sosial dan dilakukan pendataan mengenai asal usul, tempat, tinggal, dan sebagainya. 3. Setelah dilakukan pendataan, dilakukan berbagai pembinaan dan disiapkan hunian siap pakai. 4. Selama 2 tahun ini, sudah banyak perubahan yang dirasakan seperti mempunyai rumah yang layak huni, mempunyai usaha perancangan, serta dapat hidup layak tanpa memikirkan biaya lain kecuali biaya untuk membayar air. 5. Di sisi lain, beliau juga merasakan

				masih banyaknya tindak kejahatan (kemalingan) oleh warga sekitar yang masih terbiasa dengan kehidupan di jalan.
4	30 Juli 2018	Ayu	Kampung topeng malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayu merupakan siswa kelas 1 smp dimana sebelumnya ia menjadi seorang pengamen di lampu merah. Ia bersama dengan orang tuanya sebelumnya tinggal di daerah sukun dan bapaknya berprofesi sebagai tukang tambal ban. 2. Pada mulanya ayu terjaring dengan oleh Dinas Sosial kemudian di lakukan pendataan. 3. Setelah dilakukan pendataan, ayu dan keluarga diberikan penawaran untuk dapat tinggal di Desaku Menanti. 4. Selama 2 tahun, ayahnya mendapatkan pelatihan cacing, namun karena tidak sesuai dengan minat maka ayahnya memutuskan untuk membuka usaha bengkel dengan modal Rp.5000.000 yang diberikan oleh LKS.
5	30 Juli 2018	Wulan	Kampung Topeng Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disini saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab proses produksi makanan ringan di bengkel desaku menanti. 2. Terdapat 6 orang yang ada di bengkel dimana mereka akan menerima bayaran atau upah harian sekitar Rp 30.000 – Rp45.000. 3. Makanan atau kripik akan dijual kepada pengunjung sebesar Rp5000 sudah termasuk dengan harga tiket masuk. 4. Kripik dalam ukuran yang besar sekitar 500 gram biasanya mendapat orderan dari Dinas Sosial. 5. Untuk camilan coklat masih bekerjasama dengan teman karena

				alat yang digunakan masih dalam tahap mengajukan ke Dinas Sosial.
--	--	--	--	---

Log Analisis Dokumen

No	Nama Dokumen	Keterangan	Hasil
1	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial	Pada pasal 12 terdapat bentuk-bentuk Pemberdayaan Sosial
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pada Bab IV terdapat tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial
4	Permen No 51 tahun 2007	Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat	
5	Peraturan Kementrian Sosial No 8 Tahun 2012	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
6	Profil LKS Insan Sejahtera		